

Dr. ABDUL RAHMAT, M.Pd.

Pengantar Pendidikan

Teori, Konsep, dan Aplikasi

Buku ini mengkaji tentang dunia pendidikan di Indonesia sejak awalnya. Dengan menggigit dan lincah, penulisnya menguraikan keunggulan metode pendidikan yang ada dan kesulitan dalam realisasinya di Indonesia. Penulis pun mengkaji teori-teori, konsep, dan aplikasi pendidikan di dunia dan indonesia pada khususnya.



BAB I

MANUSIA DAN PENDIDIKAN

A. Hakikat Manusia

Konsep manusia dalam Islam termaktub dalam alqur'an dan hadits. Manusia diciptakan Allah dari intisari tanah yang dijadikan *nuthfah* yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Nuthfah dijadikan darah beku, darah beku jadi, *mudghah* dijadikan tulang, tulang dibalut dengan daging, sehingga menjadi makhluk lain. Dalam hadits Bukhari-Muslim mengartikulasikan bahwa ruh dihembuskan Allah SWT dalam janin setelah mengalami perkembangan 40 hari *nuthfah*, 40 hari darah beku dan 40 hari *mudghah*.

Keragaman Pandangan Tentang Manusia :

- **Perspektif filsafat :**

Menurut filsuf Plato :Manusia adalah makhluk berakal dan akal manusia berfungsi mengarahkan budi.

Menurut filsuf Aristoteles: Manusia adalah binatang yang berfikir.

- **Perspektif antropologi :**

Manusia tergolong primata yang paling sempurna jasmani dan rohani, sehingga tidak tertutup kemungkinan melahirkan perilaku dalam berbagai bentuk dan implikasinya.

- **Perspektif psikologi modern:**

Bagi Aliran Behaviorisme, manusia adalah makhluk netral. Ketika manusia dilahirkan, pada dasarnya tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulasi dalam lingkungannya.

Bagi Aliran Psikoanalisis; manusia adalah makhluk yang hidup atas bekerjanya dorongan seksualitas yang memberi daya pada ego (kesadaran terhadap realitas kehidupan dan super ego (kesadaran normatif).

- **Perspektif Psikologi humanistik:**

Manusia pada dasarnya punya potensi yang baik dan kemampuan yang tak terhingga serta memiliki otoritas atas kehidupannya sendiri. Manusia memiliki kualitas insani yang unik yaitu (kemampuan abstraksi, daya analisis dan sintesis, imajinasi, kreativitas, kebebasan kehendak, tanggungjawab, aktualisasi diri, sikap etis dan estetika.

- **Perspektif psikologi tranpersonal:**

Perspektif ini merupakan lanjutan dari psikologi humanistik. Yaitu ; Manusia memiliki potensi luhur dalam bentuk dimensi spiritual dan fenomena kesadaran transendental (manusia memiliki pengalaman subjektif transendental dan pengalaman spiritual).

- **Perspektif Pendidikan :**

Manusia adalah homo edukatif. Ketidakberdayaan manusia ketika lahir menjadi peluang bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dididik.

- **Perspektif Sosiologi :**

Manusia adalah homo sosio yaitu makhluk bermasyarakat.

Ada beberapa term untuk mengungkapkan kodrat manusia : *al-Insan*¹, *annaas*², *unas*³, *al-ins*⁴. Kata *Insan* berasal dari akar kata *uns* artinya jinak, harmonis dan nampak). *Insan* yang berasal dari kata *nasiya*, artinya lupa. *Insan* yang berasal dari kata *nasa* artinya berguncang.

Deskripsi Al-Quran Tentang Manusia

- a. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari unsur materi dan immateri. Unsur materi manusia seperti air⁵, tanah⁶, debu⁷, tanah liat⁸, sari pati tanah⁹, sari pati air yang hina¹⁰, tanah hitam seperti tembikar¹¹. Dari berbagai perspektif ayat tersebut dapat dipahami bahwa unsur materi yang menjadi asal kejadian manusia adalah dua unsur yaitu tanah dan air.¹²
- b. Manusia adalah makhluk Allah yang terdiri dari dimensi materi¹³ dan ruhani.
- c. Manusia memiliki fitrah, yaitu adanya kecenderungan menuju jalan keimanan (tauhid).
- d. Manusia dibekali dengan berbagai kelebihan.
- e. Manusia memiliki kelemahan-kelemahan.

Mutahhari memformulasikan eksistensi manusia sebagai makhluk serba dimensi, diantaranya:

Dimensi pertama: secara fisik manusia hampir sama dengan hewan.

Dimensi kedua : manusia memiliki ilmu dan pengetahuan.

Dimensi ketiga: manusia bersinergi atas kebajikan etis.

Dimensi keempat: manusia mempunyai kecenderungan keindahan.

Dimensi kelima: manusia mempunyai kecenderungan dalam hal pemujaan dan pengkudusan.

¹ Lihat QS Al-Insan, 76:1

² Lihat QS An-Nas, 114:1-6

³ Lihat QS Al-Baqoroh 2:60

⁴ Lihat QS Adz-Dzariyat 51:56

⁵ Lihat QS Al-Anbiya' 21:30

⁶ Lihat QS Nuh, 71: 17-18

⁷ Lihat QS Al-Haj, 22:5

⁸ Lihat QS As-Sajdah, 32:7

⁹ Lihat QS Al-Mukminun, 23:22

¹⁰ Lihat QS As-Sajdah, 32: 8

¹¹ Lihat QS Ar-Rahman,55:14

¹² Air yang dimaksud adalah air yang merupakan sari pati tanah melalui makanan yang dikonsumsi manusia yang berasal dari dan mengandung unsur-unsur tanah yang ada dalam tubuh manusia.

¹³ Dimensi materi nampak dalam kesempurnaan organ tubuh manusia seperti kepala, mata, hidung, dll. Dalam dimensi ruhani terdapat potensi-potensi ruhaniah yang terdiri dari ruh, nafs (jiwa), akal, qolbo dan hati nurani.

Dimensi keenam: manusia adalah makhluk serba bisa.

Dimensi ketujuh: manusia memiliki pengetahuan diri.

Dimensi kedelapan: manusia mempunyai pengembangan bakat.



Tujuan fungsional antara manusia dan alam semesta adalah untuk menciptakan sinergi bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Untuk itu, alam semesta diciptakan Allah bukan dengan main-main dan tanpa tujuan. Karena manusia merupakan satu sub sistem dengan alam semesta sebagai satu tujuan dan orientasi. Oleh karena itu, satu-satunya tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab, al-'ibadah (yang menundukkan atau merendahkan diri). Hakikat 'ibadah, terkandung 2 makna :

1. Al-'ubudiyah Lillah di dalam jiwa.
2. Semua aktivitas hidup manusia hanya berorientasi kepada Allah.

Persoalan manusia merupakan tema sentral dan titik tolak dalam memaknai pendidikan karena pendidikan pada dasarnya ingin mengantarkan manusia menuju kemanusiaan sejati. Sayangnya, persoalan manusia kurang mendapat perhatian dalam pemikiran pendidikan. Kalaupun ada kajian-kajian mengenai manusia sejauh ini belum ditemukan pandangan dasar kemanusiaan secara holistik. Kajian mengenai manusia masih sering terjebak pada pandangan dikotomik yang merupakan warisan dari corak pemikiran tipikal Yunani tentang realitas, yang mencapai puncaknya pada zaman Plato dan Aristoteles.

Menurut kedua filosof besar Yunani tersebut, realitas difahami sebagai kenyataan yang bersifat dualisme-dikotomik. Plato, misalnya mempertentangkan antara kenyataan ide yang absolut dan abadi dengan kenyataan indrawi yang relatif. Sementara apa yang disebut dengan kenyataan dalam pandangan Aristoteles terdiri dari kenyataan potensial yang berbentuk *matter* dan kenyataan aktual dalam bentuk *form*. Akibat gelombang Hellenisme, pemikiran pendidikan kita tidak dapat menghindari bias pemikiran dari arus utama (*mainstream*) filsafat Yunani tersebut. Kecenderungan ini tampak menonjol dalam karya-karya klasik mengenai manusia, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina, al-Farabi, dan al-Ghazali. Ibnu Sina membuat pemilahan manusia secara dikotomik ke dalam dua bagian, badan dan jiwa. Oleh karena itu, menurut al-Farabi terdapat pekerjaan badan dan jiwa. Sementara al-Ghazali memandang pribadi manusia sebagai kombinasi ruh dan badan yang memiliki dunianya sendiri-sendiri.)¹⁴

Al-Ghazali mendasarkan teorinya tentang penciptaan manusia dari ayat al-Qur'an, "*Ketika Aku sempurnakan kejadian manusia, Aku tiupkan ruh-Ku ke dalam tubuhnya*" (Lihat 15:29; 38:72). Pertemuan antara ruh dan badan inilah yang kemudian membentuk manusia (Lih. Nasution, 1988). Gejala yang sama juga dijumpai dalam pemikiran pendidikan yang masih berkutat dalam perdebatan klasik tentang eksistensi manusia dalam proses pendidikan. Dapat diduga yang menjadi acuan normatifnya adalah tiga aliran *mainstream* pendidikan yang *notabene* dikembangkan oleh tokoh-tokoh Barat. Acuan yang dimaksud adalah aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi yang dikembangkan oleh John Locke (1632-1704), William Stern (1871-1928), dan Schoupenheuer (1788-1860). Mengikuti pola sintetik, pemikiran pendidikan ditempatkan dalam arus pemikiran konvergensi. Mengambil referensi hadits Nabi yang terkenal, "*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan sud, fitrah. Akan tetapi, kedua orang tuanyalah yang bisa merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi*" (HR Bukhari), para pakar pendidikan Islam melegitimasi bahwa Islam mengakui eksistensi internal setiap manusia (fitrah, faktor dasar). Namun, fitrah yang masih potensial itu perlu dikembangkan melalui pengembangan lingkungan yang kondusif yakni pendidikan (faktor ajar).

Pandangan demikian tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Namun, berhenti pada pandangan ini tidak akan diperoleh pandangan yang memuaskan tentang manusia. Bertolak dari keadaan ini, tanpa menafikan pemikiran para filosof besar muslim dan pakar pendidikan, untuk kepentingan pemikiran pendidikan sekarang, perlu dibangun pandangan kemanusiaan yang utuh, holistik, yang tidak secara simplifikatif terpolakan ke dalam pandangan dualisme-dikotomik atau pemihakan.

¹⁴ Abdul Rahmat. *Pengantar Pendidikan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim, 2010, h. 2

B. Manusia Saling Mendidik Perantara Dunia

Sejarah manusia adalah sejarah pendidikan. Semenjak manusia lahir, sejak itulah pendidikan menunjukkan eksistensinya, karena pendidikan tidak lain adalah sebuah proses interaksi individu dengan subjek lain seperti manusia, masyarakat maupun alam sekitar. Menurut Paulo Freire, manusia saling mendidik satu sama lain dengan perantara dunia. Proses interaksi tersebut, manusia akan mendapatkan informasi, pengalaman, dan keterampilan baru untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Makna yang terkandung di dalamnya menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi atau sumber daya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*). Penghargaan terhadap kebebasan untuk berkembang dan berpikir maju tentu saja sangat besar, mengingat manusia merupakan makhluk yang berpikir dan memiliki kesadaran. Praktek-praktek pendidikanpun harus senantiasa mengacu pada eksistensi manusia itu sendiri.

Proses pendidikan senantiasa membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensinya untuk tahu lebih banyak dan belajar terus dalam arti seluas mungkin. Kepercayaan terhadap potensi individual memberi tekanan khusus pada pentingnya (pemunculan) kesadaran kritis dalam pendidikan, sebagai penggerak emansipasi kultural sehingga individu dapat memahami realitas objektifnya secara benar. Artinya, tidak ada peserta didik yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Keluasan lingkup potensi yang bertujuan pada pembentukan diri ini, mencuat dari tiga karakteristik *inhern* yang ada dalam sifat manusia, antara lain: *Pertama*, keluasan dan kesadaran manusia. Manusia mampu mengembangkan dan cakupan wawasannya menukik ke inti terdalam dari hakikat alam melalui perangkat pengetahuannya, mereka juga mampu mempelajari hukum-hukum dan aturan-aturan alam, sehingga memungkinkan mereka untuk menempatkan alam semesta dan kehidupan manusia pada suatu masyarakat yang lebih tinggi. *Kedua*, keluasan wilayah yang dapat dicakup oleh kehendak-kehendak manusia. *Ketiga*, kemampuan *inhern* untuk membentuk dan memberdayakan diri.

Manusia mempunyai potensi kemerdekaan untuk meraih dan melakukan berbagai macam tindakan sesuai dengan pilihannya. Manusia juga mampu melakukan distansiasi dengan lingkungan eksternalnya, serta manusia juga mampu melakukan banyak perubahan sesuai dengan cita-citanya.

Potensi-potensi manusia yang dibawa sejak lahir yang dibina dan dikembangkan menjadi sikap hidup, meliputi hal di bawah ini:¹⁵

¹⁵ ibid

1. Potensi jasmani dan panca indera, dengan mengembangkan sikap hidup sehat, memelihara gizi makanan, olah raga yang teratur, istirahat yang cukup, dan lingkungan hidup yang bersih;
2. Potensi pikir (rasional), dengan mengembangkan kecerdasan suka membaca, belajar ilmu pengetahuan yang sesuai dengan minat, mengembangkan daya pikir kritis, dan objektif;
3. Potensi perasaan dikembangkan:
Perasaan yang peka dan halus dalam segi moral dan kemanusiaan (etika) dengan menghaati tata nilai ke-Tuhanan, keagamaan, kemanusiaan, sosial budaya, dan filsafat:
 - a. Perasaan etetika dengan mengembangkan minat kesenian dengan berbagai seginya, sastra dan budaya.
4. Potensi karsa atau kemauan yang keras dengan mengembangkan sikap rajin belajar/bekerja, ulet, tabah menghadapi segala tantangan, berjiwa perintis (pelopor), suka berpakarsa, termasuk hemat, dan hidup sederhana;
5. Potensi-potensi cipta dengan mengembangkan daya kreasi dan imajinasi dari segi konsepsi-konsepsi pengetahuan maupun seni budaya (sastra, puisi, lukisan, desain, model);
6. Potensi karya, konsepsi dan imajinasi tidak cukup diciptakan sebagai konsepsi, semuanya diharapkan dilaksanakan secara operasional melalui tindakan, amal, atau karya yang nyata. Misalnya gagasan yang baik tidak cukup dilontarkan, kita berkewajiban merintis penerapannya;
7. Potensi budi nurani, kesadaran ke-Tuhanan dan keagamaan, yakni kesadaran moral yang meningkatkan harkat dan martabat manusia menjadi manusia yang berbudi luhur, atau insan kamil atau manusia yang takwa menurut konsepsi agama masing-masing.

C. Rekontruksi Ide

Dalam buku "republik" oleh Plato (427-327) menjelaskan bahwa pendidikan dikonsepsikan sebagai proses penyiapan manusia sebagai warga pendukung terwujudnya negara ideal.¹⁶ Pendidikan seyogyanyalah menjadi desain percontohan yang berdaya saing. Dalam falsafah kehidupan bernegara dan berbangsa pada Sila ke satu Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa; Sila ke dua Pancasila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Sila ke lima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh Bangsa Indonesia. Maka pendidikan mempunyai korelasi signifikan dengan falsafah Bangsa dan Negara Indonesia tersebut.

Eksistensi pendidikan terutama adalah mengembangkan manusia didiknya untuk mencapai "Ketuhanan Yang Maha Esa"-nya dan mencapai "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab"-nya. Namun sebagai institusi yang dimiliki

¹⁶ Syaeful Sagala. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2009. h. 10

masyarakat merupakan bagian juga untuk menerima "Keadilan sosial bagi seluruh Bangsa Indonesia", karena sejak zaman penjajahan sampai saat ini posisi pendidikan Islam selalu berada dalam posisi marginal.

Dengan pendidikan, manusia dapat memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual kemampuan-kemampuan emosi dalam menghadapi berbagai hal, serta kemampuan-kemampuan motorik dalam menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu.



Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang menjadi subyek dan obyek dari upaya pendidikan itu sendiri, karena mencakup 3 (tiga) aspek dasar dalam diri manusia. Pentingnya pendidikan ini bagi masyarakat tergambar dari peranan yang dibawa dalam kegiatan pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan seseorang.

Pendidikan dinyatakan secara langsung mendorong perubahan kemampuan seseorang, seperti yang dikemukakan oleh Redja Mudyahardjo (1985:70), bahwa dapat dikatakan pentingnya pendidikan adalah secara langsung mendorong terjadinya perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, selanjutnya peningkatan dalam ketiga macam kawasan tersebut

tidak sekedar untuk meningkatkan belaka, tetapi suatu peningkatan yang hasilnya dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, pekerja/profesional, warga masyarakat dan warga negara dan makhluk Tuhan.

Perkembangan suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi pendidikan masyarakatnya sebagai potensi pendidikan di wilayah tersebut. Sifatnya mutlak dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga, maupun bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa itu.

Berpijak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kemampuan setiap individu, mendorong kemajuan masyarakat dan bangsa karena dengan pendidikan yang ditempuh memungkinkan seseorang atau pihak tertentu untuk mampu berkembang secara wajar dalam aspek sosial, ekonomi, industri dan sebagainya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang menjadi subyek dan obyek dari upaya pendidikan itu sendiri, karena mencakup 3 (tiga) aspek dasar dalam diri manusia. Pentingnya pendidikan ini bagi masyarakat tergambar dari peranan yang dibawa dalam kegiatan pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan seseorang.

Pendidikan dinyatakan secara langsung mendorong perubahan kemampuan seseorang. Pentingnya pendidikan adalah secara langsung mendorong terjadinya perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, selanjutnya peningkatan dalam ketiga macam kawasan tersebut tidak sekedar untuk meningkatkan belaka, tetapi suatu peningkatan yang hasilnya dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, pekerja/ profesional, warga masyarakat dan warga negara dan makhluk Tuhan.

Pendidikan diyakini banyak orang sebagai proses yang dinamis dalam melahirkan kemampuan manusia. Manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan dapat mempercepat perkembangannya. Dengan pendidikan manusia dapat memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual kemampuan-kemampuan emosi dalam menghadapi berbagai hal, serta kemampuan-kemampuan motorik dalam menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu. Pendidikan sangat penting bagi seseorang dalam kehidupan maupun dalam memacu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses kehidupan, baik berkaitan dengan kehidupan

seseorang, kehidupan keluarga, masyarakat maupun kehidupan suatu bangsa dan negara. Melalui kegiatan pendidikan yang diikuti atau ditekuni, diharapkan berubah kemampuan seseorang dari kemampuan yang bersifat potensial menjadi kemampuan nyata yang diperlukan dalam meningkatkan taraf hidup lahir dan bathin. Pendidikan membawa perubahan-perubahan dalam diri orang yang menekuninya, seperti peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan serta adanya perubahan sikap dan perilaku, sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara kemampuan orang yang tidak berpendidikan dengan yang berpendidikan.

Pendidikan sebagai falsafah kehidupan, sebagai berikut :

- a. Pendidikan bertugas merumuskan peraturan-peraturan tentang tingkah laku perbuatan makhluk yang bernama manusia dalam kehidupan dan penghidupannya.
- b. Pendidikan menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat.
- c. Pendidikan bertugas merumuskan alat-alat, prasarana, pelaksanaan, teknik-teknik dan atau pola-pola proses pendidikan dan pengajaran dengan mana akan dicapai dan dibina tujuan-tujuan pendidikan, dan ini meliputi problematika kepemimpinan dan metode pendidikan, politik pendidikan sampai kepada seni mendidik. (*the art of education*).
- d. Isi moral pendidikan atau tujuan *intermediate* adalah berisi perumusan norma-norma atau nilai spiritual etis yang akan dijadikan sistem nilai pendidikan dan atau merupakan konsepsi dasar nilai moral pendidikan yang berlaku di segala jenis dan tingkat pendidikan.

Dalam rumusan ini terkandung empat hal yang perlu digaris bawahi dan mendapat penjelasan lebih lanjut. *Pertama* "usaha sadar" dimana pendidikan diselenggarakan berdasarkan rencana yang matang, mantap, jelas, lengkap, menyeluruh, berdasarkan pemikiran yang rasional obyektif. Pendidikan tidak diselenggarakan secara tak sengaja, atau bersifat insidental dan seenaknya, atau berdasarkan mimpi di siang bolong dan penuh fantastis. *Kedua* "fungsi pendidikan" adalah untuk menyiapkan peserta didik. "Menyiapkan" diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini menunjuk pada proses yang berlangsung sebelum peserta didik itu siap untuk terjun ke kancah kehidupan yang nyata. Penyiapan ini dikaitkan dengan kedudukan peserta didik sebagai calon warga negara yang baik, warga belajar bangsa dan calon pembentuk keluarga baru, serta mengemban tugas kelak di kemudian hari. *Ketiga*, strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan. Bimbingan pada hakekatnya adalah pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasihat dan penyuluhan agar siswa mampu

mengatasi, memecahkan masalah, menanggulangi kesulitan sendiri. Selanjutnya pengajaran adalah bentuk kegiatan di mana terjalin hubungan interaksi dalam proses belajar dan mengajar antara tenaga kependidikan (khususnya guru/ pengajar) dan peserta didik untuk mengembangkan perilaku sesuai dengan tujuan pendidikan. Terakhir pelatihan prinsipnya adalah sama dengan pengajaran, khususnya untuk ini, tujuan mengembangkan keterampilan tertentu. *Keempat*, produk yang ingin dihasilkan oleh proses pendidikan adalah berupa prosedur yang memiliki kemampuan melaksanakan peranan-peranannya untuk masa mendatang.

Untuk lebih memperjelas, ada baiknya kita simak sebuah moto yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yang berasal dari buah pemikiran seorang tokoh pendidikan nasional bangsa kita, Ki Hajar Dewantara, berbunyi "*Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*", yang artinya "Di depan menjadi teladan, di tengah (bersama anak) membina anak dan memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan (motivasi)".

Ing ngarso sung tulodo: Di depan menjadi teladan. Orang yang mendidik atau orang tua aktif memberi contoh, dan anak pun aktif menerima, mengikuti contoh yang diberikan.

Ing madyo mangun karso: Di tengah (bersama anak) memberi semangat. Orang tua secara aktif membina potensi anak, anak bereaksi mengembangkan dan menyalurkan potensinya.

Tut wuri handayani: Mengikuti dari belakang. Orang tua (penddik) mengikuti dan memberi dorongan sambil tetap memberikan pengaruh, dan anak aktif bergerak maju.

Hakikatnya perbuatan mendidik atau membimbing anak menuju kedewasaan, tidak menjadikan anak sebagai atau sasaran perbuatan mendidik yang dilakukan oleh orang yang mendidik termasuk orang tua. Anak bukan robot yang menunggu tombol perintah ditekan baru bergerak. Anak juga bukan seperangkat instrumen yang menunggu waktu untuk difungsikan. Anak tidak dijadikan sebagai landasan tempat mendaratnya" segala kemauan orang yang mendidiknya atau orang tuanya. Perbuatan mendidik itu adalah mengantarkan untuk melepaskan. Jadi, dalam mendidik, anak tidak terus menerus didampingi, tidak selalu harus diantar, tidak perlu selalu dibimbing. Dengan kata lain, ada saat tertentu di mana anak harus dilepas, diberikan kebebasan dan kesempatan untuk berdiri sendiri. Jika anak sudah dewasa maka tidak, perlu dididik lagi. Ia, telah dapat memikul tanggung jawabnya sendiri, telah dapat berdiri sendiri. Karena itu pula anak harus dilepaskan.

BAB II**KEBUTUHAN AKAN PENDIDIKAN****A. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya dalam arti perangkat pembawaanya yang baik dengan lengkap. Pada tingkat dan skala makro, pendidikan merupakan gejala sosial yang mengandalkan interaksi manusia sebagai sesama (*subjek*) yang masing-masing bernilai setara. Tidak ada perbedaan hakiki dalam nilai orang perorang karena interaksi antar pribadi (*interpersonal*) itu merupakan perluasan dari interaksi internal dari seseorang dengan dirinya sebagai orang lain.

Pada skala makro,¹⁷ masyarakat melaksanakan pendidikan bagi regenerasi sosial yaitu pelimpahan harta budaya dan pelestarian nilai-nilai luhur dari suatu generasi kepada generasi muda dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan adanya pendidikan dalam arti luas dan skala makro maka perubahan sosial dan kestabilan masyarakat berangsung dengan baik dan bersama-sama.

Pada skala makro ini pendidikan sebagai gejala sosial sering terwujud dalam bentuk komunikasi terutama komunikasi dua arah. Pendidikan dipahami sebagai pengukuhan manusia subjek yang merupakan rangkaian tentang kesadaran akan dunia (*realitas*) yang mendalam (*kritis*) sebagai *man of action*.¹⁸ Pendidikan mempunyai peranan penting dalam proses belajar peserta didik dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Dalam arti ini juga pendidikan akan memerlukan jalinan praktek ilmu dan praktek seni. Hal ini sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara (1950) bahwa:

Taman siswa mengembangkan suatu cara pendidikan yang tersebut didalam Among dan bersemboyan 'Tut Wuri Handayani' (mengikuti sambil mempengaruhi). Arti Tut Wuri ialah mengikuti, namun maknanya ialah mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa, dan makna Handayani ialah mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, memberi teladan gar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi".¹⁹

¹⁷ Abdul Rahmat. *Thing Teacher, Thing Profesional*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim, 2009, h. 211

¹⁸ Paulo Freire. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. h. 123

¹⁹ Abdul Rahmat. *Thing Teacher, Thing Profesional*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim, 2009. 12

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Konsep pendidikan tersebut yang memerlukan ilmu dan seni ialah proses atau upaya sadar antar manusia dengan sesama secara beradab, dimana pihak kesatu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi yaitu orang perorang. Atau bisa diperluas menjadi makro sebagai upaya sadar manusia dimana warga masyarakat yang lebih dewasa dan berbudaya membantu pihak-pihak yang kurang mampu dan kurang dewasa agar bersama-sama mencapai taraf kemampuan dan kedewasaan yang lebih baik. Demikian bagi Ki Hajar Dewantara pendidikan pada skala mikro tidak terlepas dari pendidikan dalam arti makro, bahkan disiplin pribadi adalah tujuan dan cara dalam mencapai disiplin yang lebih luas. Ini berarti bahwa landasan pendidikan terdapat dalam pendidikan itu sendiri, yaitu faktor manusianya.

Konsep pengajaran (yang makro) berdasarkan kurikulum formal tidak dengan sendirinya bersifat inklusif dan atau sama dengan mengajar. Bahkan dalam banyak hal pengajaran itu tergantung hasilnya dari kualitas guru mengajar dalam kelas masing-masing. Sudah barang tentu asas Tut Wuri Handayani tidak akan menjadikan pengajaran identik dengan sekedar upaya sadar menyampaikan bahan ajar dikelas kepada rombongan peserta didik mengingat guru harus berhamba kepada kepentingan peserta didiknya.

Carter V. Good (2005) merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut:²⁰

- 1). *Pedagogy is the art, practice, or profession of teaching.*
- 2). *The systematized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of student control and guidance, largely replaced by the term education.*

Artinya pendidikan ialah :

- 2). Seni, praktek, atau profesi sebagai pengajar;
- 3). Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid; dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan.

Mengutip rumusan pengertian dalam *Dictionary of Education*, Nanang Fattah²¹ menjelaskan bahwa pendidikan adalah: (a) proses seseorang

²⁰Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. h.2-4.

²¹ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004, p. 4-5

mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup, (b) proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Dengan kata lain, pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen (tetap) dalam tingkah laku, pikiran, dan sikapnya. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa ciri pendidikan, antara lain, yaitu:

- a. Pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup.
- b. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi (materi), strategi, dan teknik penilaiannya yang sesuai.
- c. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (formal dan non formal).

Apabila dikaitkan dengan keberadaan dan hakikat kehidupan manusia, pendidikan diarahkan untuk pembentukan kepribadian manusia, yaitu mengembangkan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk beragama (religius).²²

Dari beragam batasan pendidikan yang diberikan oleh para ahli, bahwa meskipun berbeda secara redaksional namun secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di dalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya. Karena itu, dengan memperhatikan batasan-batasan pendidikan tersebut, ada beberapa pengertian dasar yang perlu dipahami, yaitu:

- a. Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik yang berlangsung terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susila. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Bila anak didik sudah mencapai pribadi dewasa susila, maka ia sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakatnya.
- b. Pendidikan merupakan perbuatan manusiawi. Pendidikan lahir dari pergaulan antar orang dewasa dan orang yang belum dewasa dalam suatu

²² Nanang Fattah. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004, h.5

- kesatuan hidup. Tindakan mendidik yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sadar dan sengaja didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan tersebut menyebabkan orang yang belum dewasa menjadi dewasa dengan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, dan hidup menurut nilai-nilai tersebut. Kedewasaan diri merupakan tujuan pendidikan yang hendak dicapai melalui perbuatan atau tindakan pendidikan.
- c. Pendidikan merupakan hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antara masing-masing pribadi. Hubungan ini jika meningkat ke taraf hubungan pendidikan maka menjadi hubungan antar pribadi pendidik dan pribadi si anak didik, yang pada akhirnya melahirkan tanggung jawab pendidikan dan kewibawaan pendidikan. Pendidik bertindak demi kepentingan dan keselamatan anak didik, dan anak didik mengakui kewibawaan pendidik dan bergantung padanya.
 - d. Tindakan atau perbuatan mendidik menuntun anak didik mencapai tujuan-tujuan tertentu, dalam hal ini tampak pada perubahan-perubahan dalam diri anak didik. Perubahan sebagai hasil pendidikan merupakan gejala kedewasaan yang secara terus-menerus mengalami peningkatan sampai penentuan diri atas tanggung jawab sendiri oleh anak didik atau terbentuknya pribadi dewasa susila.
- Aspek-aspek penting dari pendidikan, di antaranya :
- a. Pendidikan merupakan proses, usaha dan bimbingan;
 - b. Pendidikan meningkatkan kecakapan intelektual dan emosional peserta didik;
 - c. Pendidikan memanusiaikan manusia;
 - d. Pendidikan mempunyai tujuan tertentu.

Penjabaran mengenai hakikat perbuatan pembimbingan, apa tujuannya, dan bagaimana hakikat pendidik dan peserta didik; semuanya sangat bergantung kepada dasar filsafah yang dianut oleh orang yang merumuskannya. Dengan demikian, perumusan itu sangat beragam. Dengan rumusan yang lebih luas, pendidikan adalah upaya sadar untuk menyiapkan peningkatan kehidupan peserta didik yang mandiri dan berbudaya harmonis, yaitu memiliki moral dan akhlak mulia, profesi yang dilandasi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tepat guna, dan memiliki kreativitas terpuji yang menyejukkan dan membawa kedamaian yang bernilai indah, sehingga kehidupannya lebih baik. Pendidikan dalam artian tersebut menjadi tanggung jawab bersama, antara keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui sekolah, baik yang dikelola oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat.

B. Pendidikan dan Proses Penyempurnaan Diri

Pembahasan mengenai fungsi manusia seperti diuraikan di atas merupakan gambaran global, belum menyentuh tataran eksistensial dalam peran-peran nyata di latar kesejarahan. Pemahaman umum tentang eksistensi manusia sebagai hamba dan khalifah berikut fungsionalisasinya dalam realitas makrokosmos semata-mata dipandang belum memadai. Fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat eksistensial jika dalam diri manusia tersedia suatu kemampuan internal yang inheren dalam penciptaan manusia itu sendiri. Kemampuan internal ini bukan semata-mata bersifat material yang lebih menekankan aspek fisiologis manusia. Bagaimana pun pentingnya aspek fisiologis, tetap tidak akan menyampaikan manusia pada tingkat kesadaran eksistensial. Al-Qur'an, dalam suatu ungkapan metaforik menyatakan bahwa kesejatian manusia tidakdi lihat dari aspek fisiknya yang menciptakan dari tanah liat /lempung atau saripati tanah (Baca: 15:26, 28; 23:12; 30:20; 32:7; 38:71; 55:14) -seperti penciptaan Adam. Ternyata, setelah penciptaan Adam mencapai kesempurnaan, Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud (baca: memuliakan) kepada Adam (2:34). Keengganan atau penolakan iblis memenuhi perintah Allah didasarkan pada pandangan bahwa ia lebih mulia karena diciptakan dari api –yang menurutnya memiliki unsur lebih tinggi–, sementara Adam hanya diciptakan dari tanah (simbol material yang menunjukkan kehinaan dan kerendahan). Namun demikian, Allah ternyata tidak melihat pada bentuk fisiologis penciptaan manusia, tetapi pada kualitas yang disimbolkan dengan penguasaan Adam terhadap nama-nama benda (*al-asma*) [2:31] – simbol kualitas intelektual atau kesadaran akan dunianya.

Pandangan ini juga dapat dikaji dari kata kunci yang dipergunakan al-Qur'an dalam mengungkapkan secara kategoris manusia dengan takaran kualitas yang berbeda. Kata kunci di maksud –sebagaimana dibahas pada bab terdahulu– adalah *basyar*, *al-nds*, dan *al-insdn*. Dari sudut pandang yang lebih substantif, yang membuat manusia mendapat kualitas *ahsanu taqwtm* (95:5), sebaik-baik penciptaan, bukan hanya disebabkan kesempurnaan fisiologis-biologis seperti postur tubuh, keindahan dan kesempurnaan perawakannya atau kelengkapan fisiknya, melainkan keseluruhan kepribadiannya yang meliputi kemampuan maknawinya baik intelektual, moral maupun spiritual.²³

Dalam konteks kata *insan*, kebermaknaan hidup manusia akan bisa diperoleh apabila ia mampu meng-aktualisasikan dirinya melalui aktivitas etik dan moral, intelektual, kultural, dan spiritual. Dalam pengertian demikian yang lebih dipentingkan oleh manusia adalah kepekaan etik dan moral, ketajaman intelektualitas, keluasan visi kultural, dan kedekatan spiritual dengan Allah. Namun kenyataannya, tidak semua manusia berhasil mencapai kualitas perkembangan seperti tersebut di atas meskipun mempunyai potensi untuk

²³ Abdul Rahmat, *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim, 2010, h. 144

mencapai tingkat kesadaran kemanusiaan tertinggi. Kebanyakan manusia terjatuh atau hanya sampai pada tingkatan *basyar*, di mana kepuasan kehidupannya hanya diukur seberapa banyak ia mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.

Pada tataran ini perlu membicarakan suatu potensi ruhani yang dalam kamus Islam disebut *fitrah*. Fitrah dapat dikatakan sebagai unsur dominan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dalam menjalankan seluruh fungsi kemanusiaannya. Kemampuan manusia menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah banyak dipengaruhi oleh potensi fitrah ini. Sebaliknya, pengingkaran terhadap potensi ini akan mengakibatkan manusia jatuh pada kualitas yang paling buruk (95:5; 7:179), atau paling tidak hanya sampai pada kualitas *basyar*.

Sepanjang pengertian umum, fitrah sering difahami sebagai potensi yang bercorak keagamaan. Pengertian ini ditarik dari firman Allah salah surat al-Rum/31:30-31.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُبِينٍ إِلَيْهِ وَآتَقُوهُ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah".

"Hadapkanlah wajahmu kepada agama (din) dengan lurus (hanif), fitrah Allah yang dengannya Ia menciptakan manusia atas fitrah itu. Tak ada perubahan dalam penciptaan Allah Itu adalah agama yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari". Potensi keagamaan yang ada secara alami (*fitrah majbullah*) itulah yang menyebabkan manusia berkeinginan suci dan secara kodrati condong kepada kebaikan dan kebenaran (*hanif*). Pencarian kebenaran secara murni dan tulus dan pemihakan kepada yang benar dan baik dengan sendirinya menghasilkan sikap menghormati kebaikan dan kebenaran. Dengan begitu, sikap keberagamaan yang *hanif* akan memberikan kebahagiaan sejati. Sabda Nabi, "Sebaik-baik agama di sisi Allah adalah *al-hanajiyat al-samhah*", yaitu

semangat mencari kebenaran dengan lapang dada, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan, dan tidak membelenggu jiwa.²⁴

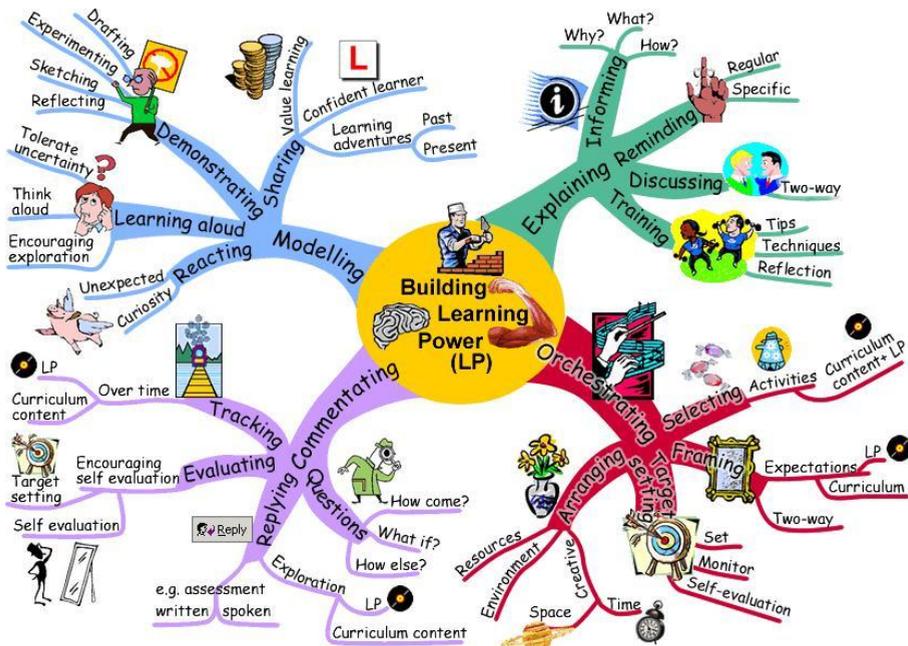
Jika fitrah mengarahkan manusia melakukan pencarian kebenaran, maka pemancar keinginan kepada kebaikan, kebenaran, keadilan, kesucian, dan kasih sayang dipandu oleh hati nurani. Hati nurani (*dhamir, geweten, a conscience*) adalah bentuk nyata dari kesadaran moral dalam kehidupan praktis manusia. Al-Qur'an menyebut hati nurani dengan suatu kesadaran moral manusia (*al-nafs al-laumamah*) seperti dalam ayat, 'Aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesal' (75:2). Penyebutan *al-nafs al-lawwamah* sebagai obyek sumpah oleh al-Qur'an menunjukkan kesangat-pentingan arti kata ini bagi manusia. Sebab kesadaran moral adalah aspek asasi bagi kehidupan manusia dan kemanusiaannya. Ia mengenai seluruh jiwa dan menyangkut kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, *al-nafs al-lawwamah* tidak hanya sekedar kesadaran moral yang dengannya mengerti dan menghukumi baik dan buruk dan menyadari kedudukan, hak dan kewajiban, melainkan —seperti dinyatakan Yusuf Ali— juga bisa dibandingkan dengan dan dianggap sebagai "hati nurani", yakni potensi batin manusia yang mencegah, menghentikan, dan menyesali perbuatannya yang bersifat dosa dan immoral. Ibarat pedang bermata dua, fitrah merupakan esensi yang membentuk manusia dan secara esensial membedakannya dengan makhluk lain. Dan dengan memenuhi (tuntutan) hati nurani seseorang berada dalam fitrahnya dan menjadi manusia sejati. Namun, secara fungsional yang membuat manusia berkedudukan lebih tinggi dari makhluk lain adalah karena memiliki kemampuan mengantisipasi dan memformat fenomena yang ada melalui fitrahnya dan kerangka nilai yang diserapnya untuk menciptakan kebudayaan. Karena itu, kemanusiaan manusia atau supremasi manusia ditentukan sejauhmana ia kerja, amal shaleh dengan mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki untuk menciptakan kebudayaan yang berkualitas (*ahsanu 'amalan*), bukan karena status formalnya sebagai *khalfatu Allah fil al-ardh*.

Jabatan sebagai khalifah memang tinggi dan mulia. Akan tetapi, ketinggian dan kemuliaan manusia bukan karena jabatan formalnya, melainkan fungsi dan kontribusinya bagi penciptaan kebudayaan. Inilah yang dimaksud bahwa peran-peran nyata khalifah berada di tataran eksistensial, di latar sejarah yang dibuktikan dengan kerja-kerja kemanusiaan —dalam bentuknya— berupa kebudayaan. Kalau konsep kebudayaan ini dihubungkan dengan misi kerasulan Muhammad saw. yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia serta ide moral Islam *rahmatan li al-'alamin*, maka ada ekuivalen antara orang yang berakhlak dengan orang yang berbudaya. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang mampu mendayagunakan potensi yang dimiliki dan memiliki

²⁴ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Al Husna Dzikra, 1995, h. 48

komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan sehingga mampu melahirkan kebudayaan. Sebaliknya, orang yang berbudaya adalah orang yang berakhlak mulia, minimal saat menciptakan kebudayaan. Berkaitan dengan hubungan antara akhlak dan kebudayaan ini dapat dikemukakan sabda Nabi saw "Barangsiapa berkreasi, berkarya baik niscaya akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, barangsiapa berbuat onar dan kerusakan niscaya akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya " (HR Ibn Majah).

Berdasarkan uraian di atas, fitrah pada dasarnya bersifat universal dan dimiliki oleh semua manusia. Segala yang dilakukan manusia pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi tuntutan fitrahnya. Di satu sisi tuntutan manusia sebagai hamba Allah yang senantiasa terikat oleh sesuatu yang transenden yang menguasai dirinya, Allah swt. Ini yang disebut *fitrah munazzalah* atau *din* (agama). Di sisi lain, dalam kapasitas manusia sebagai khalifah Allah, fitrah dalam pengertiannya yang luas senantiasa terkait dengan pemihakan dan upaya-upaya menuju pencapaian nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, kesucian, dan kasih sayang sesama. Jadi, keterikatan manusia pada hal-hal yang bersifat universal (nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan) itulah yang mengokohkan fungsi kemanusiaannya di muka bumi baik sebagai hamba maupun khalifah Allah.



BAB III:

LANDASAN-LANDASAN PENDIDIKAN

A. Landasan Normatif

Pendidikan mempunyai *content* yang mulia, sebagai suprastruktur ilmu maka pendidikan pun merupakan suatu fasilitas yang mulia. Oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan mempunyai kedudukan sesuai dengan martabatnya. Pendidikan tidak bisa dipertahankan apa adanya, tetapi untuk dikembangkan mencapai derajat kemuliaannya, sehingga pendidikan secara maksimal dapat mengembangkan dan mengakselerasi intelektualitas dan spiritualitas manusia didiknya.

Pendidikan sebagai media pembelajaran manusia untuk mengangkat derajatnya (Almujadalah:11) dan mengerjakan sesuatu dengan memiliki ilmunya (Al'isra': 36).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ^ط
وَإِذَا قِيلَ ائْتَشُرُوا فَأَنْتَشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ^ج
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٦﴾

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Mencari ilmu dikatakan jihad seperti pendapat Mu'adz bin Jabal berkata, "Pelajarilah ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah tanda takut kepada Allah, mencarinya ibadah, mengingat-ingatnya tasbih, pembahasannya jihad, mengajarkannya bagi yang belum tahu shadaqah, menyumbangkannya bagi yang berhak adalah taqarrub kepada Allah." Ilmu dalam agama Islam sangat tinggi kedudukannya, oleh karena itu kaidah keilmuan membutuhkan suatu sistem yang memberi kontribusi pada peradaban dimana manusia hidup.

"Janganlah kalian mengerjakan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kesemuanya akan ditanya tentangnya". (Q.S. Al'isra': 36).

"Mencari ilmu (Ngaji) adalah wajib bagi setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan (memberikan ilmu) kepada yang bukan ahlinya, bagaikan mengalungi babi dengan mutiara, berlian, dan emas". (H.R. Ibnu Majah).

Mencari ilmu dikatakan jihad seperti pendapat Mu'adz bin Jabal berkata, "Pelajarilah ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah tanda takut kepada Allah, mencarinya ibadah, mengingat-ingatnya tasbih, pembahasannya jihad, mengajarkannya bagi yang belum tahu shadaqah, menyumbangannya bagi yang berhak adalah taqarrub kepada Allah." Ilmu dalam agama Islam sangat tinggi kedudukannya, oleh karena itu kaidah keilmuan membutuhkan suatu sistem yang memberi kontribusi pada peradaban dimana manusia hidup.

B. Landasan Yuridis

Menurut Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa:

".....untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial,..."

Perubahan ke-4 UUD 1945

Pasal 31 ayat 1:

"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

Pasal 31 ayat 3 :

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

Pasal 31 ayat 4:

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Pasal 31 ayat 5

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia."

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Dalam falsafah kehidupan bernegara dan berbangsa pada Sila ke satu Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa; Sila ke dua Pancasila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Sila ke lima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh Bangsa Indonesia. Maka pendidikan mempunyai korelasi signifikan dengan falsafah Bangsa dan Negara Indonesia tersebut. Eksistensi pendidikan terutama adalah mengembangkan manusia didiknya untuk mencapai "Ketuhanan Yang Maha Esa"-nya dan mencapai "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab"-nya. Namun sebagai institusi yang dimiliki masyarakat merupakan bagian juga untuk menerima "Keadilan sosial bagi seluruh Bangsa Indonesia".

Pendidikan senantiasa harus dibangun untuk mencapai martabatnya yang senantiasa berkembang, karena eksistensi pendidikan Islam dalam menjawab tantangan zaman dan memberi kontribusi pada setiap perkembangan peradaban manusia. Sudah bukan saatnya lagi pendidikan terlambat menjawab tantangan zaman, dan tertinggal dalam pengembangan peradaban manusianya di era globalisasi dewasa ini.

Upaya untuk membangun manusia seutuhnya sudah menjadi tekad pemerintah. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Terdapat tiga misi pembangunan nasional, yaitu (1) mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkannya, bangsa kita harus menjadi bangsa yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global.

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Depdiknas selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Manusia seperti apa yang ingin dibangun? Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi

kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kementerian Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut.

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut,
Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan:
INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF
(Insan Kamil / Insan Paripurna)

Tabel 3.1.

Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif		Makna Insan Indonesia Kompetitif	
Cerdas spiritual	1. Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.		
Cerdas emosional & sosial	1. Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. 2. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang: <ul style="list-style-type: none"> - membina dan memupuk hubungan timbal balik; - demokratis; - empatik dan simpatik; - menjunjung tinggi hak asasi manusia; - ceria dan percaya diri; - menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta - berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 		
Cerdas intelektual	1. Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif.		
Cerdas kinestetis	1. Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. 2. Aktualisasi insan adiraga.		

Visi Depdiknas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat

berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Landasan Depdiknas disusun dengan mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke-4 Pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut, namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi.

Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat

demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

C. Landasan Filosofis

Alangkah pentingnya kita berteori dalam praktek di lapangan pendidikan karena pendidikan dalam praktek harus dipertanggungjawabkan. Tanpa teori dalam arti seperangkat alasan dan rasional yang konsisten dan saling berhubungan maka tindakan-tindakan dalam pendidikan hanya didasarkan atas alasan-alasan yang kebetulan, seketika dan aji mumpung. Hal itu tidak boleh terjadi karena setiap tindakan pendidikan bertujuan menunaikan nilai yang terbaik bagi peserta didik dan pendidik.

Pengajaran yang baik sebagai bagian dari pendidikan selain memerlukan proses dan alasan rasional serta intelektual juga terjalin oleh alasan yang bersifat moral. Sebabnya ialah karena unsur manusia yang dididik dan memerlukan pendidikan adalah makhluk manusia yang harus menghayati nilai-nilai agar mampu mendalami nilai-nilai dan menata perilaku serta pribadi sesuai dengan harkat nilai-nilai yang dihayati itu.

Praktek tanpa teori adalah untuk orang idiot dan gila, sedangkan teori praktek hanya untuk orang-orang jenius". Ini berarti bahwa sebaiknya pendidikan tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab secara rasional, sosial dan moral. Sebaliknya apabila pendidikan dalam praktek dipaksakan tanpa teori dan alasan yang memadai maka hasilnya adalah bahwa semua pendidik dan peserta didik akan merugi. Kita merugi karena tidak mampu bertanggung jawab atas esensi perbutan masing-masing dan bersama-sama dalam pengamalan Pancasila.

Pancasila yang baik dan memadai, konsisten antara pengamalan (lahiriah) dan penghayatan (psikologis) dan penataan nilai secara internal. Dalam hal ini kita bukan menyaksikan kegiatan (praktek) pendidikan tanpa dasar teorinya tetapi suatu praktek pendidikan nasional tanpa suatu teori yang baik.

Ilmu pendidikan khususnya pedagogik (teoritis) adalah ilmu yang menyusun teori dan konsep yang praktis serta positif sebab setiap pendidik tidak boleh ragu-ragu atau menyerah kepada keragu-raguan prinsipil. Hal ini serupa dengan ilmu praktis lainnya yang mikro dan makro. Seperti kedokteran, ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu pedagogik (dan telaah pendidikan mikro) serta pedagogik praktis dan andragogi (dan telaah

pendidikan makro) bukanlah filsafat pendidikan yang terbatas menggunakan atau menerapkan telaah aliran filsafat normative yang bersumber dari filsafat tertentu. Yang lebih diperlukan ialah penerapan metode filsafat yang radikal dalam menelaah hakikat peserta didik sebagai manusia seutuhnya.

Implikasinya jelas bahwa batang tubuh (*body of knowledge*) ilmu pendidikan haruslah sekurang-kurangnya secara mikro mencakup :

1. Relasi sesama manusia sebagai pendidik dengan terdidik (*person to person relationship*)
2. Pentingnya ilmu pendidikan memepergunakan metode fenomenologi secara kualitatif.
3. Orang dewasa yang berpran sebagai pendidik (*educator*)
4. Keberadaan anak manusia sebagai terdidik (*learner, student*)
5. Tujuan pendidikan (*educational aims and objectives*)
6. Tindakan dan proses pendidikan (*educative process*), dan
7. Lingkungan dan lembaga pendidikan (*educational institution*)

Itulah lingkup pendidikan yang mikroskopis sebagai hasil telaah ilmu murni ilmu pendidikan dalam arti pedagogik (teoritis dan sistematis). Mengingat pendidikan juga dilakukan dalam arti luas dan makroskopis di berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal, tentu petugas tenaga pendidik di lapangan memerlukan masukan yang berlaku umum berupa rencana pelajaran atau konsep program kurikulum untuk lembaga yang sejenis. Oleh karena itu selain pedagogik praktis yang menelaah ragam pendidikan diberbagai lingkungan dan lembaga formal, informal dan non-formal (pendidikan luar sekolah dalam arti terbatas, dengan begitu, batang tubuh diatas tadi diperlukn lingkupnnya sehingga meliputi:

- a. Konteks sosial budaya (*socio cultural contexs and education*)
- b. Filsafat pendidikan (preskriptif) dan sejarah pendidikan (deskriptif)
- c. Teori, pengembangan dan pembinaan kurikulum, serta cabang ilmu pendidikan lainnya yang bersifat preskriptif.
- d. Berbagai studi empirik tentang fenomena pendidikan
- e. Berbagai studi pendidikan aplikatif (terapan) khususnya mengenai pengajaran termasuk pengembangan *specific content pedagogy*.

Telaah lingkup yang makro dan meso dari pendidikan, merupakan bidang telaah utama yang memperbedakan antara objek formal dari pedagogik dari ilmu pendidikan lainnya. Karena pedagogik tidak langsung membicarakan perbedaan antara pendidikan informal dalam keluarga dan dalam kelompok kecil lainnya., dengan pendidikan formal (dan non formal) dalam masyarakat dan negara, maka hal itu menjadi tugas dari andragogi dan cabang-cabang lain yang relevan dari ilmu pendidikan. Itu sebabnya dalam pedagogik terdapat pembicaraan tentang factor pendidikan yang meliputi : (a) tujuan

hidup, (b) landasan falsafah dan yuridis pendidikan, (c) pengelolaan pendidikan, (d) teori dan pengembangan kurikulum, (e) pengajaran dalam arti pembelajaran (*instruction*) yaitu pelaksanaan kurikulum dalam arti luas di lembaga formal dan non formal terkait.

Bidang masalah yang ditelaah oleh teori pendidikan sebagai ilmu ialah sekitar manusia dan sesamanya yang memiliki kesamaan dan keragaman di dalam fenomena pendidikan. Yang menjadi inti ilmu pendidikan teoritis ialah Pedagogik sebagai ilmu mendidik yaitu mengenai tealah (atau studi) pendidikan anak oleh orang dewasa. Pedagogik teoritis selalu bersifat sistematis karena harus lengkap problematik dan pembahasannya. Tetapi pendidikan (atau pedagogik) diperlukan juga oleh semua orang termasuk orang dewasa dan lanjut usia. Karena itu selain cabang pedagogik teoritis sistematis juga terdapat cabang-cabang pedagogik praktis, di antaranya pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal dalam keluarga, andragogi (pendidikan orang dewasa) dan geragogi (pendidikan orang lansia), serta pendidikan non-formal sebagai pelengkap pendidikan jenjang sekolah dan pendidikan orang dewasa.

Di dalam menelaah manusia yang berinteraksi di dalam fenomena pendidikan, ilmu pendidikan khususnya pedagogik merupakan satu-satunya bidang ilmu yang menelaah interaksi itu secara utuh yang bersifat antar dan inter-pribadi. Untunglah ada ilmu lain yang melakukan telaah atas perilaku manusia sebagai individu. Begitu juga halnya atas telaah interaksi sosial, telaah perilaku kelompok dalam masyarakat, telaah nilai dan norma sebagai isi kebudayaan, dan seterusnya. Ilmu-ilmu yang melakukan telaah demikian dijadikan berfungsi sebagai ilmu bantu bagi ilmu pendidikan. Diantara ilmu bantu yang penting bagi pedagogik dan androgogi ialah : biologi, psikologi, sosiologi, antropologi budaya, sejarah dan fenomenologi (filsafah).

Dasar-dasar filosofi keilmuan terkait dalam arti dasar ontologis, dasar epistemologis, dan aksiologis, dan dasar antropologis ilmu pendidikan.²⁵

1. Dasar Ontologis Ilmu Pendidikan

Pertama-tama pada latar filsafat diperlukan dasar ontologis dari ilmu pendidikan. Adapun aspek realitas yang dijangkau teori dan ilmu pendidikan melalui pengalaman pancaindra ialah dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek materil ilmu pendidikan ialah manusia seutuhnya, manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya, yaitu manusia yang berakhlak mulia dalam situasi pendidikan atau diharapkan melampaui manusia sebagai makhluk sosial mengingat sebagai warga masyarakat ia mempunyai

²⁵ Diakses dari <http://guru-beasiswa.blogspot.com/2007/12/terdapat-cukup-alasan-yang-baik-untuk.html>.

ciri warga yang baik (*good citizenship* atau kewarganegaraan yang sebaik-baiknya). Agar pendidikan dalam praktek terbebas dari keragu-raguan, maka objek formal ilmu pendidikan dibatasi pada manusia seutuhnya di dalam fenomena atau situasi pendidikan. Didalam situasi sosial manusia itu sering berperilaku tidak utuh, hanya menjadi makhluk berperilaku individual dan/atau makhluk sosial yang berperilaku kolektif. Hal itu boleh-boleh saja dan dapat diterima terbatas pada ruang lingkup pendidikan makro yang berskala besar mengingat adanya konteks sosio-budaya yang terstruktur oleh sistem nilai tertentu. Akan tetapi pada latar mikro, sistem nilai harus terwujud dalam hubungan inter dan antar pribadi yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terlaksananya mendidik dan mengajar, yaitu kegiatan pendidikan yang berskala mikro. Hal itu terjadi mengingat pihak pendidik yang berkepribadiaan sendiri secara utuh memperlakukan peserta didiknya secara terhormat sebagai pribadi pula, terlepas dari faktor umum, jenis kelamin ataupun pembawaanya. Jika pendidik tidak bersikap afektif utuh akan terjadi mata rantai yang hilang (*the missing link*) atas factor hubungan serta didik-pendidik atau antara siswa-guru. Dengan egitu pendidikan hanya akan terjadi secara kuantitatif sekalipun bersifat optimal, misalnya hasil THB summatif, NEM atau pemerataan pendidikan yang kurang mengajarkan demokrasi jadi kurang berdemokrasi. Sedangkan kualitas manusianya belum tentu utuh.

2. Dasar Epistemologis Ilmu Pendidikan

Dasar epistemologis diperlukan oleh pendidikan atau pakar ilmu pendidikan demi mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung jawab. Sekalipun pengumpulan data di lapangan sebagaimana dapat dilakukan oleh tenaga pemula namun telaah atas objek formil ilmu pendidikan memerlukan pendekatan fenomenologis yang akan menjalin studi empirik dengan studi kualitatif-fenomenologis. Pendekatan fenomenologis itu bersifat kualitatif, artinya melibatkan pribadi dan diri peneliti sebagai instrumen pengumpul data secara pasca positivisme. Karena itu penelaahan dan pengumpulan data di arahkan oleh pendidik atau ilmuwan sebagai pakar yang jujur dan menyatu dengan objeknya. Karena penelitian tertuju tidak hanya pemahaman dan pengertian (*verstehen*, Bodgan & Biklen, 1982) melainkan unuk mencapai kearifan (kebijaksanaan atau wisdom) tentang fenomena pendidikan maka validitas internal harus dijaga betul dalam berbagai bentuk penelitian dan penyelidikan seperti penelitian kuasi eksperimental, penelitian tindakan, penelitian etnografis dan penelitian *ex post facto*. Inti dasar epistemologis ini adalah agar dapat ditentukan bahwa dalam menjelaskan objek formalnya, telaah ilmu pendidikan tidak hanya mengembangkan ilmu terapan melainkan menuju kepada telaah teori dan ilmu pendidikan sebagai ilmu otonom yang mempunyai objek formil sendiri atau problematika sendiri sekalipun tidak dapat hanya menggunakan

pendekatan kuantitatif atau pun eksperimental. Dengan demikian uji kebenaran pengetahuan sangat diperlukan secara korespondensi, secara koheren dan sekaligus secara praktis dan atau pragmatis.

3. Dasar Aksiologis Ilmu Pendidikan

Kemanfaatan teori pendidikan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Oleh karena itu nilai ilmu pendidikan tidak hanya bersifat intrinsik sebagai ilmu seperti seni untuk seni, melainkan juga nilai ekstrinsik dan ilmu untuk menelaah dasar-dasar kemungkinan bertindak dalam praktek melalui kontrol terhadap pengaruh yang negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif dalam pendidikan. Dengan demikian ilmu pendidikan tidak bebas nilai mengingat hanya terdapat batas yang sangat tipis antar pekerjaan ilmu pendidikan dan tugas pendidik sebagai pedagogik. Dalam hal ini relevan sekali untuk memperhatikan pendidikan sebagai bidang yang sarat nilai seperti dijelaskan oleh Phenix (1966). Itu sebabnya pendidikan memerlukan teknologi pula tetapi pendidikan bukanlah bagian dari iptek. Namun harus diakui bahwa ilmu pendidikan belum jauh pertumbuhannya dibandingkan dengan kebanyakan ilmu sosial dan ilmu perilaku. Lebih-lebih di Indonesia.

Implikasinya ialah bahwa ilmu pendidikan lebih dekat kepada ilmu perilaku kepada ilmu-ilmu sosial, dan harus menolak pendirian lain bahwa di dalam kesatuan ilmu-ilmu terdapat unifikasi satu-satunya metode ilmiah (Kalr Perason,1990).

4. Dasar Antropologis Ilmu Pendidikan

Pendidikan yang intinya mendidik dan mengajar ialah pertemuan antara pendidik sebagai subjek dan peserta didik sebagai subjek pula di mana terjadi pemberian bantuan kepada pihak yang belakangan dalam upayanya belajar mencapai kemandirian dalam batas-batas yang diberikan oleh dunia di sekitarnya. Atas dasar pandangan filsafah yang bersifat dialogis ini maka 3 dasar antropologis berlaku universal tidak hanya (1) sosialitas dan (2) individualitas, melainkan juga (3) moralitas. Kiranya khusus untuk Indonesia apabila dunia pendidikan nasional didasarkan atas kebudayaan nasional yang menjadi konteks dari sistem pengajaran nasional di sekolah, tentu akan diperlukan juga dasar antropologis pelengkap yaitu (4) religiusitas, yaitu pendidik dalam situasi pendidikan sekurang-kurangnya secara mikro berhamba kepada kepentingan terdidik sebagai bagian dari pengabdian lebih besar kepada Tuhan Yang Maha Esa.

D. Landasan Sosiologis

Sebagian besar masyarakat adalah buah hasil dari pendidikan. Bahkan, para pejabat teras yang sekarang pun tak luput dari pendidikan. Seharusnya, masyarakat memandang pendidikan sebagai media yang telah mengkader masyarakat. Pendidikan membangun ke arah masyarakat yang sadar akan dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (agamis), beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Dengan pandangan demikian, pendidik dipandang sebagai makhluk yang berharkat, bermartabat dan mempunyai kesejahteraan yang memadai. Sehingga, program-program pendidikan harus berorientasi pada kesejahteraan pendidik, dan harus dilaksanakan dengan merujuk pada pandangan ini secara konsisten. Artinya, semua program pendidikan harus diorientasikan pada terbentuknya masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, yang berkembang segala potensinya, dan bertanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negaranya dalam konteks pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Madrasah merupakan salah satu pranata sosial yang penting dalam pendidikan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, sehingga ia harus diberdayakan sejajar dengan pranata hukum, pranata sosial-budaya, ekonomi dan politik. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pranata pendidikan masih terlalu lemah sehingga kurang mampu membangun masyarakat belajar. Akibatnya, persoalan kemasyarakatan yang muncul, seperti disintegrasi sosial, konflik antarlembaga, kekerasan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pola hidup konsumtif dan hedonistik tidak dapat segera ditangani secara tuntas. Oleh sebab itu, untuk saat ini dan masa yang akan datang perlu dibangun dan dikembangkan sistem pendidikan daerah atas dasar kesadaran kolektif masyarakat dalam rangka ikut memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Di samping itu, ada persoalan yang terkait dengan masalah ketimpangan struktur kewenangan pengelolaan.

Pengembangan pendidikan adalah proses sepanjang hayat yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas proses produksi dan mempertahankan keseimbangan ekonomi.

Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung di dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak bisa dilepaskan dari upaya dan proses saling pengaruh-mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi seperti ini, apa yang dinamakan pendidikan dan peserta didik adalah menunjuk pada dua istilah yang dilihat dari kedudukan dalam interaksi sosial. Artinya siapa yang bertanggung jawab atas perilaku, dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses pengubahannya. Karena itu, di dalam proses pendidikan seringkali sukar

dikenali siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen, karena keduanya dapat mengubah fungsinya.

Selanjutnya, pendidikan juga tidak akan dan tidak pernah terjadi di dalam kehampaan sosial (*social vacuum*). Artinya, pendidikan tidak akan terjadi tanpa ada interaksi antar individu. Namun, oleh karena pendidikan membawa misi normatif maka keluasaan interaksi itu dibatasi oleh tata nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sosiologi sebagai disiplin ilmu memiliki kekuatan dalam menelaah dan menganalisis peristiwa pendidikan secara luas. Karena itu penting bagi pendidik untuk membekali diri pada kajian sosiologi.

Lembaga pendidikan tidak pernah berada di dalam kehampaan sosial (*social vacuum*). Lembaga pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Jika lembaga pendidikan bergerak secara dinamik, maka masyarakat akan berkembang secara dinamik dan begitu pula sebaliknya. Itulah sebabnya ketelitian dalam memahami latar sosial, proses perubahan sosial dan dampak ikutannya akan menentukan keberhasilan pendidikan, dan begitu pula sebaliknya.

Pendekatan sosiologi merupakan suatu kajian yang berupaya menelaah dan menganalisis peristiwa-peristiwa tersebut dengan cara mengorganisir faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan dan kelebagaannya secara sistematis. Tekanan kajiannya terutama terletak pada bentuk dan fungsi lembaga di masyarakat dalam hubungannya dengan lembaga pendidikan.

Hasil telaah sosiologi biasanya bersifat diskriptif, yakni gambaran secara rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Dinamika interaksi sosial baik di dalam maupun di luar sekolah, struktur kelembagaan sekolah sebagai sistem sosial, kekuatan-kekuatan kelompok di masyarakat, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pelaksanaan pendidikan, fungsi pendidikan di masyarakat, dan masalah-masalah sekolah sebagai agen inovasi sosial, itu semua terjadi bidang-bidang kajian sosiologi.

Dewasa ini masyarakat mengalami perubahan sangat cepat. Perubahan itu dapat diamati dari segi pemanfaatan teknologi, perubahan sistem nilai dan norma yang dianut, sifat dan dinamika kelompok di masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Perubahan itu tidak selalu mencerminkan keseragaman baik yang berkenaan dengan bentuk, isi atau karakteristik maupun dampak yang ditimbulkannya. Ini memberikan implikasi bahwa lembaga pendidikan dituntut untuk selalu tanggap terhadap perubahan sosial tersebut, dan memberikan implikasi pula bahwa setiap kelompok, masyarakat ataupun bangsa tidak akan memiliki karakteristik dan tujuan pendidikan yang sama.

Dilihat dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh, fungsi utama pendidikan adalah sebagai alat pemelihara (pengembang) kebudayaan. Kemampuan seseorang untuk belajar, mengorganisir sesuatu dalam bentuk simbolik, mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain, dan berperilaku yang dihasilkan dari belajar ataupun berdasarkan pengetahuan merupakan

sumber fenomena kebudayaan. Beberapa kebudayaan dan peradaban yang didasari oleh kebudayaan tentu bergantung pada kemampuan peradaban untuk mengartikulasikan dan mentransmisikan belajarnya secara semi-otomatis, sistem kognitif. Ini merepresentasikan pengetahuan yang terakumulasi di dalam setiap penelitian dan menjadi materi pembelajaran di setiap pendidikan. Itulah yang dinamakan dengan tanggung jawab sekolah dalam mentransmisikan warisan budaya.

Kebudayaan sudah barang tentu, mencakup lebih dari pengetahuan yang terakumulasi di dalam setiap lapangan penelitian. Ia meliputi tata nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi, walaupun sering terjadi modifikasi di seluruh masyarakat.

Pendidikan mentransmisikan kebudayaan kepada generasi masa depan, dan dalam proses ini juga mengharapkan adanya tatanan kehidupan masa depan yang lebih baik. Transmisi dan akumulasi kebudayaan dari generasi ke generasi itu merupakan karakteristik manusia sejak permulaan sejarah. Peranan pendidikan formal dalam proses ini hanya menjadi bagian kecil saja. Sebagaimana dikemukakan oleh Burton Clark bahwa sistem pendidikan jaman dahulu tidak lebih dari pada seorang wanita mengajar anak-anaknya untuk berjalan, berbicara, dan bekerja bersama-sama. Pada jaman batu tidak ada sekolah yang digunakan untuk mengajar dan melatih anak-anak; mereka belajar dengan cara mengamati apa-apa yang dilakukan orang dewasa. Namun karena pengetahuan semakin berkembang dan kelompok dimana seseorang itu tinggal menjadi semakin lebih kompleks, perkembangan fasilitas yang terpesialisasi mulai mengambil peranan keluarga dalam mentransmisikan kebudayaan.

Dalam sejarah masa lampau terutama pada peradaban Yunani dan Romawi, pendidikan formal hanya dimanfaatkan oleh kalangan terbatas, yakni golongan elit yang berkuasa dan anggota kelompok agama. Namun dengan adanya revolusi industri, selain menghasilkan inovasi secara radikal ia juga mengubah struktur sosial masyarakat. Fungsi utama keluarga tidak lagi menjadi unit produksi, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat petani primitif. Akibatnya banyak anak-anak muda bekerja di pabrik dan di kantor-kantor. Perubahan ini juga menyebabkan generasi muda semakin menuntut agar memperoleh peluang lebih banyak dalam dunia pendidikan.

Berkaitan dengan hal itu sekolah menjadi suatu kebutuhan, karena keluarga dan masyarakat menjadi kurang efektif dan kurang mampu dalam melatih anak-anak menjadi dewasa melalui hubungan informal. Kelompok agen kebudayaan-guru dan orang awam semakin berkembang. Perubahan jenis-jenis pengetahuan dan pekerjaan menyebabkan anak-anak masuk ke ruang sekolah, dan memberikan peranan yang lebih luas dan lebih dalam untuk melangsungkan dan mentransmisikan kebudayaan.

BAB IV**KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA****A. Sejarah Kebijakan Pendidikan**

Analisis kebijaksanaan pendidikan secara empiris sebagai berikut : ²⁶

1. Kebijakan Pendidikan dimasa lalu**a. Masa Pra-Orde Baru**

Tilaar (2000) menjelaskan bahwa pendidikan dimasa ini diarahkan kepada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Dengan demikian pendidikan bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, bukan untuk kebutuhan pasar melainkan untuk orientasi politik. Indrokriner pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi diarahkan untuk pengembangan sikap militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan di suasana perang dingin.²⁷

b. Masa Orde baru

Tilaar (2000) menjelaskan pendidikan di masa ini diarahkan kepada uniformitas atau keseragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pakauan seragam, wadah-wadah tunggal dari organisasi sosial masyarakat, semuanya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang homogin. Tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat yang lahir ialah disiplin semu yang melahirkan masyarakat baru. Pertumbuhan ekonomi yang dijadikan panglima dengan tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik serta ketergantungan akan utang luar negeri melahirkan sistem pendidikan yang tidak peka terhadap daya saing, yang tidak produktif. Pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial oleh karena masyarakat tidak diikuti sertakan di dalam manajemennya. Pendidikan yang mengingkari kebhinekaan dengan toleransi yang semakin berkurang serta semakin dipertajam dengan bentuk primordialisme. Praksis pendidikan tidak diarahkan lagi pada peningkatan kualitas tapi target kuantitas. Akuntabilitas pendidikan sangat rendah walupun diterapkan prinsip *'link and match'*

c. Masa krisis : Masa refleksi kegagalan Pendidikan Nasional

Tilaar (2000) menjelaskan bahwa pada masa krisis membawa masyarakat dan bangsa kepada keterpurukan dari krisis moneter membuat menjadi krisis

²⁶ Ace Suryadi, dan H.ZA.R Tilaar, 1994, *Analisis Kebijakan Pendidikan* , Bandung : PT Remaja Rosdakarya

²⁷ Tilaar, H. A. R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004. h. 12

ekonomi dan berakhir pada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan telah menjadi warna yang dominan di dalam kebudayaan kita dewasa ini. Oleh karena pendidikan merupakan proses pembudayaan maka krisis kebudayaan yang kita alami merupakan refleksi dari krisis pendidikan nasional.

Jadi dapatlah disimpulkan atas evaluasi dan analisis pendidikan dimasa lampau, bahwa pada masa lalu pendidikan hanya untuk doktrin militer, pendidikan hanya diarahkan untuk keseragaman untuk menciptakan masyarakat yang homogen, pendidikan yang mengingkari kebhinekaan. Dari hal tersebut maka pendidikan ternyata tidak terlepas dari politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan pada umumnya

2. Kebijakan Pendidikan Sekarang (Era Otonomi)

Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah dan sejalan dengan itu UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Merupakan konsekuensi dari keinginan era reformasi untuk menghidupkan kehidupan demokrasi. Maka Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah :

- (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (*school based management*) dimana sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan;
- (2) Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi komunitas (*community based education*) di mana terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai *community learning center*; dan
- (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning paradigm* yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan.
- (4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan *Broad Base Education System (BBE)* yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera. Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan *life skills* yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat.

3. Kebijakan Pendidikan di Masa Datang

Pendidikan untuk masa dulu, sekarang dan yang akan datang perkembangan pendidikan masih mengacu pada:

- a) Popularisasi pendidikan

- b) Sistematisasi pendidikan
- c) Profilerasi pendidikan
- d) Politisasi pendidikan.

Empat paradigma tersebut merupakan dasar dari pengembangan pendidikan nasional. Oleh karena itu setelah kita analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan dimasa dulu, dan masa sekarang maka kita dapat berpikir, dan berekayasa pengembangan pendidikan dimasa yang akan datang dengan paradigma baru.

Dengan berdasar pada keempat indikator sistem pendidikan nasional yaitu popularisasi, sistematisasi, profileralisasi dan politisasi pendidikan nasional, Usulan program pengembangan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Tilaar (2000) sebagai berikut :²⁸

1. Mengembangkan dan mewujudkan pendidikan berkualitas menyelenggarakan pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang bermutu terciptanya SDM pendidikan yang profesional dengan penghargaan yang wajar
2. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional secara bertahap, mulai tingkat provinsi dengan sekaligus mempersiapkan sarana, SDM, dan dana yang memadai pada tingkat kabupaten
3. Perampingan birokrasi pendidikan dengan restrukturisasi departemen pusat agar lebih efisien
4. Menghapus berbagai peraturan perundangan yang menghalangi inovasi dan ekseperimen. Melaksanakan otonomi lembaga pendidikan
5. Menumbuhkan partisipasi masyarakat, terutama di daerah dalam kesadarannya terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk membangun masyarakat Indonesia baru. Suatu wadah masyarakat diperlukan untuk menampung keterlibatan masyarakat tersebut.
6. Menjalni kerjasama yang erat antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha depolitisasi pendidikan nasional. Komitmen politik dari masyarakat dan pemerintah untuk membebaskan pendidikan sebagai alat penguasa meningkatkan harkat profesi pendidikan dengan meningkatkan mutu pendidikan, syarat-syarat serta pemanfaatan tenaga profesional, disertai dengan meningkatkan renumerasi profesi pendidikan yang memadai secara bertahap.

B. Sistem Pendidikan Nasional

Pembangunan pendidikan ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi

²⁸ HAR Tilaar, 2000, *Paradigma baru Pendidikan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, h.77-79

kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu:²⁹

1. Afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis;
2. Kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.³⁰ Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “ untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

²⁹ Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2003, h. 28

³⁰Tilaar, H. A. R. (1994). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Penerbit, Rosdakarya. P 23

Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi. Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif. Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pendidikan telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*input values*), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (*process values*) serta nilai-nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan antara lain Pemerintah, DPR, pegawai, donatur, dan masyarakat.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006, tentang penuntasan wajib belajar dan pemberantasan buta aksara, sangat berharap dalam implementasinya nanti mempunyai dampak yang bisa membawa perubahan dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebab berhasil tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya terletak pada bagaimana pelaksanaannya dilapangan.

Penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan. Di samping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, Pemerintah juga melakukan perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler, melalui SMA Terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM-SMA. Oleh karena SMA cenderung semakin meluas jauh di atas SMK, maka Pemerintah lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Pemerintah akan memperluas akses pendidikan tinggi untuk menjawab meningkatnya partisipasi sekolah menengah. Meningkatnya angka partisipasi PT tersebut akan diiringi oleh kebijakan yang mengarah pada pencapaian daya saing lulusan PT secara global. Secara bersamaan, dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu upaya untuk pemenuhan tersebut diantaranya melalui peningkatan jumlah keahlian bidang vokasi melalui institusi politeknik. Selain itu, dikembangkan program *community college* yang merupakan upaya harmonisasi antara pendidikan kejuruan di SMK, pendidikan nonformal berkelanjutan, dan pendidikan vokasi. Di samping itu, peningkatan APK PT dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pelayanan pendidikan yang memadai.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal negara, strategi pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi lebih diarahkan pada peran partisipasi swasta dalam mendirikan lembaga pendidikan tinggi baru. Namun, strategi perluasan akan dikaitkan dengan pencapaian mutu yang lebih baik dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global. Untuk itu, pemerintah akan terus membenahi peraturan dan perundang-undangan serta memperkuat kapasitas kelembagaan yang terkait dengan fungsi pengendalian dan penjaminan mutu.

Kebijakan perluasan pendidikan tinggi juga dilakukan searah dengan upaya membuka kesempatan bagi calon mahasiswa yang berasal dari penduduk di atas usia ideal pendidikan tinggi (>24 th) seperti karyawan, guru, tenaga spesialis industri, termasuk dalam pendidikan nongelar dan pendidikan profesi yang mengutamakan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja industri.

Perluasan akses pendidikan tinggi juga dilakukan melalui pengembangan kapasitas pembelajaran digital jarak jauh yang semakin luas dan efektif. Universitas Terbuka dan institusi sejenis lainnya ditugaskan untuk mengimplementasikan strategi ini, dengan memanfaatkan secara optimal TIK dalam proses pembelajaran, pengelolaan, dan akses informasi. Dalam kaitan

itu, Ditjen Pendidikan Tinggi memprioritaskan investasi infrastruktur TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada Universitas Terbuka dan perguruan tinggi lainnya serta Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan adalah sebagai berikut.

- a. Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan di SD/MI.
- b. Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang Dikdas baik pada sekolah umum maupun madrasah yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan *unit cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang Dikdas melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. Secara bertahap BOS akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan berdasarkan formula (*formula-based funding*) yang memperhitungkan siswa miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.
- c. Membentuk "SD-SMP Satu Atap" bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar dalam kebijakan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan guru SD untuk mengajar di SMP pada beberapa mata pelajaran yang relevan atau dengan meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat mengajar di SMP. Selain itu, dilakukan upaya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, baik ruang kelas maupun bangunan sekolah dengan membuat jaringan sekolah antara SMP dengan SD-SD yang ada di wilayah layanannya (*catchment areas*) serta menggabungkan SD-SD yang sudah tidak efisien lagi.
- d. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/ inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas akses bagi penduduk usia 13–15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui optimalisasi daya tampung dan pengembangan SMP Terbuka model maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif.

- e. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Perluasan kesempatan bagi penduduk buta aksara dilakukan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan, seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi lain yang dapat menjangkau lapisan masyarakat, serta PT.
- f. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah menengah (SM), khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain, juga mengembangkan SM terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.
- g. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.
- h. Memperluas daya tampung PT yang ada dengan memberikan fasilitasi pada perguruan tinggi untuk membuka program-program keahlian yang dibutuhkan masyarakat dan mengalihfungsikan atau menutup sementara secara fleksibel program-program yang lulusannya sudah jenuh.
- i. Memperluas kesempatan belajar pada perguruan tinggi yang lebih dititikberatkan pada program-program politeknik, pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang berorientasi lebih besar pada penerapan teknologi tepat guna untuk kebutuhan dunia kerja.
- j. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan formal yang sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal dan nonformal.
- k. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah terpencil dan daerah tertinggal, daerah konflik, perbatasan, dan lain-lain, serta mengimplementasikannya dalam berbagai program secara terpadu.
- l. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan

serta mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dan/atau mempertahankan anaknya untuk tetap bersekolah.

- m. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan pendidikan.
- n. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat TIK lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif selain menggunakan modul atau tutorial, terutama bagi daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang penduduk.

Kebijakan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut:

1. Pendanaan biaya operasi Wajar Dikdas 9 Tahun; adalah kebijakan yang menempati urutan prioritas tertinggi dalam lima tahun ke depan. Hal ini sudah menjadi komitmen nasional seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan kebijakan BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan “pendidikan dasar gratis”, yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar; merupakan kebijakan strategis berikutnya, yang akan dilakukan untuk mendukung perluasan akses dikdas dalam program Wajar Dikdas. Penyediaan sarana/prasarana SD/MI/ sederajat mencakup penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/ sederajat, kegiatan ini diarahkan untuk membangun unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran, yang diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan mutu Dikdas.
3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan; juga merupakan kebijakan strategis untuk mendukung program Wajar Dikdas 9 tahun. Rekrutmen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan kualifikasi guru profesional di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan penyebaran secara geografis, keahlian, dan kesetaraan gender. Pemerataan secara geografis mempertimbangkan pengaturan mekanisme penempatan dan redistribusi guru, sistem insentif guru di daerah terpencil, pengangkatan guru tidak tetap secara selektif, serta tenaga pendidikan lainnya seperti pamong belajar pada jalur nonformal.
4. Perluasan pendidikan Wajar pada jalur nonformal; termasuk kebijakan strategis untuk mendukung program Wajar. Kegiatan ini diharapkan dapat

meningkatkan angka partisipasi (APM/APK) Dikdas melalui program Paket A dan Paket B. Program ini sangat strategis untuk menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik, atau anak-anak yang terpaksa bekerja.

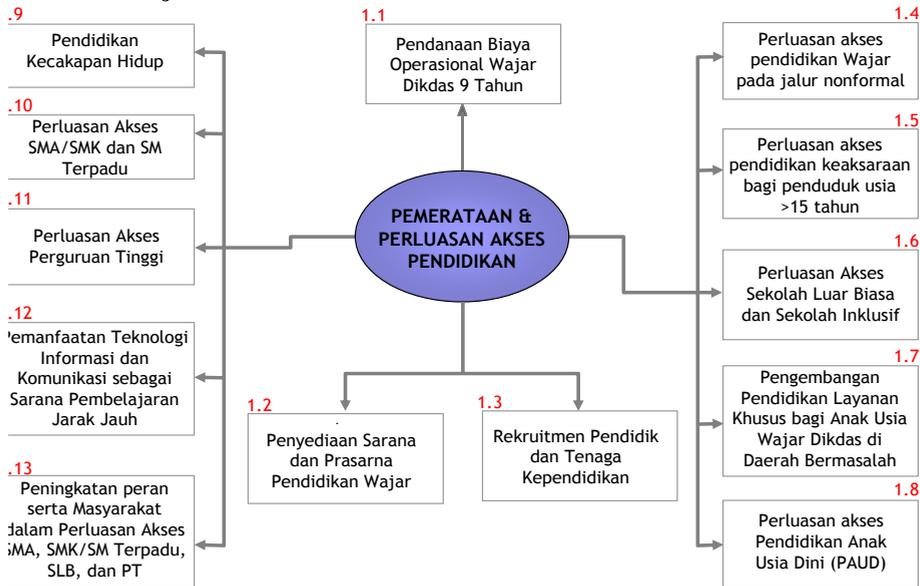
5. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 tahun; merupakan kebijakan dalam rangka memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi penduduk buta aksara. Hal ini dimaksudkan mendorong penduduk usia >15 tahun untuk mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung sesuai dengan standar kompetensi keberaksaraan. Melalui kebijakan strategis ini diharapkan akan menurunkan jumlah penyandang tiga buta, yaitu buta aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar.
6. Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif; merupakan kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sehingga memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi bakat istimewa atau kecerdasan luar biasa.
7. Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia Wajar Dikdas di daerah (bermasalah) terpencil, daerah berpenduduk jarang dan terpencar, daerah bencana, daerah konflik, serta anak jalanan; adalah kebijakan untuk penduduk yang kesulitan akses karena faktor sosial ekonomi, geografis, sarana transportasi dan komunikasi. Kelompok penduduk yang kurang beruntung karena terisolasi atau hambatan lainnya, mendapat pelayanan khusus, antara lain melalui SD/MI kecil/paket A, SMP/MTs kecil/paket B, SMP terbuka dan SD-SMP "satu atap", guru kunjung dan kelas layanan khusus di SD (KLK), termasuk layanan dengan memanfaatkan TIK, seperti radio, televisi, komputer dan internet.
8. Perluasan akses PAUD; merupakan kebijakan untuk mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia 0-6 tahun baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Kegiatan Pemerintah lebih diarahkan untuk memberikan dukungan atau pemberdayaan bagi terselenggaranya pelayanan PAUD yang bermutu oleh masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air. Hibah (*blockgrants*) atau imbal swadaya akan diberikan untuk pengembangan PAUD, PAUD model, dan berbagai bentuk integrasi PAUD ke dalam berbagai pelayanan anak usia dini lainnya.
9. Pendidikan kecakapan hidup; merupakan kebijakan strategis bagi peserta didik yang orang tuanya miskin dan orang dewasa miskin dan/atau pengangguran. Pendidikan ini akan memberikan kompetensi yang dapat

dijadikan modal untuk usaha mandiri atau bekerja, mengingat masih besarnya jumlah mereka, maka kegiatan strategis ini menjadi sangat penting peranannya bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

10. Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu; arah kebijakan ini lebih untuk memperluas SMK untuk mencapai komposisi jumlah SMA dan SMK yang seimbang. Perluasan SMA lebih ditekankan pada partisipasi swasta. Kebijakan ini ditempuh setelah melihat kenyataan bahwa bagian terbesar (65%) penganggur terdidik adalah lulusan pendidikan menengah yang dapat diartikan sebagai kurangnya keterampilan lulusan pendidikan menengah untuk masuk lapangan kerja.
11. Perluasan akses perguruan tinggi; pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi. Investasi membangun institusi baru untuk pendidikan tinggi akademik (umum) lebih didorong pada peran swasta, sementara peran Pemerintah lebih pada pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi pada perguruan tinggi yang sudah ada. Pendidikan tinggi akademik akan diperluas melalui penambahan ruang belajar, laboratorium, ruang praktikum, serta perpustakaan dalam rangka menambah daya tampung.
12. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh; kegiatan prioritas ini ingin mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) di perguruan tinggi, pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk mendukung perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal. Teknologi informasi dan komunikasi akan dimanfaatkan secara optimal dalam fungsinya sebagai media pembelajaran jarak jauh, dan juga untuk memfasilitasi manajemen pendidikan.
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA, SMK/SM Terpadu, SLB, dan PT; kegiatan ini termasuk dalam prioritas kebijakan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan: *pertama*, bahwa kemampuan keuangan pemerintah masih terbatas untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya sementara itu ada potensi yang cukup besar pada masyarakat; *kedua*, kecenderungan arah pembangunan pendidikan yang ingin lebih banyak melibatkan partisipasi swasta di segala aspek penyelenggaraan, termasuk investasi, pengelolaan, dan pengawasan; *ketiga*, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Pusat akan lebih banyak memainkan perannya sebagai fasilitator pelayanan publik yang bertugas membuat kebijakan-kebijakan strategis, yang antara lain dilakukan melalui pengendalian dan penjaminan mutu, pengembangan standar-standar, akreditasi, dan sertifikasi dalam rangka desentralisasi pendidikan.

Program strategis yang ditetapkan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan digambarkan pada grafik 4.1.

Gambar 4.1
Kebijakan Dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan



Sebagai satu bentuk satuan pendidikan, sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya. Oleh karena itu, sekolah dasar harus di kelola dengan sebaik – baiknya sehingga menjadi sekolah dasar yang bermutu. Menentukan standar mutu (*Quality assurance*) digunakan untuk menetapkan standar – standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan.³¹

Kualitas pendidikan merupakan tujuan akhir dari program pemerintah, sehingga dapat berimbas pada kualitas masyarakat Indonesia itu sendiri, peningkatan mutu pendidikan melalui pendidikan dasar yang terpadu harus dilakukan secara sistem yang terpadu yang melibatkan semua unsur – unsur yang terkait dalam pendidikan.³² Kesesuaian misi, dalam pengertian upaya terus menerus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan setara terutama dalam soal perbaikan mutu penjaminan dan akreditasi.

³¹ Edward Salis, 2008, *Total Quality Management in Education*, IRCiSoD, Yogyakarta, p8

³² Jerome S. Arcaro, 2007 *Pendidikan Berbasis Mutu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p 5

BAB V**LINGKUNGAN PENDIDIKAN****A. Pengertian Lingkungan Pendidikan**

Setiap manusia pasti memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena adanya interaksi manusia dengan lingkungannya. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Dengan kata lain lingkungan pendidikan merupakan latar tempat berlangsungnya pendidikan.³³ Lingkungan pendidikan dapat berupa benda-benda, orang-orang, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar peserta didik yang bisa memberikan pengaruh kepada perkembangannya, baik secara tidak langsung ataupun langsung, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Disamping lingkungan memberikan pengaruh dan dorongan, lingkungan juga arena yang memberikan kesempatan kepada kemungkinan-kemungkinan atau potensi (pembawaan) yang dimiliki seorang anak untuk berkembang.

Secara umum fungsi lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya (fisik/sosial/budaya) dan mengajarkan tingkah laku umum serta menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu.³⁴

B. Tripusat Pendidikan**1. Keluarga**

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil dalam tatanan kehidupan manusia. Keluarga adalah kelompok masyarakat paling tua dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti halnya dengan eksistensi masyarakat, keluarga pun senantiasa mengalami perubahan-perubahan tersebut terjadi antara lain dalam status dan kedudukan orang tua, status anggota dalam keluarga, pandangan terhadap jumlah anak, pandangan tentang pendidikan bagi anak-anak, serta nilai-nilai dan pandangan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga di masyarakat.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dalam kehidupan anak. Dalam lingkungan keluarga inilah anak mulai belajar berbagai hal yang berdampak terhadap perkembangan intelektual, sosial, dan sikap anak. Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga adalah tipe pelayanan orangtua. Tipe pelayanan orangtua dalam keluarga ada empat macam, sebagai berikut:

³³ Indrakusuma, A.D. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Malang: FIP IKIP Malang, 1978. h.72

³⁴ Tirtarahardja, dkk. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 20

Pertama, tipe pelayanan orangtua yang hangat yakni yang memberikan kasih sayang yang tulus dan perhatian besar terhadap kepentingan anak. Anak-anak dari keluarga yang memiliki tipe pelayanan ini menunjukkan sifat mandiri dan percaya diri yang tinggi, *kedua*, tipe pelayanan orangtua yang mengekang ditandai dengan sifat orangtua yang selaku memberikan larangan dan bersifat otoriter terhadap anaknya. Tipe pelayanan seperti ini membuat anak merasa dangkal, takut yang akhirnya menimbulkan kenakalan pada anak laki-laki dan anak perempuan cenderung pasif, dan hidup bergantung pada orangtua, *ketiga*, tipe pelayanan yang mengabaikan, ditandai dengan sifat orangtua memberikan kebebasan yang berlebihan dan tidak memperdulikan anaknya. Dampak pelayanan seperti ini membuat anak cenderung berperilaku tidak terarah dan tidak terpimpin; *keempat*, tipe pelayanan orangtua yang bermusuhan dan bersikap kekerasan terhadap anaknya. Dampak pelayanan seperti ini membuat anak menjadi pembangkang, agresif, tidak berdaya dan pasif. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa bentuk pelayanan orangtua dalam keluarga mempengaruhi perkembangan anak.

Keluarga sudah dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya peran dan pengaruh lingkungan keluarga dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Pandangan yang sangat menghargai posisi dan peran keluarga sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang istimewa. Pandangan seperti ini sangat logis dan mudah dipahami karena beberapa alasan berikut ini :

Pertama, keluarga lazimnya merupakan pihak yang paling awal memberikan perlakuan kepada anak. Misalnya sejak anak lahir, pihak keluargalah yang langsung menyambut dan memberikan layanan interaktif kepada anak. Hal ini diwujudkan dalam bentuk perilaku mengurus anak. Apa yang dilakukan dan diberikan oleh pihak keluarga tersebut menjadi sumber perlakuan pertama yang akan mempengaruhi pembentukan karakteristik pribadi dan perilaku anak. Menurut para ahli, pengalaman hidup pada masa awal ini akan menjadi fundasi bagi proses perkembangan dan pembelajaran anak selanjutnya.

Kedua, sebagian besar waktu anak umumnya dihabiskan di lingkungan keluarga. Kalau di sekolah anak menghabiskan waktu sekitar lima atau enam jam, maka di rumah anak bias menghabiskan waktu sekitar dua kali lipat atau lebih dari itu. Besarnya peluang dan kesempatan interaksi ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Jika kesempatan yang banyak ini diisi dengan hal-hal yang sangat bermakna dan positif bagi perkembangan anak maka kecenderungan pengaruhnya akan positif pula. Sebaliknya apabila kesempatan itu disia-siakan, apalagi diisi dengan hal-hal yang tidak mendukung perkembangan anak, maka pengaruhnya bisa menjadi sangat lain.

Ketiga, karakteristik hubungan orangtua-anak sangat berbeda dari hubungan anak dengan pihak-pihak lainnya, misalnya guru, teman dan sebagainya. Kepada orangtua, disamping anak memiliki ketergantungan secara

materi, ia juga memiliki ikatan psikologis tertentu sejak dalam kandungan sudah dibangun melalui jalinan kasih sayang dan pengaruh-pengaruh normatif tertentu. Kualitas hubungan psikologis ini tidak dimiliki anak dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk guru di sekolah.

Keempat, interaksi kehidupan orangtua dan anak di rumah bersifat “asli”, seadanya dan tidak dibuat-buat. Perilaku orangtua yang “asli” inilah cenderung akan menjadi nasihat paling bermakna bagi anak daripada nasihat kata-kata dan bentuk-bentuk nasihat formal lainnya.

Dalam prakteknya, bagaimanapun pengaruh keluarga itu akan bervariasi. Hal itu tergantung kepada bentuk, kualitas, dan intensitas perlakuan yang terjadi, disamping tergantung pula kepada kondisi anak sendiri. Walaupun ada prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan bahan rujukan oleh orangtua dalam memperlakukan anak, unsur keunikan anak tetap merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Peran keluarga lebih banyak bersifat memberikan dukungan baik dalam hal penyediaan fasilitas maupun penciptaan suasana belajar yang kondusif. Sebaliknya dalam hal pembentukan perilaku, sikap dan kebiasaan, penanaman nilai, perilaku-perilaku sejenisnya, lingkungan keluarga bisa memberikan pengaruh yang kuat dan langsung.

Berkaitan dengan perkembangan aspek-aspek perilaku seperti itu, keluarga dapat berfungsi langsung sebagai lingkungan kehidupan nyata untuk mempraktekkan aspek-aspek perilaku tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan orangtua dalam mempengaruhi anak.

Pertama, pemodelan perilaku (*modeling of behaviours*). Baik disengaja atau tidak, orangtua dengan sendirinya menjadi model bagi anaknya. Cara dan gaya orangtua berperilaku akan menjadi sumber objek tiruan bagi anak. Tidak hanya yang baik-baik saja yang diterima oleh anak, akan tetapi sifat-sifat yang jeleknya pun akan dilihat pula. Jika orangtua biasa berperilaku kasar dalam berinteraksi di lingkungan rumahnya, maka kecenderungan anak-anaknya untuk akan berperilaku seperti itu sangat besar. Sebaliknya kalau orangtua berperilaku dan bertutur kata lemah lembut hamper tidak pernah ada marah-marah dan kekerasan maka anak-anaknya juga akan kecenderungan berperilaku demikian.

Kedua, memberikan ganjaran dan hukuman (*giving rewards and punishment*). Orangtua memengaruhi anaknya dengan cara memberi ganjaran terhadap perilaku tertentu yang dilakukan oleh anaknya dan memberi hukuman terhadap beberapa perilaku lainnya. Misalnya, seorang anak yang mendapat rengking satu mendapat pujian dari orang tuanya; sementara anak yang tidak pernah belajar mendapat teguran dari orang tuanya.

Ketiga perintah langsung (*direct instruction*). Kadang-kadang orangtua secara sederhana mengatakan kepada anak seperti berikut: “Jangan malas belajar”, “Jangan suka coret-coret di tembok!”, “Cepat mandi! Nanti sekolah kesiangan!”. Dari perintah-perintah seperti ini, anak sering mengambil

pelajaran tertentu sehingga lebih memahami harapan-harapan dan keinginan-keinginan orangtuanya.

Keempat, menyatakan peraturan-peraturan (*stating rules*). Secara berulang-ulang orangtua sering menyatakan peraturan-peraturan umum yang berlaku di rumah, meskipun hal itu sering dinyatakan secara tidak tertulis. Misalnya orangtua berkata "Kalau sudah dari kamar kecil tutup pintunya dan matikan lampunya". Dengan cara ini, anak didorong untuk melihat perilakunya apakah sudah benar atau belum melalui perbandingan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Kelima, nalar (*reasoning*). Pada saat-saat menjengkelkan, orangtua bisa mempertanyakan kapasitas anak untuk bernalar, dan cara itu digunakan orangtua untuk mempengaruhi anaknya. Sebagai contoh, orangtua bisa mengingatkan anaknya tentang kesenjangan perilaku dengan nilai-nilai yang dianut melalui pertanyaan berikut: "Apakah memukul teman itu merupakan pekerjaan yang baik?". Atau orangtua bisa mendefinisikan dan memberikan label terhadap aktivitas-aktivitas anak dalam cara-cara yang dianggap mempengaruhi perilakunya seperti: "Sekarang rangking kamu jelek karena kamu malas belajar, dan bukan karena kamu bodoh".

Keenam, menyediakan fasilitas atau bahan-bahan dan adegan suasana (*providing materials and settings*). Orangtua dapat mempengaruhi perilaku anak dengan suasana. Misalnya, untuk menciptakan suasana yang menimbulkan minat belajar anak, orangtua membelikan buku-buku yang diminati anak daripada membelikan pistol-pistolan.

Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal 2 (dua) macam bentuk keluarga, yaitu (1) Keluarga kecil, dan (2) keluarga besar.

- 1) *Keluarga kecil*; adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan Pernikahan yang terdiri atas seorang ibu, ayah dan anak-anak atau tan-pa anak-anak, dan bertempat tinggal bersama dalam satu rumah.
- 2) *Keluarga besar*; anggota-anggotanya diikat berdasarkan hubungan darah. Keluarga ini anggotanya tidak hanya terdiri dari ibu, ayah dan anak, tetapi juga kakek, cucu, keponakan saudara sepupu, dan anggota lainnya. Keluarga besar tidak selalu bertempat tinggal dalam satu rumah.

Dalam keluarga secara kodrat terdapat pembagian tugas, tanggung jawab dan fungsi-fungsi. Bapak adalah pemimpin, ia bertanggung jawab sepenuhnya dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu kedudukan Bapak sangat menentukan. Namun demikian seorang ibu, juga mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi-fungsi yang tidak kalah pentingnya dalam keluarga dibandingkan dengan tugas, tanggung jawab, dan fungsi-fungsi yang diperankan oleh sang ayah. Demikian pula anak-anak juga mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi-fungsi tertentu yang ikut menunjang kehidupan positif dalam keluarga.

Sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan fungsi-fungsi masing-masing anggota keluarga, maka dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga harus diciptakan keharmonisan dan keserasian antara anggota keluarga. Bapak, ibu dan anak harus dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing dengan disiplin agar terbinanya ketertiban dan keamanan dalam keluarga tetap dapat dipertahankan. Upaya ini diharapkan mendukung tercapainya tujuan keluarga yaitu keluarga sejahtera lahir dan bathin di dunia dan di akhirat.

Pada dasarnya keluarga mempunyai lima fungsi pokok yaitu: ³⁵

1. Fungsi Pendidikan

Selama ini yang banyak dikenal masyarakat sebagai tempat men-didik anak adalah sekolah. Akan tetapi sebagian masyarakat kurang menyadari bahwa rumah sebagai tempat berkumpulnya keluarga dan tempat-tempat lain seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, juga merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Disadari betapa pentingnya peranan sekolah sebagai tempat pendidikan. Namun demikian pendidikan yang diselenggarakan dalam keluarga tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahkan keberhasilan pendidikan di sekolah banyak ditentukan oleh pendidikan dalam keluarga.

Dalam pendidikan informal yang diselenggarakan dalam keluarga, peranan seorang ibu sangat penting, ibu disebut pendidik pertama dan utama. Sang Ibu tidak hanya mempunyai kewajiban menyusui dan mengurus makanan putera-puterinya atau mengurus pakaiannya, akan tetapi yang paling penting adalah mendidik putera-puterinya dengan modal utama kasih sayang. Sejak dalam kandungan, seorang bayi sudah berhubungan erat dengan ibunya. Demikian juga sewaktu dilahirkan ke dunia. Hubungan yang pertama kali adalah dengan ibunya. Diberinya susu, menjaga tubuhnya dari gangguan udara, dibersihkannya dari segala kotoran dengan dimandikan tiap pagi dan sore; pendeknya segala keperluannya diselenggarakan oleh ibunya. Jika sudah agak besar anak diajari makan sendiri, mandi sendiri dan diajari pula melakukan pekerjaan ringan, misalnya belajar mengambil dan menaruh suatu barang atau mainan anak-anak. Selanjutnya apabila sudah waktunya, diberi pelajaran pendidikan agama, ahlak serta sopan santun, dilarang melakukan yang tidak.baik dengan harapan kelak ia. menjadi seorang yang baik.

Apabila bapak bisa bepergian jauh bahkan dalam waktu yang lama untuk mencari nafkah, ibu tidak bisa demikian. Lalu senantiasa harus selalu dekat dengan anaknya, bahkan boleh dikatakan bahwa ia tidak boleh sakit dalam mengasuh dan memelihara anaknya.

³⁵ Syafei, S. M. *Bagaimana Anda Mendidik Anak (Tuntutan Praktis Untuk Orang dalam Mendidik Anak)* Edisi Kedua, Galia Indonesia, Bogor, 2006. h. 29

Pendidikan dalam keluarga tidak hanya meliputi pendidikan rohani seperti agama, ahlak dan sopan santun, tetapi termasuk juga pertumbuhan dan perkembangan jasmani; seperti mencukupi kebutuhan gizi anak, olah raga, dan aktifitas lainnya, agar pertumbuhan jasmani dan rohani dapat seimbang. Oleh karena itu, seorang ibu harus mempunyai pengetahuan yang cukup agar mampu menjadi pendidik yang sebaik-baiknya.

Keberhasilan pendidikan dalam keluarga ikut dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang tingkat sosial ekonominya relatif mampu, lebih banyak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mendidik anaknya secara baik. Keluarga ini dapat menyiapkan fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan anak seperti buku-buku pelajaran / bacaan lainnya yang berguna untuk menambah pengetahuan anak, majalah koran yang dapat merangsang dan menumbuhkan minat serta kebiasaan membaca serta mainan-mainan yang pada dasarnya mendukung pendidikan anaknya. Demikian pula keluarga cukup mampu mendorong, membimbing dan mengawasi anak-anaknya secara baik dalam hal belajar serta mengembangkan pertumbuhan jasmani dan rohani.

Unsur lain yang turut menentukan pendidikan anak adalah unsur gerak anak (mobilitas anak). Keluarga golongan mampu biasanya mempergunakan waktu libur untuk mengunjungi tempat-tempat rekreasi atau mengunjungi saudara di kota atau tempat lainnya. Perjalanan yang jauh dapat menarik dan menimbulkan kesan yang dalam di hati anak-anak. Keadaan di berbagai kota atau tempat-tempat lainnya yang dikunjungi memungkinkan untuk dapat banyak melihat toko-toko besar di kota-kota, mobil-mobil bersimpang siur. lampu listrik yang terang benderang bergantungan, orang berbondong-bondong berbelanja di toko-toko, kereta api, pesawat terbang, laut luas nan biru, kapal besar yang mengeluarkan asap, pemandangan gunung yang biru dan indah serta kejadian-kejadian lain yang merupakan hal baru bagi anak. Pengalasan ini akan sangat membantu anak dalam mengembangkan wawasannya sehingga anak dapat memperkaya referensi pengetahuannya yang mungkin tidak diperoleh melalui pendidikan formal.

Selanjutnya untuk keluarga yang sosial ekonominya kurang mampu, tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan pendidikan anaknya sebagaimana halnya keluarga mampu. Oleh karena itu anak dari keluarga ini diasumsikan memiliki bekal pendidikan keluarga yang kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: waktu yang tersedia dari orang tua untuk mendidik relatif kurang oleh karena orang tua disibukkan oleh urusan mencari nafkah, fasilitas pendukung pendidikan dalam keluarga yang kurang, pengalaman anak-anak untuk mengunjungi tempat-tempat untuk mengenal dunia baru yang kurang, sehingga pengetahuan dan wawasan mereka diasumsikan sangat terbatas.

Selain itu sebagian dari anak yang berasal dari keluarga kurang mampu diharuskan oleh orangtuanya untuk membantu mencari nafkah sehingga sering berakibat anak putus sekolah. Dengan demikian keluarga dengan tingkat sosial semacam ini tidak berpeluang untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Hal ini ikut berpengaruh pada pelayanan dalam hal pemenuhan pendidikan anak misalnya cinta, pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan etika dan sebagainya.

Meskipun demikian beberapa anomali terjadi di masyarakat. Banyak dijumpai anak yang berasal dari keluarga mampu sering terlibat minum minuman keras, terlibat dalam narkoba, perilaku seks bebas, dan perilaku negatif lainnya yang bertentangan norma dalam masyarakat. Gejala ini sering diakibatkan oleh ketidak harmonisan orang tua, perceraian orang tuanya, atau kesibukan kedua orang tuanya. Selain itu fasilitas yang diberikan orang tua tidak dibarengi dengan pengarahan dan curahan kasih sayang serta motivasi yang memadai. Sehingga kasih sayang yang dibutuhkan anak tidak dapat terpenuhi.

Sebaliknya ada pula anak dari golongan sosial ekonomi kurang mampu, misalnya anak seorang janda yang pekerjaannya hanya menerima gaji sebagai tukang cuci pakaian, namun dapat mencapai tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini disebabkan antara lain, oleh adanya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga, pemberian pengarahan dan motivasi yang cukup memadai disertai pancaran teladan orang tua dalam tawakal dan ketaatan beragama.

2. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi dalam keluarga erat hubungannya dengan tingkat pendidikan dan keterampilan ketuarga itu. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan dan keterampilan anggota keluarga, semakin terbuka kesempatan untuk meraih kehidupan dan kedudukan ekonomi yang relatif baik. Selanjutnya fungsi ekonomi dalam keluarga erat kaitannya dengan kondisi kehidupan keluarga. Kondisi ekonomi turut mempengaruhi harmonis tidaknya hubungan dalam keluarga. Dalam keluarga ekonomi merupakan salah satu pilar yang ikut berperan membangun keluarga bahagia.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk membantu ke arah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah yaitu:

a) Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

Program usaha peningkatan pendapatan keluarga bertujuan untuk membina dan mengembangkan kegiatan usaha keluarga yang tergabung dalam kelompok sehingga secara bertahap keluarga mampu berwiraswasta serta memungkinkan tumbuhnya kegiatan yang bersifat kooperatif. Di samping itu kegiatan ini dalam rangka membantu dan memperkokoh

perkembangan koperasi di desa/kelurahan. Sasaran usaha peningkatan pendapatan keluarga adalah keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah dan telah memiliki kegiatan usaha yang tergabung dalam kelompok.

b) Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Program usaha ekonomi produktif dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial, melalui Dinas Sosial propinsi. Program UEP bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan keluarga. Jenis bantuan berupa peralatan dan bahan-bahan usaha-usaha untuk modal sesuai dengan usulan yang bersangkutan. Adapun sasaran program ini adalah fakir miskin, jompo, tunanetra, karang taruna dan wanita yang berpendidikan rendah.

c) Program Kejar Usaha

Program Kejar Usaha dibina dan dikembangkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas pendidikan Propinsi Bidang PAUDNI (sebelumnya bidang Dikmas). Program ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan sebagai tindak lanjut dari warga belajar (yang sudah tidak buta huruf). Jenis bantuan yang diberikan adalah uang untuk modal yang diberikan kepada kelompok kejar usaha.

d) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor yang dikembangkan oleh BKKBN, bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga akseptor KB. Jenis bantuan yang diberikan berupa uang untuk kegiatan simpan pinjam di antara kelompok akseptor KB.

3. Fungsi Keamanan

Pada saat keadaan penduduk Indonesia masih jarang, masih terdapat hutan belantara yang cukup luas, kehidupan dan sistem sosial ekonomi serta pemerintahan belum tumbuh berkembang seperti seka-rang. Seluruh urusan keamanan menjadi tanggung jawab keluarga.

Masing-masing keluarga harus dapat menjaga keluarga dari bencana atau gangguan yang mengancam jiwa dan harta bendanya. Gangguan dan ancaman itu bisa berasal dari serangan binatang buas, serangan dari keluarga atau suku lainnya yang memusuhi, bencana alam seperti kebakaran. Banjir, atau gempa bumi. Dewasa ini dengan sistem pemerintahan, ekonomi dan sosial yang ada, telah dibentuk lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat seperti tentara, polisi, jaksa dan hansip.

Meskipun demikian lembaga keamanan tidak akan mampu sepenuhnya menjamin keamanan setiap keluarga, karena walaupun organisasi lembaga tersebut telah disusun secara mantap dan rapi, namun tidak memungkinkan untuk dapat menjaga, mengawasi serta melindungi setiap keluarga sepanjang

waktu. Ini berarti meskipun sua-tu negara sudah modem dan maju, keluarga masih tetap mempunyai peranan dan kewajiban dalam menjaga keamanan keluarganya.

Keamanan di sini mempunyai arti luas, bukan hanya dalam fisik saja seperti pencurian atau perampokan, melainkan keamanan kehidupan seseorang baik rohani maupun jasmani. Keluarga harus tetap menjaga anak dari kecelakaan yang bisa terjadi setiap saat, misalnya jatuh dari pohon, tertabrak kendaraan, masuk ke dalam sumur, hanyut terbawa banjir atau tersiram air panas di dapur. Keluarga harus dapat menjaga anak dari penyakit dan mengusahakannya agar selalu sehat. Dewasa ini bahaya narkoba, kenakalan remaja dan kriminalitas merupakan ancaman bagi keluarga terutama di kotakota. Oleh karena itu, keluarga harus dapat menjaga dan mengamankan anak agar terhindar dari bahaya tersebut.

Selanjutnya, keluarga juga harus menjaga dan mengawasi anak-anak agar senantiasa belajar dengan rajin, mengawasi buku atau majalah yang dibaca agar tidak membaca bacaan-bacaan yang tidak pantas dibaca oleh anak-anak.

Dalam bidang agama, kedua orang tua harus langsung membimbing, mengajari dasar-dasar pengetahuan agama serta menjaga agama yang dianut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga keamanan dalam melestarikan ideologi bangsa Pancasila, keluarga harus berfungsi sebagai benteng pertahanan Pancasila.

Dalam pelaksanaannya baik bapak maupun ibu mempunyai peranan yang seimbang dalam fungsi keanikan, meskipun terdapat perbedaan karena kodratnya, misalnya soal mengasuh serta menjaga anak dari kecelakaan, ibu lebih berperan begitu pula dalam pendidikan; tetapi ancaman yang bersifat keras dan berbahaya seperti pencurian; bapak lebih berperan. Sedangkan terhadap kelestarian ideologi Pancasila dan keamanan dalam bidang agama kedua orang tua mempunyai peranan yang sama pentingnya.

4. Fungsi Sosial

Manusia sebagai perorangan atau anggota keluarga mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan, berintegrasi dengan lingkungan, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan, membentuk dan terbentuk oleh lingkungan yang tidak dapat hidup terpisah dengan lingkungan baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

Hampir tidak mungkin seseorang atau keluarga dapat hidup berdiri sendiri memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang atau keluarga lain. Ini disebabkan karena keterbatasan manusia dalam segala hal dan sudah merupakan kodrat. Keterbatasan itu membawa manusia menjadi saling membutuhkan dan saling tergantung, sehingga mengharuskan manusia berhubungan dengan orang lain, saling tolong-menolong dan saling bantumembantu yang selanjutnya menumbuhkan rasa kebersamaan dan

gotong-royong. Rasa kebersamaan dan gotong-royong ini masih tetap hidup dalam masyarakat baik masyarakat yang tinggal di kota matipun masyarakat yang tinggal di desa. Sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat ada keluarga yang mengadakan kenduri, maka keluarga lain akan datang membantu persiapan kenduri tersebut Apabila ada orang sakit, tetangga atau keluarga lain menengok, membantu mencari dokter atau obat untuk penyembuhannya. Apabila ada orang meninggal, maka dengan penuh kesadaran tetangga terdekat atau yang jauh pun turut merasa prihatin dan membantu mengurus mayat untuk dikebumikan, bahkan membantu memberi beras atau uang duka.

Rasa kebersamaan dan kegotongroyongan ini nampak bukan hanya dalam menolong orang yang sedang mengalami kesusahan saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan lainnya, seperti: gotong royong membangun mesjid; madrasah; jalan dan jembatan.

Selain hubungan dengan manusia atau masyarakat seperti telah diuraikan, seseorang sangat tergantung pula kepada lingkungan alam sekitarnya. Yang dimaksud dengan lingkungan alam adalah udara, air, tanah, batu-batuan, pohon-pohonan, hewan dan sebagainya. Dewasa ini telah disadari betapa pentingnya lingkungan alam bagi kelangsungan pembangunan jangka panjang. Setiap perencanaan pelaksanaan proyek pembangunan perlu menyertakan analisa mengenai dampak lingkungan alam. Menurut Emil Salim, kualitas lingkungan hidup di negara kita masih sangat rendah, namun belum sampai mencapai keputusan untuk diperbaiki. Rendahnya kualitas lingkungan alam disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. sehingga tanah banyak yang digunakan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Penggunaan tanah berakibat pada penggundulan gunung, pengrusakan hutan dan pengrusakan sumber alam lainnya.

Berbeda dengan negara maju, rusaknya lingkungan disebabkan kemajuan ekonomi negara-negara tersebut. Pembangunan industri mengakibatkan pencemaran sungai. dan laut oleh pembuangan limbah industri; pencemaran udara akibat peningkatan kadar karbon dioksida dari cerobon cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh ken-daraan bermotor serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang anorganis yang sulit dihancurkan dan barang-barang kimia serta pestisida yang mempengaruhi kesehatan masyarakat

Tata lingkungan sangat erat hubungannya dengan kesehatan suatu masyarakat. Di negara industri maju, kematian lebih banyak disebabkan oleh kanker dan jantung. Di samping itu kehidupan modem mengakibatkan penyakit yang berhubungan dengan suatu akibat ketegangan-ketegangan hidup. Sebaliknya di negara-negara yang sedang berkembang, jutaan orang mati akibat kurang gizi dan kesehatan lingkungan yang buruk, seperti kondisi air minum yang tidak baik, kondisi pemukiman yang tidak memenuhi sarat,

saluran air limbah dan pembuangan sampah yang tidak teratur; dan bahan makanan yang dijual tanpa kontrol.

Orang Indonesia paling peka pada angin. Gejala tersebut tidak hanya terbatas pada rakyat berpenghasilan rendah, tetapi juga pada golongan kelas menengah ke atas. Hal ini terutama disebabkan oleh karena daya tahan badan kurang dan tata lingkungan kotor. Jika sampah menumpuk di depan rumah, atau keperluan sehari-hari dari pasar yang sama sekali tidak ada pengawasan kesehatan, air selokan tiap kali meluap waktu hujan lebat, dan jika orang buang air seandainya tidak memilih tenipat dengan sendirinya maka kuman-kuman penyakit akan menular yang berakibat membinasakan manusia.

5. Fungsi Agama

Bagi bangsa kita yang bercorak religius, persoalan agama merupakan persoalan yang "melekat" tidak dapat dipisahkan dengan segi kehidupan lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, agama selalu memberi kontribusi berarti dalam mencapai keberhasilan yang diharapkan. Agama adalah segala peraturan dan ketentuan yang berasal dari Tuhan yang diturunkan melalui Nabi dengan Kitab Suci yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Agama juga merupakan sumber pendidikan paling luhur karena memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur segi-segi yang mendasar baik kehidupan manusia, seperti ahlak, karakter dan mental manusia, Nilai segi-segi tersebut akan memberi corak pada hasil karsa dan karya manusia.

Dalam agama diajarkan bahwa tugas manusia di dunia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah mempunyai pengertian yang luas yaitu segala perbuatan yang baik untuk kepentingan umat manusia. Pengertian ini penting dihayati karena sementara orang mengartikan ibadah dalam arti sempit yaitu perbuatan yang langsung berhubungan dengan Tuhan.

Ibadah mencakup hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal adalah hubungan langsung dengan Tuhan dan horizontal adalah hubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Hubungan dengan Tuhan harus mendasari hubungan dengan sesama manusia, sebaliknya hubungan dengan sesama manusia merupakan pengamalan dari hubungan dengan Tuhan. Tujuan hubungan dengan sesama manusia adalah untuk saling mengingatkan, tolong-menolong dan bantumembantu agar dapat mewujudkan kesejahteraan masing-masing. Pengertian tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa segala kegiatan pembangunan yang ditakukan oleh manusia dalam berbagai macam aspek pembangunan adalah ibadah.

Agama misalnya Agama Islam mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan keluarga, misalnya: cara-cara memilih jodoh, meminang sampai tahap pembinaannya, aturan tentang masa hamil; menyusui; mendidik anak

dan lain-lain. Syarat utama bagi keutuhan dan kelanjutan hidup keluarga adalah adanya ketenteraman jiwa serta adanya rasa cinta dan kasih sayang. Kita sulit dapat berikhtiar membentuk keluarga dengan ketenteraman jiwa tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga.

Orang tua hendaknya berusaha membentuk keluarga yang, yang tenteram, damai, penuh kasih sayang, sejahtera lahir batin, taqwa dan tawakal sehingga dari padanya diharapkan memberi manfaat bagi se-sama manusia. Hal ini penting karena tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

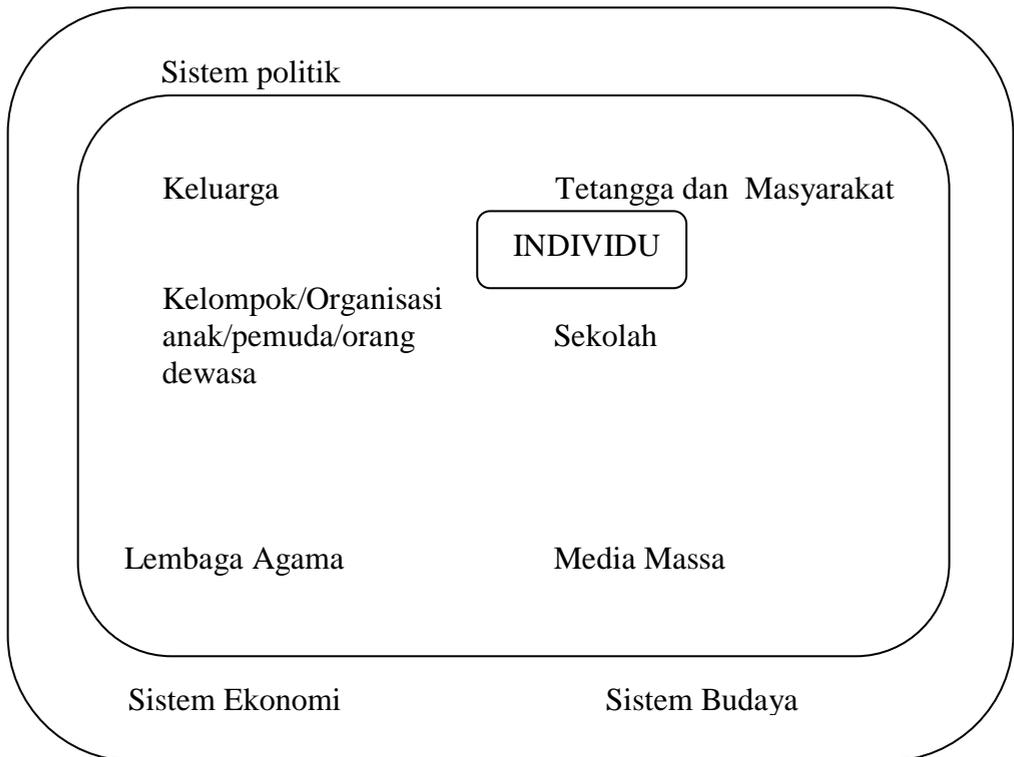
Untuk mewujudkan cita-cita itu, diperlukan kemampuan secara lahiriah dan batiniah yang kuat. Dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kemampuan secara lahiriah dan batiniah tersebut, hendaknya dimulai dengan menumbuhkan ketaqwaan pada anak dan selanjutnya diamalkan melalui kegiatan ibadah kepada Tuhan. Dalam ajaran agama misalnya agama Islam seseorang diwajibkan menjalankan syariat dan ibadah ketika mencapai akil balig. Kendati demikian sikap taqwa yang mampu memberi arah pada amal seseorang tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat, melainkan harus dimulai sejak kecil, bahkan dimulai sejak bayi dalam kandungan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa bayi dalam kandungan sangat peka terhadap pengaruh dari luar, terutama keadaan ibu baik jasmani maupun rohani. Ibu yang kurang sehat jasmaninya akan mempengaruhi kesehatan jasmani bayi. Demikian pula dengan kondisi rohani ibu akan mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak. Keadaan rohani ibu hamil kurang stabil, misalnya selalu dicekam rasa khawatir, takut, kesal, marah, atau mengalami kegoncangan jiwa lainnya, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan rohani bayi. Hal ini kemungkinan akan berlanjut sampai anak dewasa apabila sering terjadi pada ibu hamil. Oleh karena itu bagi ibu yang sedang hamil perlu selalu menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohaninya serta selalu mendekati diri pada Tuhan Maha Pencipta. Hal ini diharapkan akan membantu pertumbuhan bayi dalam kandungan serta memudahkan persalinannya.

Dalam membentuk sikap taqwa bagi anak-anak, sangat diperlukan peran dari orang tua. Selanjutnya dibutuhkan pula adanya motivasi dan bimbingan dari orang tua dalam beribadah, perlu adanya contoh dan ketauladanan dari ayah dan ibu. Hal ini akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya menyuruh saja. adanya pemberian

Peranan keluarga bukan saja berupa peranan-peranan yang bersifat intern antara orang tua dan anak, serta anak yang satu dengan anak yang lain. Keluarga juga merupakan medium untuk menghubungkan kehidupan anak dengan kehidupan di masyarakat, dengan kelompok-kelompok sepermainan, lembaga-lembaga sosial seperti lembaga agama, sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Setelah anak memiliki pergaulan dan pengalaman-pengalaman yang luas di dalam kehidupan masyarakatnya, sering pengaruh orang-orang dewasa

di sekitarnya lebih mempengaruhi dan membentuk perilakunya dibandingkan dengan pengaruh dari keluarga. Bagaimana jaringan-jaringan proses sosialisasi anak di dalam keluarga dan masyarakat tersebut dapat disederhanakan melalui gambar 5.1. berikut :



Gambar 5.1. Proses sosialisasi anak dalam keluarga dan masyarakat

2. Sekolah

Proses pendidikan secara formal dilakukan melalui system persekolahan, pada umumnya dipandang sebagai proses terbuka. Proses pendidikan secara formal ini bersifat terbuka sehingga dapat diketahui dan terlihat oleh siapapun, dan diorganisasi secara baik, mulai dari pengaturan peserta didik sampai pada pengaturan kapan seseorang harus belajar dan apa yang harus dipelajari pada waktu tertentu sampai pada pengaturan system penilaian sebagai bukti terjadinya perubahan pada diri individu sebagai akibat proses pendidikan. Akan tetapi baik edukasi maupun sosialisasi juga dapat terjadi secara informal dan bersifat tertutup, dan bahkan sebagian tidak disadari oleh individu yang

bersangkutan. Dalam beberapa masyarakat, misalnya pada kelompok-kelompok masyarakat tribal, terutama di negara-negara sedang berkembang dari Dunia Ketiga, proses edukasi dan sosialisasi dari generasi muda berlangsung tidak selalu melalui prosedur dan jalur belajar formal yang ekstensif. Namun demikian proses “*schooling*” atau persekolahan sebenarnya selalu terjadi dimana-mana, dan masyarakat sukar menghindari diri dari proses belajar mengajar formal tersebut, baik di dalam masyarakat di desa-desa, masyarakat yang hidup di padang pasir, masyarakat di lereng-lereng gunung, semuanya sekarang pasti telah dijajah oleh proses “*schooling*” tersebut. Sifat universal dari sekolah-sekolah dan proses *schooling* tersebut dapat digolongkan menjadi enam golongan besar :

1. Sekolah-sekolah yang memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk menyadari dirinya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sekolah-sekolah ini meliputi pendidikan tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah lanjutan.
2. Sekolah-sekolah yang memberikan pengetahuan tingkat lanjut di perguruan tinggi, yang memberikan pendidikan dan latihan spesialis.
3. Sekolah-sekolah yang berorientasi pada pendidikan keagamaan.
4. Sekolah-sekolah yang menyiapkan generasi muda menjadi militer.
5. Sekolah-sekolah kejuruan yang berorientasi pada kerja, dan
6. Sekolah-sekolah dalam bentuknya yang lain misalnya sekolah yang dipersiapkan untuk menyebarkan pengetahuan tertentu, misalnya sekolah untuk kepentingan indoktrinasi, sekolah untuk menyiapkan guru-guru agama, dan sekolah-sekolah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga profesional lainnya (Chesler and Cave, 1981:2)

Proses dari persekolahan bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sekolah-sekolah seperti itu sejak lama telah dipersiapkan oleh masyarakat, dan dimaksudkan untuk melestarikan warisan budaya masyarakat, serta berfungsi untuk melangsungkan proses memajukan masyarakat. Lebih jelasnya tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan dimanapun proses pendidikan itu berlangsung (melalui persekolahan atau diluar persekolahan) adalah untuk menghasilkan orang-orang agar mereka mengenal dan menyadari dirinya serta bertanggungjawab untuk menyempurnakan/mengembangkan masyarakatnya atau dengan kata lain mendewasakan manusia yang ditandai oleh indikator: bertanggung jawab, mandiri, tidak tergantung atau selalu menggantungkan diri kepada orang lain, berani mengambil keputusan terbaik untuk dirinya dan masyarakatnya serta menanggung resiko dari keputusan yang diambilnya.

Munculnya sekolah-sekolah formal sebagai konsekuensi dari perkembangan masyarakat, dan kompleksnya tatanan sosial yang ada, serta untuk merespon kebutuhan bagi upaya melestarikan warisan budaya, kontrol

sosial dan untuk memajukan masyarakat yang bersangkutan. Kemunculan sekolah ini pada awalnya didasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga oleh orang dewasa di sekitar keluarga, tidak mampu lagi berperan mempersiapkan anggota keluarganya secara intensif dalam memberikan pengalaman belajar untuk menghadapi berbagai kemajuan dan kompleksitas kehidupan dan tatanan sosial budaya yang berkembang secara cepat.

Bagi orang-orang/masyarakat yang menempatkan permikiran pada orientasi edukasi, untuk memajukan masyarakat, tidak menginginkan perubahan-perubahan masyarakat secara radikal, apalagi dengan jalan berontak atau kekerasan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap institusi dan struktur sosial yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kelembagaan pendidikan itu pada hakekatnya merupakan lembaga konservatif, yang berfungsi untuk mempertahankan dan mewariskan budaya sambil berusaha mengembangkan budaya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Titik tolak atau sentral segala upaya dalam pengembangan budaya yang dilakukan melalui proses persekolahan atau proses pendidikan di sekolah pada dasarnya adalah memajukan kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan warga masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang utuh, yaitu sejahtera dalam arti lahir dan sejahtera dalam arti bathin. Dengan demikian orientasinya bukan semata pada aspek materialistis tetapi juga aspek psikologis dan spritualistis. Oleh sebab itulah maka sekolah dimanapun, dalam kondisi apapun sebagai sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Mestinya dia tumbuh dan berkembang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Pada sisi lain sekolah dihadapkan pada kenyataan perkembangan budaya masyarakat yang sangat cepat, perubahan-perubahan yang terjadi terhadap berbagai aspek-aspek budaya dan masyarakat yang begitu cepat menjadikan sekolah mempunyai misi sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan (*agent of change*), sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Sekolah berfungsi sebagai alat untuk mengintrodusir nilai-nilai baru yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat tanpa meninggalkan nilai lama yang perlu dipertahankan agar dapat diadopsi oleh masyarakat, demi mengadaptasi perkembangan teknologi dan pengetahuan, yang pada akhirnya sebenarnya bertujuan agar kehidupan masyarakat lebih berkualitas.

Jadi tidak mungkin kita berfikir dan memfungsikan sekolah hanya sebagai alat untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan dan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat serta sebagai alat untuk mentransmisikan warisan-warisan budaya masyarakat semata-mata, karena masyarakat akan tertinggal dari budaya yang terus menerus berkembang, lebih-lebih pada masa sekarang

perkembangan budaya masyarakat jauh lebih cepat dari apa yang dapat dilakukan oleh sekolah. Bersamaan dengan proses pelestarian tersebut, sekolah harus dipandang sebagai agen pembaharuan serta kekuatan yang mampu menciptakan kondisi-kondisi untuk melakukan perubahan-perubahan kearah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian dalam pembicaraan mengenai sekolah ini kita dihadapkan dua kepentingan atau tujuan pokok, yaitu: melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mempersiapkan anak didik agar dapat mengantisipasi masa depan tanpa harus meninggalkan budaya dan nilai yang sudah menjadi karakteristik masyarakat. Jadi sekolah disatu pihak dapat dipandang sebagai lembaga konservasi nilai-nilai masa lampau dan kedua sebagai agent untuk melakukan perubahan.

Kepentingan tersebut di atas tidak perlu dianggap sebagai asumsi yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus ditempatkan di dalam suatu kontinum, yang akan memberi kesempatan kepada pengambil kebijakan, untuk mengambil pilihan-pilihan yang diinginkan, atas pertimbangan-pertimbangan situasi, tempat dan kepentingan tertentu.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, nampak bahwa pembicaraan tentang persekolahan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang masyarakatnya, sebab sekolah diciptakan sebagai lembaga yang berperan dalam mengembangkan masyarakat kearah kemajuan, berkualitas dan sejahtera. Oleh sebab itu sangat tepat kalau tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu berpusat pada tiga lembaga yaitu : keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam proses pembentukan masyarakat yang berkualitas.

Tugas utama sekolah yaitu berupaya untuk menciptakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien untuk mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang memuaskan.³⁶ Tanpa menyentuh aspek ini, maka organisasi sekolah tidak akan mempunyai arti penting dalam melaksanakan pendidikan. Beberapa penelitian tentang sekolah yang efektif selalu terkait dengan proses organisasi menemukan pentingnya peran manajemen sekolah dalam menciptakan iklim, kultur, dan etos kerja sekolah yang efektif. Komponen iklim, kultur dan ethos kerja sekolah mampu menciptakan keefektifan proses pendidikan.

Sekolah sebagai sistem sosial (Hanson, 1991)³⁷ adalah suatu upaya untuk memahami tujuan, peran ,hubungan dan perilaku berbagai komponen pendidikan di sekolah dalam seting sosial. Setidak-tidaknya ada dua elemen dasar yaitu: 1) institusi, peran dan harapan dalam menentukan norma bersama

³⁶ Campbell, Roald, F., Cobally, J, dan Nystrand, Rael, O. 1983. *Intruduction To Educational Administration*: Toronto. Allyn and Becon, 1983, p.

³⁷ Hanson, Mark, E. *Education Administration and Organizational Behavior*:London. Allyen and Bacon, 1991. p. 13

atau dimensi sosial, 2) individual, personalitas dan pemenuhan kebutuhan yang merupakan dimensi psikologis. Di sini sekolah sebagai sistem sosial diharapkan mampu mencapai moral kerja anggota organisasi yang efektif, efisien dan memuaskan melalui integrasi kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi.

Sekolah sebagai birokrasi di mana terjadi ada formalisasi, standarisasi, rasionalisasi, efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan aktivitas organisasi. Tingkat birokrasi sekolah mungkin berbeda dengan birokrasi pemerintah, militer dan industri lainnya, yang menuntut persyaratan cukup ketat dalam proses pengelolaan. Berbeda dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang tidak tampak (*intangible*) berupa meningkatnya keefektifan pembelajaran serta berpengaruh pada terjadinya peningkatan prestasi siswa. Sekolah sebagai tempat pelayanan pendidikan menghadapi keragaman tingkat perkembangan bakat, minat dan intelektual siswa. Kondisi organisasi sekolah ini membutuhkan sistem birokrasi sekolah terstandar, yang terorganisir secara sistematis dan sistemik.³⁸

Pelaksanaan pendidikan di sekolah merupakan aktivitas yang membutuhkan proses yang terorganisir secara sistematis, sistemik, terencana dan terprogram dengan tingkat elastisitas tinggi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari berbagai komponen seperti guru, siswa, kurikulum dan sarana-prasarana untuk terjadinya sebuah interaksi edukatif. Semua komponen tersebut merupakan sub sistem yang saling terkait, menguatkan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu komponen yang tidak terorganisir secara efektif dan efisien berakibat pada komponen lainnya.

Berbeda dengan organisasi industri dan jasa lainnya, bahwa sekolah mempunyai karakteristik khusus baik menyangkut misi, tujuan dan orientasinya. Sekolah sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pengajaran dan pembelajaran terfokus pada peningkatan kualitas intelektual. Proses pendidikan menjadi perhatian utama dalam sistem organisasi sekolah. Sehingga semua aktivitas sekolah diarahkan untuk meningkatkan prestasi siswa, baik berkaitan dengan harapan jangka pendek (*out put*) atau jangka panjang (*out come*) terhadap lulusannya. Sistem organisasi sekolah tidak menerapkan prinsip ekonomis dengan pencapaian keuntungan ekonomi yang tinggi. Tapi yang menjadi nilai kuntungan sekolah yaitu bersifat non-profit, berupa keefektifan dan efisiensi sekolah dan meningkatnya prestasi siswa dari tahun ke tahun.

Organisasi sekolah sebagai lembaga non-profit dalam bidang pendidikan, belakangan ini, menjadi perhatian semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pendidikan. Lebih-lebih, sekolah merupakan sistem sosial yang tidak

³⁸ Ibid

lepas dari lingkungan yang dimilikinya. Keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak lepas dari peran semua komponen pendidikan. Dalam tinjauan administratif bahwa sekolah sebagai sistem sosial berlangsung struktur birokrasi yang dengan karakteristik khusus yaitu; 1) berorientasi tujuan; sekolah mempunyai tujuan, 2) Struktur hirarkis; kekuasaan yang ada secara formal antara atasan dan bawahan yang jelas, 3) Struktur organisasi; fungsi dan proses yang dipahami dalam hubungan peran dan prosudur untuk mengatur dan mengevaluasi aktifitas organisasi.

Sekolah sebagai organisasi tentu tidak lepas dari berbagai aktifitas yang berkaitan dengan upaya menciptakan efisiensi dan keefektifan pencapaian tujuan pendidikan. Atas dasar inilah sekolah membutuhkan pendekatan organisasi yang memungkinkan bagi terciptanya iklim dan budaya sekolah yang mendukung tercapainya proses pembelajaran yang baik. Sementara sekolah dipahami seperti organisasi industri akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi proses pendidikan itu sendiri. Hal ini didasarkan pada tingginya unsur manusiawi dalam sekolah; bangunan kelembagaan harus ditujukan pada terjadinya peningkatan kualitas peserta didik. Sehingga faktor manajerial dan pembelajaran harus mengarah pada meningkatnya proses dan mutu lulusan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya hendaknya mengarah pada terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga sasaran utama dari sekolah untuk meningkatkan pengembangan intelektual dan emosional siswa dapat tercapai dengan baik.

Akhir-akhir ini bahwa sekolah berkembang menjadi sistem organisasi yang lebih maju seiring terjadinya perubahan paradigma organisasi modern. Apabila organisasi dengan pendekatan manajemen ilmiah dan birokrasi menekankan pada distribusi kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) kepada semua unit organisasi yang sangat birokratis, maka pendekatan terbaru dewasa ini lebih terfokus pada membangun budaya sekolah (*school culture*) dan sistem birokrasi yang fleksibel namun tetap mengarah pada upaya tercapainya tujuan pendidikan. Sekolah tidak lagi sebagai sebuah organisasi dengan komponen-komponen internal semata, tapi juga sangat dipengaruhi dengan aspek lingkungan sekitarnya. Sehingga pendekatan baru dalam meningkatkan kualitas manajemen sekolah menjadi kebutuhan utama yang diakibatkan oleh perkembangan paradigma tentang pendidikan dan sekolah itu sendiri.³⁹

Pentingnya organisasi sekolah yang efektif berangkat dari adanya perubahan paradigma sekolah sebagai lembaga pendidikan yang membutuhkan pengorganisasian secara profesional. Sekolah sebagai lembaga

³⁹ Preedy, Margaret. *Managing The Effective School*. London. Open University , 1993. p. 19

pendidikan hendaknya memperhatikan tugas utama yaitu untuk memberikan layanan pendidikan kepada siswa. Untuk menciptakan sekolah agar menjadi organisasi yang efektif dan efisien maka dibutuhkan upaya-upaya manajemen yang sesuai dengan konteks budaya sekolah, dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sehingga, dalam konteks ini, kualitas guru, kepemimpinan kepala sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat perlu mempunyai peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan keefektifan manajemen sekolah.

Perbaikan mutu di sekolah mempunyai tantangan agar bagaimana semua anggota mendidikasikan diri pada perbaikan mutu unjuk kerja (*performance quality improvement*) dan perbaikan terus menerus (*conitnous improvement*). Perbaikan mutu unjuk kerja di sekolah akan memberikan pengaruh pada peningkatan kemampuan profesional masing-masing anggota dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perbaikan terus menerus yang dilakukan di sekolah akan menjadikan sekolah selalu respon terhadap berbagai inovasi kependidikan dan ilmu pengetahuan. Sekolah harus memperbaiki atau memperbaharui pola manajemen pendidikan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Di sini kepala sekolah, guru, siswa, staf, orang tua dan masyarakat (*komite sekolah dan dewan pendidikan*) perlu dilibatkan dalam rangka melakukan peningkatan mutu sekolah, khususnya sistem manajemen sekolah dan proses pembelajaran.

3. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu *Syaraka* yang berarti ikut serta, dan berpartisipasi. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berintegrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang akan memudahkan individu di dalamnya untuk saling berintegrasi. Kesatuan di dalam masyarakat memiliki beberapa unsur seperti kategori sosial, golongan sosial, komunitas kelompok dan perkumpulan.⁴⁰

Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *masyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan

⁴⁰ Diakses dari blog.binadarma.ac.id/anita/wp-content/uploads/2009, 23 Agustus 2013.

hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat *band*, suku, *chiefdom*, dan masyarakat negara.

Adanya sarana untuk berintegrasi menyebabkan warga dari suatu kolektif akan saling berintegrasi. Namun tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berintegrasi itu disebut masyarakat karena masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu yang menjadi sebuah adat istiadat dan bersifat kontiniu. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan yang terikat oleh satu rasa identitas yang sama.

Dari ketiga macam pengaruh lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), kiranya lingkungan masyarakatlah yang cukup sulit dirancang agar selalu memberikan pengaruhnya yang baik untuk perkembangan anak didik. Karena lingkungan masyarakat itu sangat luas dan banyak berbagai pihak yang berperan dalam masyarakat tersebut, sehingga memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang lebih agar suasana lingkungan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pendidikan anak.

Masyarakat yang berperan aktif dalam bidang pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Kelompok ini berupa organisasi-organisasi pendidikan, sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan sebagainya. Semua kelompok ini perlu dilibatkan secara aktif dalam membantu dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengelola atau pihak sekolah hendaknya mampu menganalisis kelompok masyarakat mana yang bisa dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan bahwa orang tua murid dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Partisipasi yang tinggi dari orang tua murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauhmana masyarakat dapat diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah adalah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik (Kumars, 1989). Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini nampaknya memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah, kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Husen (1988) dalam penelitiannya bahwa siswa dapat belajar banyak karena dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan akan berhasil dengan baik berkat usaha orang tua mereka dalam memberikan dukungan.

Penelitian lain yang memperkuat apa yang dikemukakan di atas dinyatakan oleh Levine & Hagigust, (1988) yang menyatakan bahwa Lingkungan keluarga, cara perlakuan orang tua murid terhadap anaknya sebagai salah satu cara/bentuk partisipasi mereka dalam pendidikan dapat meningkatkan intelektual anak. Partisipasi orang tua ini sangat tergantung pada ciri dan kreativitas sekolah dalam menggunakan pendekatan kepada mereka. Artinya masyarakat akan berpartisipasi secara optimal terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat tergantung pada apa dan bagaimana sekolah melakukan pendekatan dalam rangka memberdayakan mereka sebagai mitra penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Hal ini ditegaskan oleh Brownell bahwa pengetahuan masyarakat tentang program merupakan awal dari munculnya perhatian dan dukungan. Oleh sebab itu orang tua/masyarakat yang tidak mendapatkan penjelasan dan informasi dari sekolah tentang apa dan bagaimana mereka dapat membantu sekolah (lebih-lebih di daerah pedesaan) akan cenderung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus melakukan untuk membantu sekolah. Hal tersebut sebagai akibat ketidaktahuan mereka.

Di negara-negara maju, sekolah memang dikreasikan oleh masyarakat, sehingga mutu sekolah menjadi pusat perhatian mereka dan selalu mereka

upayakan untuk dipertahankan. Hal ini dapat terjadi karena mereka sudah meyakini bahwa sekolah merupakan cara terbaik dan meyakinkan untuk membina perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Mengingat keyakinan yang tinggi akan kemampuan sekolah dalam pembentukan anak-anak mereka dalam membangun masa depan yang baik tersebut membuat mereka berpartisipasi secara aktif dan optimal mulai dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah. Nampak mereka selain merasa sebagai pemilik sekolah juga sebagai penanggung jawab atas keberhasilan sekolah. Kondisi ini dapat terjadi karena kesadaran yang tinggi dari masyarakat yang bersangkutan.

Pentingnya keterlibatan orang tua/masyarakat akan keberhasilan pendidikan ini telah dibuktikan kebenarannya oleh Richard Wolf dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan (0.80) antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar. Penelitian lain di Indonesia juga telah membuktikan hal yang sama.

Partisipasi yang tinggi tersebut nampaknya belum terjadi di negara berkembang (termasuk Indonesia). Hoyneman dan Loxley menyatakan bahwa di negara berkembang sebagian besar keluarga belum dapat diharapkan untuk lebih banyak membantu dan mengarahkan belajar murid, sehingga murid di negara berkembang sedikit waktu yang digunakan dalam belajar. Hal ini disebabkan banyak masyarakat/orang tua murid belum paham makna mendasar dari peran mereka terhadap pendidikan anak. Bahkan Made Pidarta menyatakan di daerah pedesaan yang tingkat status sosial ekonomi yang rendah, mereka hampir tidak menghiraukan sekolah dan mereka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah.

Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan itu berlangsung yang terdiri dari masyarakat beserta lingkungan yang ada disekitarnya. Semua keadaan lingkungan tersebut berperan dan memberikan kontribusi terhadap proses peningkatan kualitas pendidikan dan atau kualitas lulusan pendidikan. Perhatian manajer pendidikan/Top Manajemen (Kepala Sekolah) seharusnya adalah berupaya untuk mengintegrasikan sumber-sumber pendidikan dan memanfaatkannya secara optimal mungkin, sehingga semua sumber tersebut memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Salah satu sumber yang perlu dikelola adalah lingkungan masyarakat atau orang tua murid, termasuk stakeholders. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah: Mengapa Manajemen Pendidikan perlu Menangani Masyarakat (perlu Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat), secara optimal baik orang tua murid, stakeholders, tokoh masyarakat maupun institusi yang ada di lingkungan sekolah.

Organisasi sekolah adalah organisasi yang menganut sistem terbuka, sebagai sistem terbuka berarti sekolah mau tidak mau, disadari atau tidak disadari

akan selalu terjadi kontak hubungan dengan lingkungannya yang disebut sebagai supra sistem. Kontak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga itu tidak mudah punah. Suatu organisasi yang mengisolasi diri, termasuk sekolah sebagai organisasi apabila tidak melakukan kontak dengan lingkungannya maka dia lambat laun akan mati secara alamiah (tidak dapat eksis), karena organisasi hanya akan tumbuh dan berkembang apabila didukung dan dibutuhkan oleh lingkungannya. Hanya sistem terbuka yang memiliki megantropy, yaitu suatu usaha yang terus menerus untuk menghalangi kemungkinan terjadinya entropy atau kepunahan. Ini berarti hidup matinya sekolah akan sangat tergantung dan ditentukan oleh usaha sekolah itu sendiri, dalam arti sejauhmana dia mampu menjaga dan memelihara komunikasinya dengan masyarakat luas atau dia mau menjadi organisasi terbuka.

Dalam kenyataan sering kita temui sekolah yang tidak punya nama baik di masyarakat akhirnya akan mati. Hal ini disebabkan karena sekolah itu tidak mampu membuat hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat pendudkungnya. Dengan berbagai alasan masyarakat tidak mau menyekolahkan anaknya di suatu sekolah, yang akhirnya membuat sekolah itu mati dengan sendirinya. Demikian pula sebaliknya sekolah yang bermutu akan dicari bahkan masyarakat akan membayar dengan biaya mahal asalkan anaknya diterima di sekolah tersebut. Adanya sekolah favorit dan tidak favorit ini nampaknya sangat terkait dengan kemampuan kepala sekolah mengadakan pendekatan dan hubungan dengan para pendukungnya di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh pengusaha, tokoh agama dan tokoh politik atau tokoh pemerintahan (stakeholders).

Karena itu sejak lama Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung pada tiga lingkungan yaitu lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Konsep ini diperkuat oleh kebijakan pemerintah bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Artinya pendidikan tidak akan berhasil kalau ketiga komponen itu tidak saling bekerjasama secara harmonis. Kaufman menyebutkan patner/mitra pendidikan tidak hanya terdiri dari guru dan siswa saja, tetapi juga para orang tua/masyarakat.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa sekolah bukanlah lembaga yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan putra-putra bangsa, melainkan ia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang luas, dan bersama masyarakat membangun dan meningkatkan segala upaya untuk memajukan sekolah. Hal ini akan dapat dilakukan apabila masyarakat menyadari akan pentingnya peranan mereka dalam sekolah. Hal ini dapat tercipta apabila sekolah mau membuka diri dan menjelaskan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam upaya membantu sekolah/sekolah memajukan dan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan.

Ada hubungan saling menguntungkan antara sekolah dengan masyarakat, yaitu dalam bentuk hubungan saling memberi, saling melengkapi dan saling menerima sebagai patner yang memiliki kedudukan setara.

Sekolah pada hakekatnya melaksanakan dan mempunyai fungsi ganda terhadap masyarakat, yaitu memberi layanan dan sebagai agen pembaharuan bagi masyarakat sekitarnya, yang oleh Stoop disebutnya sebagai fungsi layanan dan fungsi pemimpin (fungsi untuk memajukan masyarakat melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas).

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembaharu terhadap masyarakat maka sekolah mau tidak mau atau suka tidak suka harus mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan peranannya agar pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikul oleh sekolah akan menjadi ringan.

Setiap aktivitas pendidikan, apalagi yang bersifat inovatif, seharusnya dikomunikasikan dengan masyarakat khususnya orang tua siswa, agar merka sebagai salah satu penanggung jawab pendidikan menegrti mengapa aktoivitas tersebut harus dilakukan oleh sekolah dan pada sisi mana mereka dapat berperan membantu sekolah dalam merealisasikan program inovatif tersebut.

Dengan hubungan yang harmonis tersebut ada beberapa manfaat pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat (*School Public Relation*) yaitu:

Bagi Sekolah/sekolah.

1. Memperbesar dorongan mawas diri, sebab seperti diketahui pada saat dengan berkembangnya konsep pendidikan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan dari masyarakat serta mulai berkembangnya impelementasi manajemen berbasis sekolah, maka pengawasan sekolah khususnya kualitas sekolah akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat antara lain melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Memudahkan/meringankan beban sekolah dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Hal ini akan tercapai apabila sekolah benar-benar mampu menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan dan peningkatan sekolah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sekolah yang berkembang dan berkualitas baik apabila tidak mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat lingkungannya. Masyarakat akan mendukung sepenuhnya serta membantunya apabila sekolah mampu menunjukkan kinerja yang berkualitas.
3. Memungkinkan upaya peningkatan profesi mengajar guru. Melalui hubungan yang erat dengan masyarakat, maka profesi guru akan semakin mudah untuk tumbuh dan berkembang. Sebab pada dasarnya laboratorium terbaik bagi sekolah seperti sekolah adalah masyarakatnya

sendiri. Demikian pula laboratorium profesi guru yang professional akan dibuktikan oleh masyarakatnya.

4. Opini masyarakat tentang sekolah akan lebih positif/benar. Opini yang positif akan sangat membantu sekolah dalam mewujudkan segala program dan rencana pengembangan sekolah secara optimal, sebab opini yang baik merupakan modal utama bagi sekolah untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Bantuan masyarakat hanya akan lahir apabila mereka memiliki opini dan persepsi yang positif tentang sekolah. Karena itu keterbukaan, kebersamaan dan komitmen bersama perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan sekolah.
5. Masyarakat akan ikut serta memberikan kontrol/koreksi terhadap sekolah, sehingga sekolah akan lebih hati-hati.
6. Dukungan moral masyarakat akan tumbuh terhadap sekolah sehingga memudahkan mendapatkan bantuan material dari masyarakat dan akan memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai sumber belajar termasuk nara sumber yang ada dalam masyarakat.

Bagi Masyarakat, dengan adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dengan masyarakat maka:

1. Masyarakat/orang tua murid akan mengerti tentang berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan di sekolah
2. Keinginan dan harapan masyarakat terhadap sekolah akan lebih mudah disampaikan dan direalisasikan oleh pihak sekolah.
3. Masyarakat akan memiliki kesempatan memberikan saran, usul maupun kritik untuk membantu sekolah menciptakan sekolah yang berkualitas.

C. Hubungan Sekolah Dengan Tri Pusat Pendidikan

Tri pusat pendidikan hanya dapat dibahas terpisah-pisah secara teoritis, namun realitanya secara simultan dan terpadu saling memberikan pengaruh timbal-balik dan tidak dapat dipilah-pilah.

Hubungan pengaruh timbal balik antara tingkat partisipasi masyarakat dengan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah, menuntut adanya jalinan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Jalinan hubungan yang dimaksud, realisasinya bisa diwujudkan di dalam berbagai bentuk dan jalinan. Beberapa bentuk atau cara yang telah dikenal, adalah: *open door politics*, atau pemberian kesempatan kepada orang tua murid berkunjung ke sekolah untuk membicarakan masalah khusus yang terjadi pada anaknya; *home visiting* atau kunjungan sekolah ke rumah murid; penggunaan *resources persons*, kunjungan sekolah ke objek-objek tertentu di masyarakat, pertemuan antara orang tua murid dan warga sekolah, serta pengadaan serta mengefektifkan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Sedangkan secara umum Indrafachrudi⁴¹ teknik penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu teknik: (1) *Pertemuan kelompok*, berupa seminar, lokakarya, sarasehan, dsb. Ragam unsur masyarakat yang dilibatkan di dalam kegiatan ini tergantung dari tema yang sedang dibahas. (2) *Tatap muka*, pihak sekolah dapat memanggil orang tua siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kemampuan lebih, yang perlu pembinaan bersama agar kemampuannya dapat berkembang secara maksimal. (3) *Observasi dan partisipasi* masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah, agar masyarakat tersebut mengetahui secara langsung hambatan dan faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan, mengetahui keberhasilan sekolah, sehingga diharapkan bersedia membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah. dan (4) *Surat menyurat* dengan berbagai pihak yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Seiring dengan perkembangan teknologi, sekolah dapat menerapkan teknik ini dengan menggunakan alat-alat komunikasi berupa telepon, fax, internet, e-mail, dsb.

Dengan adanya kerja sama tersebut, para guru akan dapat memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan sifat anak-anaknya yang sangat besar gunanya bagi guru dalam memberikan pelajaran dan pendidikan terhadap murid-muridnya. Sebaliknya, orang tua juga memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya sehingga dapat mengetahui kesulitan-kesulitan manakah yang sering dihadapi anak-anaknya di sekolah. Orang tua dapat mengetahui apakah anaknya itu rajin, malas, bodoh, suka mengantuk, atau pandai, dan sebagainya. Dengan demikian, orang tua dapat menjauhkan pandangan dan pendapat yang keliru sehingga terhindarlah salah pengertian yang mungkin timbul antara keluarga dan sekolah.

Maisyaroh (2003) mengelompokkan masyarakat secara umum, yaitu:⁴² (1) Masyarakat orang tua, adalah gabungan dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu; (2) Masyarakat yang terorganisasi dalam organisasi tertentu; dan (3) Masyarakat luas yang terdiri dari individu-individu yang tidak terkait secara langsung terhadap penyelenggaraan program pendidikan.

Kenyataan di Indonesia, dari sekian kelompok tersebut yang paling aktif perannya adalah masyarakat orang tua siswa. Sedangkan masyarakat terorganisasi dan masyarakat luas sudah berperan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan namun masih belum optimal. Perhatian orang tua itupun

⁴¹ Indrafachrudi, S. *Bagaimana Mengkrabkan Sekolah dengan Orangtua Murid dan Masyarakat*. Malang: IKIP Malang, 1994. h. 67

⁴² Maisyaroh. *Manajemen Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Dalam, Imron, A., Maisyaroh, dan Burhanuddin (Eds.), *Manajemen Pendidikan: Analisis Substansi dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: UM Press, 2003, h. 121-128

hanya ditujukan pada lembaga pendidikan tempat anaknya bersekolah, sementara lembaga pendidikan yang lain di luar perhatiannya.

Kelompok terorganisasi di Indonesia yang bisa diajak kerjasama antara lain anggota kelompok dari pengelola perusahaan, DPR, dewan pendidikan, komite sekolah, majelis madrasah, kelompok layanan kesehatan, kelompok agama, pengelola televisi, radio, bank, kantor pos/giro, LSM, dan sebagainya.

Wujud kerjasama sekolah dengan kelompok terorganisasi di atas berupa pemberian beasiswa, pembangunan gedung dan pembelian fasilitas sekolah, peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru dan pegawai sekolah (pelatihan, seminar dan lokakarya), bantuan pengembangan pembelajaran, bantuan publikasi dan penayangan kegiatan sekolah. Pelaksanaan kerjasama ini menuntut pihak sekolah lebih proaktif dalam menjalin kerjasama sehingga kelompok terorganisasi yang ada mau dan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas sekolah. Sekolah juga perlu mewaspadaai kemungkinan usaha-usaha negatif dari kelompok yang bersedia diajak kerjasama, tetapi berusaha untuk mengeksploitasi keberadaan sekolah serta berusaha mengkritik dan menyerang sekolah dengan tujuan untuk menjatuhkan kebijakan sekolah. Misalnya suatu perusahaan bersedia menjadi donatur penyelenggaraan suatu sekolah dengan syarat agar siswa mau menggunakan produk perusahaan tersebut, sementara produk tersebut kalau dikonsumsi siswa dapat membahayakan perkembangannya, dapat merusak masa depan siswa. Kalau terjadi usaha-usaha yang demikian maka pihak sekolah, dalam hal ini pimpinan sekolah, perlu tanggap dengan cara menganalisis motif di balik pemberian dana tersebut dan memecahkan masalahnya secara bijaksana.

Peningkatan kontribusi setiap pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik memerlukan keserasian serta kerja sama yang erat dan harmonis antar tripusat pendidikan (lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat). Berbagai upaya perlu diusahakan dan dilakukan agar program-program pendidikan dari setiap pusat pendidikan tersebut dapat saling mendukung dan memperkuat satu dengan lainnya.

Dalam lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal (seperti perbaikan gizi, permainan edukatif, dan sebagainya) yang dapat menjadi ladan untuk pelaksanaan pengembangan pendidikan selanjutnya di sekolah dan masyarakat. Pada lingkungan sekolah diupayakan berbagai hal yang lebih mendekatkan hubungan sekolah dengan orang tua siswa, misalnya melalui organisasi orang tua siswa, kunjungan guru ke rumah orang tua murid atau sebaliknya kunjungan orang tua murid ke sekolah, dan sebagainya.

Selanjutnya, sekolah juga mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat sekitarnya (seperti menerjunkan siswa ke masyarakat, mendatangkan nara sumber dari masyarakat ke sekolah, dan sebagainya). Akhirnya lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan atau program yang menunjang serta melengkapi program pendidikan di lingkungan

keluarga dan sekolah. Dengan adanya kontribusi tripusat pendidikan yang saling memperkuat dan saling melengkapi tersebut, maka diharapkan akan memberikan peluang untuk mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu.

Sementara itu, Unruh (1974) mengelompokkan masyarakat menurut hubungannya dengan sekolah. Kelompok tersebut adalah: (1) *Immadiate* (pihak yang sangat cepat berhubungan dengan sekolah yaitu siswa, guru, dan orang tua siswa); (2) *Associated* (pihak yang tertarik pada sekolah); (3) *Disassociated* (pihak yang tidak tertarik dengan sekolah); dan (4) *Institusionalized* (lembaga umum).⁴³

Kehidupan manusia sejak lahir sampai akhir hayat tidak dapat terlepas dari berbagai pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar dirinya. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat mengarah positif maupun negatif yang berasal dari tiga lingkungan pendidikan (*Tri Pusat Pendidikan*) yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga lingkungan pendidikan berperan menjadi pusat berlangsungnya pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Tri pusat pendidikan hanya dapat dibahas terpisah-pisah secara teoritis, namun realitanya secara simultan dan terpadu saling memberikan pengaruh timbal-balik dan tidak dapat dipilah-pilah. Peningkatan kontribusi setiap pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik memerlukan keserasian serta kerja sama yang erat dan harmonis antar tri pusat pendidikan.

Sekolah tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pendidikannya dengan lancar tanpa adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat. Sehingga pihak sekolah hendaknya mampu menganalisis kelompok masyarakat mana yang bisa dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan di sekolah. Kreativitas pihak sekolah/pengelola pendidikan dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama sekolah dengan lingkungan keluarga/orang tua siswa dan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah.

BAB VI ISU-ISU KRITIS DAN

⁴³ Unruh, A. & Willer, R.A. 1974. *Public Relations for School*. Belmont California: Liar Siagler Inc./ Fearon Publishers.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN**A. Isu-isu Kritis Pendidikan**

Permasalahan pendidikan merupakan suatu kendala yang menghalangi tercapainya tujuan pendidikan. Istilah permasalahan pendidikan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu "problem". Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi Permasalahan pendidikan adalah segala-sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Permasalahan Pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Program utama pengembangan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan
- b. Peningkatan mutu pendidikan
- c. Peningkatan relevansi pendidikan
- d. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pendidikan
- e. Pengembangan kebudayaan
- f. Pembinaan generasi muda

Adapun masalah yang dipandang sangat rumit dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut.

- a. Pemerataan
- b. Mutu dan Relevansi
- c. Efisiensi dan efektivitas

Setiap masalah yang dihadapi disebabkan oleh faktor-faktor pendukungnya adapun faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya 4 masalah di atas adalah sebagai berikut.

- a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- b. Laju Pertumbuhan penduduk
- c. Kelemahan guru/dosen (tenaga pengajar) dalam menangani tugas yang dihadapinya, dan ketidakfokusan peserta didik dalam menjalani proses pendidikan (Permasalahan Pembelajaran).

1. Pemerataan Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan

pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, amupun letak lokasi geografis.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerataan Pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi.

Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.

2. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkutan paut, kait mangait, dan berguna secara langsung.

Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan

lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan.

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi untuk penyempurnaan proses dan hasil pendidikan.

Selain itu, kurikulum sekolah yang terstruktur dan sarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreatifitas siswa untuk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif.

Akibat dari pelaksanaan pendidikan tersebut adalah menjadi sekolah cenderung kurang fleksibel, dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan waktu dan masyarakat. Pada pendidikan tinggi, pelaksanaan kurikulum ditetapkan pada penentuan cakupan materi yang ditetapkan secara terpusat, sehingga perlu dilaksanakan perubahan kearah kurikulum yang berbasis kompetensi, dan lebih peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar.

Melihat permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah kerja sama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dilihat jika suatu lembaga tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian atau industri, maka kualitas dan mutu dari peserta didik dapat ditingkatkan, khususnya dalam bidang akademik seperti tekonologi industri.

3. Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan

Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektifitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila

sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumberdaya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga dan sebagainya.

Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumberdaya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.

Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana / program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif.

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kualitas SDM yang mantap. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran.

Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan menghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk mengahdapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi dikalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ini akan lebih bermanfaat dalam usaha penghematan waktu dan tenaga.

B. Faktor Pendukung Masalah Pendidikan

Masalah pokok pendidikan akan terjadi di dalam dalam bidang pendidikan itu sendiri. Jika di analisis lebih jauh, maka sesungguhnya permasalahan pendidikan berkaitan dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah itu. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan permasalahan pokok pendidikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. IPTEK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini berdampak pada pendidikan di Indonesia. Ketidaksiapan bangsa menerima perubahan zaman membawa perubahan terhadap mental dan keadaan negara ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan telah membentuk teknologi baru dalam segala bidang, baik bidang social, ekonomi, hokum, pertanian dan lain sebagainya.

Sebagai negara berkembang Indonesia dihadapkan kepada tantangan dunia global. Dimana segala sesuatu dapat saja berjalan dengan bebas. Keadaan seperti ini akan sangat mempengaruhi keadaan pendidikan di Indonesia. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan, menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah, hal ini sangat menuntut kesiapan SDM Indonesia untuk menjalankannya.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan.

Tetapi apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik.

Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, Indonesia dihadapkan kepada masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Tidak heran jika perencanaan, sarana dan prasarana pendidikan di suatu daerah terpencil tidak terkoordinir dengan baik. Hal ini diakibatkan karena lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah tersebut. Keadaan seperti ini adalah masalah lainnya dalam bidang pendidikan.

Keterkaitan antar masalah ini akan berdampak kepada keadaan pendidikan Indonesia.

3. Permasalahan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan belajar adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dalam kegiatan belajar formal ada dua subjek yang

berinteraksi, yaitu pengajar/pendidik (guru/dosen) dan peserta didik (murid/siswa, dan mahasiswa).

Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, dimana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik. Sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan.

Guru / dosen yang berpandangan kuno selalu menganggap bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan materi, sedangkan tugas siswa/mahasiswa adalah mengerti dengan apa yang disampaikan. Bila peserta didik tidak mengerti, maka itu adalah urusan mereka. Tindakan seperti ini merupakan suatu paradigma kuno yang tidak perlu dipertahankan.

Dalam hal penilaian, Pendidik menempatkan dirinya sebagai penguasa nilai. Pendidik bisa saja menjatuhkan, menaikan, mengurangi dan mempermainkan nilai perolehan murni seorang peserta didik. Pada satu kasus di pendidikan tinggi, dimana seorang dosen dapat saja memberikan nilai yang diinginkan kepada mahasiswa tertentu, tanpa mengindahkan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Proses penilaian seperti sungguh sangat tidak relevan.

BAB VII

PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Meningkatkan SDM yang Berkualitas

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang diharapkan menghasilkan pendidikan yang produktif, yaitu efektif dan efisien, memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital dalam berbagai dimensi kehidupan yang berlaku untuk kurun waktu yang cukup di mana manusia hidup.

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang mampu bersaing di lapangan kerja yang ada dan yang diperlukan. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Agar pendidikan dapat memainkan perannya maka harus terkait dengan dunia kerja, artinya lulusan pendidikan semestinya memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Hanya dengan cara ini, pendidikan mempunyai kontribusi terhadap ekonomi.

Mengenai relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan dalam bentuk *link and match*, pada kenyataannya pendidikan telah sesuai dengan keperluan masyarakat yang sedang membangun. Pendidikan sampai saat ini dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan SDM. SDM lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Manusia akan dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas betapa pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global).

Berbagai fenomena kehidupan dalam segala dimensi, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik yang terjadi di sekitar kita menunjukkan gambaran yang semakin jelas bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki akhirnya akan menjadi tidak berarti apabila kita tidak mampu memanfaatkannya. Hal ini bermula dari persoalan rendahnya kualitas SDM.

Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang

umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM.

Jika abad silam disebut abad kualitas produk/jasa, maka masa yang akan datang merupakan abad kualitas SDM. SDM yang berkualitas dan pengembangan kualitas SDM bukan lagi merupakan isu atau tema-tema retorika, melainkan merupakan taruhan atau andalan serta ujian setiap individu, kelompok, golongan masyarakat, dan bahkan setiap bangsa.

Pengembangan SDM adalah proses sepanjang hayat yang meliputi berbagai bidang kehidupan, terutama dilakukan melalui pendidikan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, peningkatan kualitas SDM lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas proses produksi dan mempertahankan keseimbangan ekonomi.

Pengembangan SDM berkualitas adalah proses kontekstual, sehingga pengembangan SDM melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan dunia kerja pada saat ini, melainkan juga manusia yang mampu, mau, dan siap belajar sepanjang hayat.

Program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan memberi manfaat pada organisasi berupa produktivitas, moral, efisiensi, efektivitas, dan stabilitas organisasi dalam mengantisipasi lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar organisasi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Perencanaan SDM yang berkualitas, dalam Malaysia's 2020 merumuskan beberapa kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat global yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kualitas SDM. Kecenderungan tersebut adalah: (1) Dibandingkan dengan dasawarsa 1970-an dan 1980-an, tiga dasawarsa mendatang diperkirakan akan terjadi eksplosi yang hebat, terutama yang menyangkut teknologi informasi dan bio-teknologi. Dalam konteks peningkatan kualitas SDM, implikasi yang dapat diangkat adalah para ilmuwan harus bekerja dalam pendekatan multidisipliner dan adanya program pendidikan berkelanjutan (S2/S3), dan (2) Eksplosi teknologi komunikasi yang semakin canggih dapat mempersingkat jarak dan mempercepat perjalanan. Hal ini akan membuat bangsa yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang relevan dan menguasai teknologi baru secara substantif mampu meningkatkan produktivitasnya.

Program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan memberikan manfaat pada lembaga berupa produktivitas, moral, efisiensi kerja, stabilitas, serta fleksibilitas lembaga dalam mengantisipasi lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar lembaga yang bersangkutan. Fungsi dan orientasi pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM telah dibuat dalam suatu kebijakan Depdiknas dalam tiga strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu: (1) pemerataan kesempatan pendidikan, (2) peningkatan relevansi dan kualitas

pendidikan, dan (3) peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Untuk melaksanakan ketiga strategi pokok pembangunan pendidikan tersebut di atas, seyogyanya dilihat bagian-bagian sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan orientasi masing-masing dan dijabarkan dalam rencana dan prioritas pembangunan pendidikan.

Titik tolak pemikiran mengenai orientasi pendidikan nasional adalah: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mempersiapkan SDM yang berkualitas, terampil, dan ahli yang diperlukan dalam proses memasuki era globalisasi dan otonomi daerah, dan (3) membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada saat ini, Indonesia menghadapi masalah yang sifatnya multidimensi yang menuntut pemecahan segera. Masyarakat yang mutu SDM-nya rendah, cenderung tidak akan mampu memecahkan masalahnya. Berbeda dengan masyarakat yang mutu SDM-nya tinggi, mereka memiliki potensi untuk memecahkan masalahnya, serta mampu merumuskan pola pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.



Perkembangan masyarakat industri dan pasca industri Indonesia akan sekaligus berada di bawah pengaruh empat proses perkembangan sosial-ekonomi yang mendasar pada abad ke-21, bahkan sesungguhnya sudah mulai

dalam tiga dekade terakhir abad ke-20. Keempat proses perkembangan sosial-ekonomi yang mendasar, perlu dipahami karena dampaknya dapat mempengaruhi seluruh tata kehidupan bangsa Indonesia terutama pada abad ke 21 ini. Keempat proses itu meliputi: (1) globalisasi; (2) industrialisasi; (3) asianisasi; dan (4) sistem informasi canggih, serta akibat utama yang ditimbulkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. 1
Akibat Utama Globalisasi, Industrialisasi,
Asianisasi,dan Informasi Canggih

No.	Proses	Akibat Utama
1.	Globalisasi	<input type="checkbox"/> Keterbukaan <input type="checkbox"/> Demokratisasi <input type="checkbox"/> Persaingan dalam konteks kerja sama
2.	Industrialisasi	<input type="checkbox"/> Rasionalitas <input type="checkbox"/> Dominan Kecerdasan Intelektual (KI) <input type="checkbox"/> Sekularisme
3.	Asianisasi	<input type="checkbox"/> Percaya diri Asia <input type="checkbox"/> Pengaruh budaya Asia ke Barat dan bagian lain dunia
4.	Sistem Informasi Canggih	<input type="checkbox"/> Kesaratderasan informasi <input type="checkbox"/> Perkembangan KI dan KE <input type="checkbox"/> Simplikasi,efisiensi,dan efektifitas dalam komunikasi <input type="checkbox"/> Bahasa menjadi kebutuhan pokok <input type="checkbox"/> Kemandirian memperoleh pengetahuan <input type="checkbox"/> Perubahan sifat lembaga-lembaga pendidikan,khususnya Perguruan Tinggi

Berkaitan dengan keempat proses tersebut, tantangan utama bagi kita ialah bagaimana Indonesia mempersiapkan diri agar keempat proses itu bermanfaat semaksimal mungkin bagi seluruh rakyat Indonesia dalam meningkatkan mutu kehidupan. Sebab suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, arus globalisasi mengharuskan kita terlibat dalam proses saling berhubungan yang sifatnya mendunia, baik antar individu, bangsa, negara, organisasi kemasyarakatan, terutama dunia usaha. Dan disinilah aktualisasi pendidikan harus memperoleh

porosi dan perhatian yang tinggi agar mampu melahirkan SDM yang berkualitas. Karena dalam era globalisasi yang bercirikan persaingan, kemenangan akan ditentukan oleh mutu sumber daya manusia.

Setelah menelaah beberapa uraian di atas, jelaslah bahwa untuk melaksanakan tugas di masa depan diperlukan SDM yang berkualitas yaitu SDM berkualitas yang harus disiapkan untuk memasuki abad ke-21 adalah SDM yang mampu melakukan *life long learning*. Hal ini tampak dengan jelas pada sebagian SDM kita yang terus-menerus menimba ilmu dengan tidak memikirkan usia. Makin tua usia SDM tersebut, makin matang pula cara berpikirnya, ini dibantu oleh pengalaman yang banyak, baik di dalam maupun di luar dinas.

Dalam hubungan ini, patut diperhatikan bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan SDM yang berkualitas, bahkan sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan, sehingga kita dapat mengikuti suatu wacana yang menegaskan: *Development stands or falls with the improvement of human and institutional competence*. Secara lebih arif dapat disimpulkan bahwa pendidikan bermutu menghasilkan SDM bermutu dan merupakan kata kunci dari keberhasilan pembangunan.

Human investment melalui pendidikan bermutu, akan melahirkan SDM bermutu yang pada akhirnya membawa Indonesia dapat melakukan persaingan dalam konteks kerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

Bukti menunjukkan bahwa era krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, ternyata Malaysia, Singapura, dan Thailand jauh lebih cepat keluar dari krisis tersebut, sedangkan Indonesia hingga saat ini masih menghadapi krisis yang makin terpuruk, dan malah ditambah dengan krisis-krisis sosial, politik, disintegrasi, konflik sosial horizontal, yang sifatnya multidimensi.

Hal ini terjadi karena SDM di negara-negara tersebut jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan Indonesia. Kita masih ingat bahwa pada tahun 1960 yaitu permulaan kemerdekaan Malaysia, guru-guru MIPA dari Indonesia banyak mengajar di Malaysia, tetapi saat ini telah banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Perguruan Tinggi Malaysia pada tingkat sarjana, bahkan Pascasarjana. Ini suatu bukti bahwa pemerintah Malaysia memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan sebagai *Human investment* serta menyediakan anggaran yang cukup untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu termasuk perhatian terhadap gaji dan kesejahteraan tenaga kependidikannya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah pemerintah telah memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan sektor pendidikan ini? Dan sejauh mana pemerintah telah menunjukkan kemauan politiknya untuk menjamin kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mereka dapat berkonsentrasi untuk memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didiknya?

Secara jujur harus diakui bahwa pada permulaan pemerintahan orde baru, pemerintah telah banyak membangun gedung-gedung sekolah mulai dari Sekolah Dasar, SLTP, SLTA, sampai Perguruan Tinggi. Akan tetapi sasarannya lebih menekankan pembangunan material, belum mengacu kepada pembangunan sektor pendidikan yang berorientasi kepada mutu lulusan, apalagi peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai unsur pendidikan yang perlu memperoleh perhatian. Hal ini dimungkinkan karena pada waktu itu pemerintah memperoleh dana yang cukup besar dari hasil kenaikan harga minyak.

Semua departemen berlomba membangun gedung-gedung yang mewah baik di pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, sampai Kecamatan. Dan malah ada yang mubazir, seperti gudang Dolog pada tingkat kecamatan yang tidak pernah digunakan karena di samping lokasinya tidak tepat juga karena tidak merespon kebutuhan masyarakat. Banyak gedung SD Inpres tidak mempunyai murid karena dibangun di lokasi yang sudah ada bangunan SD-nya. Orang-orang daerah sangat bangga melihat Jakarta yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit serta pesatnya pembangunan jembatan layang. Akan tetapi mereka bertanya mengapa di daerah yang banyak sungainya, jembatan tidak dibangun, sementara di Jakarta yang tidak ada sungainya malah ada jembatan layangnya. Inilah beberapa kasus-kasus pembangunan, yang menjadikan pembangunan material sebagai prioritas sementara pembangunan SDM-nya terlupakan.

Perubahan peran pemerintah pusat sebagai pemeran utama dalam peningkatan mutu pendidikan dengan konsep “segalanya harus dari dan oleh pemerintah” seperti kita alami dalam 55 tahun terakhir ini, kini mulai digeser ke arah konsep “dari, oleh, dan untuk rakyat” dalam wujud tanggung jawab kolaboratif dan usaha sinergistik dari masyarakat (individu, kelompok, dan lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik), pemerintah daerah (legislatif, eksekutif), dunia usaha, dan pemerintah pusat. Kata kunci dari tatanan kolaboratif dan sinergistik itu adalah “komitmen dan tanggung jawab” yang secara konseptual merupakan ciri dari *the ethos of democracy*.

Dengan etos tersebut, semua unsur yang berkepentingan dengan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan *stakeholders* seyogyanya memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah daerah, karena memang merupakan lembaga publik yang formal, tentu saja perannya sebagai fasilitator pengembangan pendidikan di daerah tidak bisa dipungkiri. Dengan demikian komitmen dan tanggungjawab semua unsur dapat tumbuh dan berkembang menjadi etos kerja demokratisasi pendidikan.

Selanjutnya akan dibahas isu-isu penting yang berkenaan dengan komitmen dan tanggungjawab daerah dalam pengembangan pendidikan, antara lain: siapa saja yang menjadi *stakeholder* pendidikan di daerah, urusan

pendidikan apa saja yang kini menjadi tanggung jawab daerah, faktor-faktor apa saja yang memberi kontribusi terhadap mutu pendidikan, bagaimana menggerakkan potensi daerah untuk pengembangan pendidikan, serta bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan komitmen dan tanggung jawab daerah terhadap mutu pendidikan.

Siapa “Stakeholder” Pendidikan di Daerah?

Yang dimaksud dengan *stakeholder* adalah orang-orang atau pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Atas dasar konsep tersebut maka yang termasuk ke dalam “*stakeholder*” pendidikan di daerah adalah orang tua murid, keluarga, guru, pimpinan sekolah, masyarakat, dunia kerja, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah. Walaupun masing-masing unsur tersebut memiliki perbedaan dalam peran dan tanggung jawabnya, ke semua itu terikat oleh aspirasi hasil pendidikan yang diharapkan, yakni individu yang “*smart and good*” atau “cerdas dan baik”.

Orang tua dan keluarga tentu sangat mendambakan hasil pendidikan anaknya mampu memfasilitasi perbaikan mutu kehidupan anaknya di masa mendatang serta mampu mengangkat harkat dan martabat orang tua dan keluarganya. Sedangkan masyarakat, dunia kerja, LSM, Organisasi politik, tentu sangat mendambakan hasil pendidikan itu menghasilkan individu yang mampu memberikan kontribusi yang bermakna sesuai dengan status dan perannya dalam komunitas itu.

Sementara itu pemerintah tentu sangat mengharapkan lulusan pendidikan itu mampu berpikir, bersikap, dan berbuat sebagai warganegara yang cerdas dan baik, seperti demokratis, taat hukum, toleran, dan beradab, atau bila menjadi pegawai pemerintah mampu menjadi abdi negara yang juga cerdas dan baik, seperti kreatif, efisien, produktif, jujur, dan bertanggung jawab. Sedangkan lembaga persekolahan tentu saja mendambakan hasil pendidikan jenjang pendidikan di bawahnya memberi landasan yang kuat untuk kelanjutan pendidikan berikutnya sehingga semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula mutu lulusannya.

Apa Saja Yang Menjadi Tanggung Jawab Daerah?

Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, pemerintah pusat antara lain bertanggung jawab atas penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya, penetapan standar materi pelajaran pokok, penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik, penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan warga belajar; penetapan kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif; pengaturan dan pengembangan

pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, dan sekolah internasional; dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.

Sedangkan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab provinsi, antara lain adalah “penetapan kebijakan penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang atau tidak mampu; penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok; penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru”. Di luar semua kewenangan dan tanggung jawab tersebut di atas, seperti penyelenggaraan pembelajaran di sekolah, pengangkatan, pembinaan, dan pemindahan guru, mobilisasi sumber daya untuk pelaksanaan proses pendidikan, sepenuhnya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Dengan kata lain sebagian besar dari unsur-unsur yang mempunyai kaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan seperti guru, sarana belajar, proses belajar, sinergi orangtua, sekolah, dan masyarakat, dan iklim serta budaya belajar kini menjadi tanggung jawab semua unsur “*stakeholder*” pendidikan di daerah.

Apa Yang Memberi Kontribusi Terhadap Mutu Pendidikan?

Apakah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan mutu pendidikan? Yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan untuk *building capacity of students to learn*. Oleh karena itu mutu pendidikan seyogyanya dilihat dari *instrumental input* dan *through-put*. Yang termasuk *instrumental input* adalah guru, kurikulum, bahan belajar, media dan sumber belajar, prasarana belajar, dan sarana pendukung belajar lainnya.

Sedangkan yang termasuk *through-put* adalah *learning experiences* yakni proses yang melibatkan bagaimana siswa melakukan proses interaksi dengan semua *instrumental input* sehingga potensinya berkembang seoptimal mungkin, dengan hasil belajar sebagai salah satu indikatornya. Oleh karena itu, dapat diidentifikasi adanya sejumlah unsur yang potensial memberikan kontribusi terhadap mutu pendidikan, yakni: guru sebagai kurikulum hidup (*life curriculum*), kurikulum (kompetensi yang dikembangkan dan materi pelajaran yang diseleksi dan diorganisasikan, bahan belajar (buku pelajaran siswa dan buku sumber guru), media dan sumber belajar (tercetak, terekam, tersiar, elektronik) prasarana belajar (ruang belajar, meubelair), sarana pendukung belajar lainnya (jaringan sosial sekolah dan lingkungan), dan iklim belajar (interaksi edukatif dan sosial-kultural di sekolah dan luar sekolah).

B. Potensi Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Untuk dapat melakukan usaha yang optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah, khususnya di kabupaten/kota, seyogyanya dikaji lebih

dulu kondisi obyektif dari unsur-unsur yang terkait pada mutu pendidikan seperti telah dibahas sebelumnya. (1) Bagaimana kondisi gurunya? (persebaran, kualifikasi, kompetensi penguasaan materi, kompetensi pembelajaran, kompetensi sosial-personal, tingkat kesejahteraan); (2) Bagaimana kurikulum disikapi dan diperlakukan oleh guru dan pejabat pendidikan daerah?; (3) Bagaimana bahan belajar yang dipakai oleh siswa dan guru? (proporsi buku dengan siswa, kualitas buku pelajaran); (4) Apa saja yang dirujuk sebagai sumber belajar oleh guru dan siswa? (tercetak, terrekam seperti kaset audio dan video, tersiar (radio, TV), elektronik (internet); (5) Bagaimana kondisi prasarana belajar yang ada? (ruangan, meja, kursi, papan tulis); (6) Adakah sarana pendukung belajar lainnya? (jaringan sekolah dan masyarakat, jaringan antar sekolah, jaringan sekolah dengan pusat-pusat informasi); (7) Bagaimana kondisi iklim belajar yang ada saat ini? (kelas demokratis/otoriter/tak menentu, kegiatan dikelas dan luar kelas, tingkat partisipasi siswa, situasi menyenangkan/mencekam).

Bila kondisi obyektif pendidikan di masing-masing kabupaten/kota sudah diketahui secara umum dan untuk setiap kecamatan, desa, dan setiap sekolah, selanjutnya dapat di *judge* dengan menggunakan suatu rentang kualitas mulai dari, misalnya (1) sangat memprihatinkan (sm); (2) kurang memadai (km); (3) rata-rata (rr); (4) di atas rata-rata (drr); (5) sangat memadai (smd). Sekolah yang sudah termasuk dalam kategori 4 dan 5, kita anggap tidak perlu mendapat intervensi dan advokasi. Upaya perlu diarahkan pada sekolah-sekolah yang termasuk kategori 1,2, dan 3 agar secara berangsur dapat memperbaiki mutunya.

Selanjutnya perlu diidentifikasi unsur-unsur yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi proses peningkatan mutu pendidikan, selain pemerintah daerah, misalnya kelompok pakar, paguyuban mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat daerah, perguruan tinggi, organisasi massa, organisasi politik, pusat penerbitan, studio radio/TVRI daerah, media masa cetak daerah, situs internet, dan sanggar belajar. Kelompok pakar dapat membuka kegiatan konsultasi *volunter* tatap muka dan atau jarak jauh; paguyuban mahasiswa dapat mengadakan kegiatan advokasi dan aksi sosial; perguruan tinggi dapat mengadakan pengabdian masyarakat/KKN dan penelitian tindakan; ormas dan orpol dapat merintis program advokasi sosial; pusat penerbitan dapat diminta untuk membantu publikasi sekolah; studio dan situs internet dapat diminta sebagai sarana komunikasi terprogram; dan sanggar belajar dapat dimanfaatkan untuk praktikum/praktek.

Komitmen dan tanggung jawab adalah kualitas pribadi yang tampak dalam keterikatannya secara tulus terhadap sesuatu dan kesediaannya untuk memikul beban atau resiko guna mendapatkan suatu hasil atau keadaan yang lebih baik. Untuk dapat menumbuhkan kualitas pribadi tersebut seseorang perlu

menguasai persoalan (*well-informed*) tentang persoalan mutu pendidikan, dalam hal ini mutu pendidikan di daerah.

Mengingat bahwa tidak semua warga daerah itu bertempat tinggal dan bekerja di kabupaten asalnya, maka sudah saatnya dibangun suatu jaringan komunikasi yang memungkinkan terjadinya proses berbagi ide dan pengalaman antar warga daerah itu, yang pada gilirannya diharapkan tumbuh komitmen dan tanggungjawab terhadap berbagai persoalan yang menyangkut mutu pendidikan di daerah. Berbagai upaya yang dapat dilakukan adalah membuka *web site* dan *mailing list* di internet, pertemuan ilmiah, pertemuan sosial-kultural, dll. Untuk inilah pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan dapat berperan sebagai katalisator dan fasilitator.

Yang perlu disadari adalah bahwa dalam dunia pendidikan, seperti juga dalam kehidupan sosial-kultural berlaku prinsip "*there is no panacea in education*". Artinya tidaklah mungkin kita memecahkan persoalan pendidikan hanya dengan menggunakan satu pendekatan atau formula. Pendidikan merupakan suatu bidang kajian dan *human endeavor* yang bersifat multi-dimensional. Oleh karena itu, pendekatan pemecahan masalah pendidikan menuntut wawasan yang bersifat lintas bidang keilmuan *cross discipline*. Oleh karena itu, berbagai bidang keahlian dan praktek perlu bekerjasama secara sinergitas dan tanpa saling curiga untuk mengkaji dan memecahkan persoalan pendidikan, seperti persoalan mutu pendidikan di daerah.

C. Mengembangkan Kultur Demokratis

Pemberdayaan daerah dalam upaya mengelola pendidikan merupakan salah satu perwujudan dari demokratisasi pendidikan. Dengan cara itu yang bertanggungjawab atas perkembangan pendidikan bukanlah pemerintah pusat seperti selama ini berlangsung, tetapi seluruh lapisan masyarakat yang menjadi *stakeholder* pendidikan sebagaimana dibahas di muka. Secara lebih operasional penerapan manajemen berbasis sekolah, merupakan wahana strategis untuk mewujudkan kultur demokratis dalam dunia pendidikan. Kultur ini seyogyanya dibangun meliputi seluruh tataran proses pendidikan, termasuk didalamnya perencanaan pendidikan, pengembangan kurikulum, penyiapan sarana belajar, perekrutan, penempatan, dan pembinaan SDM, penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif, proses belajar dan pembelajaran, dan hubungan sekolah dan masyarakat. Nilai dan prinsip demokrasi yang seyogyanya ditumbuh-kembangkan dalam lingkungan sekolah antara lain: pengambilan keputusan bersama (*shared decision making*), kerjasama, tanggung jawab, orientasi mutu, efisiensi dan efektivitas, kolegialisme, partisipasi sosial, profesionalisme, kepemimpinan yang demokratis, dan akuntabilitas sosial.

Nilai-nilai tersebut dapat terwujud bila semua *stakeholder* sekolah memahami konsep dan makna nilai-nilai tersebut, mau dan *committed* untuk mewujudkan nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan kedudukan

dan perannya dalam konteks persekolahan, dan memiliki visi membangun masa depan sekolah dan masyarakat yang semakin demokratis dan bermutu.

Demokratisasi atau debirokratisasi pendidikan adalah paradigma sistem pendidikan yang digagas oleh dunia pendidikan kita di era Indonesia baru ini. Gagasan ini mengemuka setelah melihat realita bahwa sistematisasi pendidikan kita di era Orde Baru lalu cenderung memaksakan kebijakan kepada para praktisi pendidikan, yakni guru, siswa, kepala sekolah, dan masyarakat konsumen pendidikan, terutama di daerah-daerah.

Di antara kebijakan sistem birokratisasi pendidikan yang merugikan warga belajar ialah penyeragaman kurikulum, gurusertris, tertutupnya ruang demokratisasi pembelajaran dalam kelas, dan sebagainya. Akibat yang muncul kemudian sudah bisa ditebak, pendidikan kita mengalami degradasi mutu, stagnasi peran dan fungsi. Juga ketidakberdayaannya dalam mengentaskan berbagai persoalan bangsa, yang sejatinya bagian dari tugas pendidikan. Pendidikan kita tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, yang mampu menghadapi tantangan globalisasi dewasa ini dan masa mendatang. Oleh karena itu, demokratisasi pendidikan dikedepankan dalam usaha mengatasi permasalahan pendidikan tersebut. Sementara itu, sampai saat ini, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) masih saja mencari format ideal bagi demokratisasi pendidikan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional kita.

Model demokratisasi dalam bingkai proses pembelajaran (PBM) (disebut juga model demokratisasi tingkat praksis). Model demokratisasi pertama merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan sistem birokrasi yang diterapkan selama masa pemerintahan Orde Baru. Yang pada praktiknya sangat membebani warga belajar, baik peserta didik, guru, maupun pengelola pendidikan, lebih-lebih masyarakat konsumen pendidikan di berbagai daerah.

Sistem birokrasi juga telah menyebabkan kotor dan amburadulnya manajemen dan administrasi pendidikan kita. Kebocoran dana pendidikan, ujian catur wulan dan ujian akhir negara, pungutan liar terhadap para calon pegawai negeri sipil (PNS), para guru yang (akan) naik pangkatnya, dan lain-lain merupakan hal lumrah, yang disikapi secara 'arif' dan 'bijaksana' oleh para pengambil kebijakan pendidikan kita. Para pelanggarnya pun tidak dikenakan sanksi apa-apa. Hal inilah yang kemudian memberikan citra buruk bahwa dunia pendidikan kita adalah 'sarang kriminalitas'. Hal demikian berdampak terhadap kekaburan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sehingga banyak kebijaksanaan pendidikan nasional yang ditetapkan hanya bertengger di atas keputusan-keputusan makro. Dan hampir-hampir tidak terlaksana di tingkat mikro (grass root/masyarakat kebanyakan), yakni sekolah.

Melihat kenyataan demikian, seharusnya ada proyeksi yang harus diperbarui dalam kebijakan-kebijakan birokrasi yang menyesak dada pendidikan kita. Dan menggantinya dengan pendekatan demokratis, yang

memberikan ruang kebebasan kepada seluruh elemen pendidikan untuk bebas berpartisipasi dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan atas dasar nilai-nilai hak asasi manusia.

Dengan demokratisasi pendidikan, sudah saatnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Sehingga tidak terjadi lagi suatu kebijakan seperti saat Orde Baru, yang tidak menyentuh realitas kehidupan masyarakat. Padahal pada akar rumput inilah sesungguhnya pendidikan sedang berjalan. Pemberian kebebasan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan, sejatinya juga diiringi komitmen pemerintah untuk terlaksananya demokratisasi pendidikan. Salah satunya adalah dengan cara lebih memperhatikan anggaran pendidikan pada tingkat *grass root*, baik sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah (swasta) yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Sementara itu, upaya pemerintah memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, seperti dengan dibentuknya dewan/komite sekolah melalui program *school based management* (SBM) dan *community based education* (CBE) dan dukungan teknologi informasi (TI), diasumsikan akan mampu mengurangi berbagai kebocoran dan pelanggaran pendidikan yang diakibatkan oleh para birokrat pendidikan selama ini.

Model demokratisasi kedua merupakan bentuk perlawanan dari sistem pembelajaran gaya lama, dengan guru menjadi pusat belajar (*teacher oriented*). Sementara peserta didik/murid dianggap 'robot' yang hanya datang, duduk, dan mencatat informasi yang disampaikan guru. Demokratisasi dalam kegiatan belajar mengajar ini dapat dilakukan dengan pendekatan 'pembelajaran atas dasar peserta didik' --meminjam istilah Marcel J Mandagi-- dan pada pendekatan model ini terjadi interaksi antara berbagai pengetahuan yang dipelajari siswa dan pengalaman diri yang diperoleh melalui usaha-usaha kreatif individu siswa. Guru juga tidak dibenarkan mengajar para siswanya dengan 'gaya bank', yang pada kenyataannya mematikan kreativitas dan inovasi mereka. Sebaliknya, guru hendaknya menerapkan pendekatan belajar yang diistilahkan oleh tokoh pendidikan terkemuka Paulo Freire dengan pendekatan pembelajaran 'hadapi masalah' yang efektif dalam mendorong siswa untuk berdialog, mengadakan refleksi terhadap berbagai informasi, tanggap terhadap fenomena sosial yang terjadi, serta mampu mengatasi berbagai problema yang dihadapi. Dengan demikian, peran guru dalam pembelajaran yang demokratis adalah mendorong terciptanya kondisi yang mendukung minat dan keasyikan siswa untuk belajar dan benar-benar menjadi mitra siswanya. Jika dua model demokratisasi pendidikan di atas dapat diterapkan secara sinergis, insya Allah dunia pendidikan kita akan menjadi arena terbuka bagi pembukaan pikiran manusia Indonesia.

Demokrasi bukanlah sebuah wacana, pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi, bukan pula "barang instan". Demokrasi butuh proses dalam mewujudkan mentalitas dan moralitas Bangsa yang beretika dan,

memanusiakan manusia. Bukan demokrasi yang carut-marut dan memahaminya lewat cara-cara dan perilaku anarkis bahkan sampai pada pola perilaku acrobat politik yang kadangkala membuat kita miris. Demokrasi kini hanya menjadi jargon verbalistik, jauh dari makna demokrasi dalam arti yang sebenarnya.⁴⁴

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan.

Dalam UU No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dinyatakan bahwa *“Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.”*



Perwujudan sistem pendidikan yang demokratis sudah menjadi keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Apakah itu kebijakan pemerintah, institusi pendidikan itu

⁴⁴Diakses dari <http://smantostop.blogspot.com/2011/11/artikel-normal-0-false-false-false-en.html>, Agustus 2013

sendiri, maupun oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena bagaimanapun juga, sebuah sistem pendidikan melibatkan banyak pihak dengan berbagai kompleksitasnya. Selanjutnya yang perlu ditekankan adalah peningkatan sistem pendidikan di Indonesia semestinya dapat menempatkan dirinya secara independen, dalam artian tidak banyak dicampur-tangani oleh penguasa, yang hanya menjadikan pendidikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Adalah penting, bila kita melakukan proses membangun pendidikan untuk demokrasi. Karena bagaimanapun, batasan antara pendidikan, kesadaran politik, mentalitas, dan kultur demokrasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa, demokrasi dalam dunia pendidikan adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, dan demokrasi dalam dunia pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang harus disikapi secara positif pada seluruh komponen bangsa.

BAB VIII

TELAAH KURIKULUM

A. Pengertian Kurikulum

Dalam bahasa latin, kurikulum berarti *track* atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Menurut Bobbit (dalam Google, 2008), mengemukakan bahwa “kurikulum merupakan suatu naskah panduan mengenai pengalaman yang harus didapatkan anak-anak agar menjadi orang dewasa yang seharusnya”. Oleh karena itu kurikulum merupakan kondisi ideal dibandingkan kondisi real. Kurikulum diibaratkan sebagai “jalur pacu” atau “kendaraan” untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan. Kamus Webster tahun 1856 mengartikan “*a race course, a place for running, a chariot*”. Kurikulum diartikan suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Tapi juga suatu chariot kereta pacu pada zaman dulu, suatu alat yang membawa seseorang dari tempat start ke tempat finish. Lawrence Stenhouse menyatakan dalam bukunya *An introduction to curriculum research and developmet* : “*Curriculum is the planned composit effort of any school to guide pupil learning toward predetermined learning outcome*. Dalam arti sempit kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran, leerplan (Belanda)”. Hilda Taba dalam bukunya *Curriculum development, theory and practise* mengartikan kurikulum sebagai a plan for learning yaitu sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh anak.

Hamalik menyatakan bahwa “kurikulum adalah rencana tertulis tentang yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut dan evaluasi untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik”.⁴⁵ Wikipedia (dalam Google, 2008) mengemukakan bahwa “kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut”.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 (dalam Google, 2008) menyatakan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Grayson (dalam Google, 2008) menyatakan bahwa “kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (*outcomes*) yang diharapkan dari suatu pembelajaran”. Perencanaan tersebut

⁴⁵ Oemar Hamalik. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007. h. 71

disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran (materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (*goals*) dan tujuan (*objectives*) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai). Sedangkan menurut Harsono mengemukakan bahwa “kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekpresikan dalam praktik”.

Menurut Grundy (dalam Google, 2008) menjelaskan “kurikulum merupakan program aktivitas guru dan murid yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa-siswa akan mencapai sebanyak mungkin tujuan akhir kegiatan pendidikan atau sekolah”. Kurikulum bukan hanya susunan sederhana mengenai perencanaan yang akan diimplementasikan, namun juga terdiri dari proses yang aktif terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling berhubungan timbal balik dan terintergrasi sebagai suatu proses. Sedangkan BPNSP mendefinisikan bahwa “kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Dalam Google (2008) menjelaskan bahwa “kurikulum adalah serangkaian standar isi, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Selain itu kurikulum adalah suatu pedoman atau norma dalam pelaksanaan pendidikan pada setiap tingkat pendidikan agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya definisi kurikulum dalam arti luas dengan beberapa penekannya sebagai berikut :

1. J. Galen Saylor dan William M. Alexander (1956)
Kurikulum adalah semua usaha sekolah untuk mempengaruhi sisiwa itu belajar.
2. George A. Beuchamp (1964)
Kurikulum mencakup semua kegiatan sisiwa di bawah tanggung jawab sekolah.
3. Harold B. Alberty (1965)
Kurikulum adalah semua kegiatan yang disajikan oleh sekolah bagi para siswa.
4. Ronald C. Doll (1974)
Kurikulum menunjukkan adanya perubahan penekanan dari isi kepada proses, perubahan lingkup yang sempit kepada yang lebih luas mencakup pengalaman di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, bersama guru maupun tidak. Juga mencakup upaya guru dengan berbagai fasilitas untuk terjadinya pengalaman belajar.
5. Winarno Surahmad (1977)

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum merupakan pedoman dalam segala kegiatan belajar mengajar.

6. George A. Beauchamp (1986)
Kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran. Kurikulum merupakan dokumen tertulis dan pelaksanaan rencana sudah masuk ke dalam pengajaran.
7. Nana Sudjana (1988)
Kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah.
8. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
9. Nana Syaodih Sukmadinata (1997)
Kurikulum menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan baik dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah maupun nasional.

Akhirnya kurikulum didefinisikan sebagai program pendidikan yang bertujuan melaksanakan tujuan pendidikan di sekolah dan berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah. "Ideal Curriculum" adalah kurikulum yang direncanakan atau kurikulum yang dicita-citakan yang berisi harapan yang muluk-muluk. Sedangkan "real curriculum" adalah kurikulum dalam kenyataannya, kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

B. Fungsi Kurikulum

Winarno Surahmad dalam bukunya *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum* (1977:6) menyatakan bahwa "berbicara masalah fungsi kurikulum kita dapat meninjaunya dari tiga segi, yaitu fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, bagi sekolah pada tingkat di atasnya, dan fungsi masyarakat".

1. Fungsi bagi sekolah yang bersangkutan

Ada dua fungsi kurikulum bagi sekolah yaitu fungsi sebagai alat dan fungsi sebagai pedoman. Fungsi sebagai alat karena berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan.

2. Fungsi bagi sekolah ditingkat atasnya

Setiap tingkatan sekolah harus diketahui kurikulum sekolah yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih pelajaran ataupun materi pelajaran dengan sekolah yang lebih rendah tingkatannya.

3. *Fungsi bagi masyarakat*

Pendidikan memang bertugas mempersiapkan anak didiknya agar dapat berperan dimasyarakat pada masa yang akan datang.

Fungsi kurikulum menurut Agus Suwignyo (dalam Google, 2008) dalam peningkatan mutu pendidikan dan penjabaran visi tergantung dari kecakapan guru, ketercakupan substansi kurikulum, dan evaluasi proses belajar.

C. Dimensi-Dimensi Kurikulum

Menurut Ibrahim (dalam Tim Pengembang, 2006:5) mengelompokkan kurikulum menjadi tiga dimensi, yaitu:

1. Kurikulum sebagai substansi
2. Kurikulum sebagai sistem
3. Kurikulum sebagai bidang studi

Menurut Syaodih (dalam Tim Pengembang, 2006:6) mengemukakan pengertian kurikulum ditinjau dari tiga dimensi, yaitu:

1. Sebagai ilmu
2. Sebagai sistem
3. Sebagai rencana

Sedangkan Hamid (dalam Tim Pengembang, 2006:6) mengemukakan bahwa pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki empat dimensi pengertian, dimana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu:

a. Pengertian Kurikulum Dihubungkan dengan Dimensi Ide

Menurut Tim Pengembang (2006:6) mengemukakan bahwa pengertian kurikulum sebagai dimensi berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa "kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya".

b. Pengertian Kurikulum Dikaikan dengan Dimensi Rencana

Menurut Tim Pengembang (2006:7) menjelaskan bahwa makna dari dimensi kurikulum ini adalah "sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu".

c. Pengertian Kurikulum Dikaitkan dengan Dimensi Aktifitas

Pengertian kurikulum sebagai dimensi aktifitas memandang kurikulum merupakan segala aktifitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah.

d. Pengertian Kurikulum Dikaitkan dengan Dimensi Hasil

Definisi kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut.

D. Komponen Kurikulum

Kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan akan direncanakan mempunyai komponen-komponen pokok : tujuan, isi, organisasi dan strategi.

▪ Tujuan Kurikulum

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh satu lembaga kependidikan. Jadi kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan program studinya pada lembaga pendidikan yang ditempuh.

▪ **Tujuan kurikuler** adalah tujuan bidang studi atau mata pelajaran.

▪ **Tujuan pembelajaran bersumber dan dijabarkan dari tujuan kurikuler, yaitu** tujuan yang berhadapan langsung dengan siswa karena siswa harus mencapai tujuan ini setelah selesainya proses belajar mengajar mata pelajaran tertentu.

Macam-macam tujuan pembelajaran, yaitu:

1. Cognitive domain (bidang kognitif)

- a. Pengetahuan;
- b. Pemaknaan;
- c. Aplikasi;
- d. Analisis;
- e. Sintesis;
- f. Evaluasi.

Menurut Jajat Riwayatna dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar untuk Bidang Studi Keterampilan Jasa dan Administrasi Perkantoran (1992) menyatakan bahwa dalam domain kognitif terdapat tingkatan-tingkatan mulai dari yang sederhana sampai dengan tingkatan yang rumit, yaitu sebagai berikut :

1. Knowledge (Pengetahuan);
2. Comprehension (Pemahaman);
3. Application (Penerapan);
4. Analysis (Analisis);
5. Synthesis (Sintesis);

6. Evaluation (Evaluasi).

2. Affective domain (bidang afektif)

- a. Sikap;
- b. Nilai-nilai;
- c. Interest, minat;
- d. Apresiasi

Tingkatan-tingkatan dalam aspek afektif, diantaranya:

1. Receiving (Kemauan Menerima);
2. Responding (Kemauan Menanggapi);
3. Valuing (Penilaian dan keyakinan);
4. Organization (Penerapan dan Mengorganisir);
5. Characterization by a value complex (Ketekunan dan Ketelitian)

3. Psychomotor domain (bidang psikomotor)

- a. Keterampilan;
- b. Kemampuan;
- c. Kebiasaan dan keterampilan fisik dan mental.

Beberapa tingkatan beberapa aspek psikomotorik, diantaranya :

1. Perception (Persepsi);
2. Set (Kesiapan melakukan kegiatan);
3. Mecanism (Mekanisme);
4. Guided Respond (Respon terbimbing);
5. Complex Overt Respond (Kemahiran Kompleks);
6. Adaptation (Adaptasi);
7. Origination (Orijinasi).

Perumusan tujuan menurut Robert F. Mager dalam bukunya *Preparing Instructional* :

1. Harus dirumuskan secara spesifik bentuk kelakuan murid sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan tersebut;
2. Harus dirumuskan lebih lanjut kondisi-kondisi dimana kelakuan tersebut akan nyata;
3. Harus ditentukan secara spesifik kriteria tentang tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan tersebut.

E. Pengembangan Kurikulum

Oemar Hamalik (dalam Google, 2008) mengartikan bahwa “pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa kearah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai bagaimana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada siswa”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari

pengembangan kurikulum adalah agar siswa mengalami perubahan sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Selanjutnya dalam Google (2008) menyatakan bahwa “pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa kearah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai bagaimana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada siswa”. Dalam pengembangannya kurikulum yang lama menjadi pedoman untuk pengembangan kurikulum yang baru. Serta mengemukakan bahwa perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia diawali pada kurikulum 1968 yang diganti dengan kurikulum 1975 kemudian berkembang lagi pada kurikulum 1984 yang selanjutnya kurikulum 1994 dan berkembang pada kurikulum 2004 yaitu kurikulum KBK, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang merupakan pengembangan dari kurikulum KBK tahun 2004, dan terakhir kurikulum 2013. Sehingga perkembangan suatu kurikulum adalah merupakan proses pengembangan kurikulum yang sebelumnya dimana kurikulum yang baru harus dapat menjawab persoalan atau masalah pada kurikulum yang lalu. Perkembangan kurikulum tersebut bersumber pada nilai-nilai, karena nilai merupakan sumber nilai yang dinamis. Nilai tersebut menyangkut apa yang harus diajarkan kepada siswa, nilai apa yang harus diberikan dalam pelaksanaan kurikulum.

Menurut Ralph Tyler (dalam Google, 2008) mengemukakan empat pertanyaan dalam mengembangkan kurikulum dan perencanaan pengajaran, yaitu:

- (1) Tujuan-tujuan pendidikan apakah yang harus dicapai oleh sekolah?
- (2) Pengalaman-pengalaman pendidikan apakah yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut?
- (3) Metode belajar mengajar apa yang diterapkan untuk memperoleh pengalaman tersebut?
- (4) Evaluasi hasil belajar yang bagaimanakah yang diterapkan?

Syaodih (dalam Google, 2008) mengemukakan hal-hal terpenting pada pengembangan kurikulum mementingkan tiga pendekatan, yaitu:

1. Anak sebagai sumber kurikulum yaitu kebutuhan-kebutuhan siswa
2. Tingkat-tingkat perkembangan siswa
3. Hal-hal yang diminati siswa

Empat aspek utama kurikulum yaitu :

- ✓ Tujuan pendidikan
- ✓ Isi pendidikan
- ✓ Pengalaman belajar
- ✓ Penilaian

Model-model pengembangan kurikulum

Model-model pengembangan kurikulum sampai saat ini :

1. Top down model

Top down model atau disebut juga line staff model atau disebut The administrative, model ini merupakan model yang paling lama dan paling banyak digunakan juga the administrative model. Model ini dikembangkan dari atas, dari top organisasi. Gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dengan menggunakan prosedur administrasi. Administrator pendidikan (Mendiknas, Dirjen, membentuk Tim Pengembangan Kurikulum yang bertugas untuk membuat kurikulum baru. Tim pengembangan kurikulum terdiri dari tim pengarah dan tim kerja).

Top down model artinya pengembangan kurikulum ini di mulai dengan langkah pertama para pejabat tingkat atas membuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum, tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. Langkah kedua adalah membentuk suatu tim panitia pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum yang didukung oleh beberapa anggota yang terdiri dari para ahli, yaitu ahli pendidikan, kurikulum, disiplin ilmu, tokoh masyarakat, tim pelaksana pendidikan dan pihak dunia kerja.

2. The grass roots model

Model merupakan lawan dari top down model karena gagasan pengembangan kurikulum datang dari bawah dari para guru di sekolah. Model ini disebut juga bottom up model. Model *Grass Roots* merupakan “model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah”. Dalam prosesnya pengembangan kurikulum ini harus diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum model *Grass Roots*, di antaranya adalah:

1. Guru harus memiliki kemampuan yang profesional
2. Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum
3. Guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi
4. Seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum akan berdampak terhadap pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip maupun rencana-rencana

3. Beauchamp's model

Beauchamp's model adalah model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh ahli kurikulum yang bernama Beauchamp. Ada 5 hal dalam pengembangan kurikulum yaitu menetapkan lingkup wilayah atau area

pengembangan, personalia, organisasi dan prosedur, implementasi kurikulum dan evaluasi kurikulum.

4. The demonstration model

Model ini datang dari bawah, dari guru. Guru secara resmi atau mengadakan percobaan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum jenis ini dengan sendirinya dalam skala kecil seorang guru atau beberapa guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah mencoba pengembangan kurikulum sesuai dengan selera guru yang bersangkutan kemudian kalau sudah jadi ditawarkan untuk dikembangkan dalam bentuk yang lebih luas.

Ada dua bentuk model pengembangan ini, yaitu:

1. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan tunjuk untuk melaksanakan suatu ujicoba atau eksperimen suatu kurikulum.
2. Dari beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, kemudian guru-guru tersebut mengadakan eksperimen, uji coba dan mengadakan pengembangan secara mandiri.

5. Taba's inverted model

Model Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum". Guru harus aktif penuh dalam pengembangan kurikulum". Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembang kurikulum merupakan karakteristik dalam model pengembangan Taba's. Model pengembangan kurikulum dari Taba ini bersifat induktif dalam rangka memperbaiki model pengembangan kurikulum tradisional yang bersifat deduktif.

Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba :

1. Mengadakan unit eksperimen
Dalam eksperimen ada delapan langkah yang harus ditempuh, yaitu :
 - a. Mendiagnosis kebutuhan
 - b. Merumuskan tujuan-tujuan khusus
 - c. Memilih isi
 - d. Mengorganisir isi
 - e. Memilih pengalaman belajar
 - f. Mengorganisir pengalaman belajar
 - g. Mengevaluasi
 - h. Melihat sekuens dan keseimbangan
2. Menguji unit eksperimen
3. Mengadakan revisi dan konsolidasi
4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum
5. Mengadakan implementasi

6. Roger's interpersonal relations model

Model ini dikembangkan oleh ahli psikoterapi Roger dengan menerapkan psikoterapinya agar bimbingan dapat diterapkan dalam bidang pendidikan khususnya dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger :

- ✓ Pemilihan target dari sistem pendidikan
- ✓ Partisipasi guru dalam pengalaman kelompok
- ✓ Pengembangan pengalaman kelompok untuk satu kelas atau unit pelajaran
- ✓ Partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompoknya dari segi nilai efisiensi dan efektifitas dalam bisnis.

7. Ralph Tyler model

Tyler (dalam Tim Pengembang, 2006:61) menggunakan 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yang meliputi:

1. Menentukan tujuan pendidikan
2. Menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan
3. Menentukan organisasi kurikulum
4. Menentukan evaluasi pembelajaran

8. Miller-Seller model

Model pengembangan kurikulum Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi (Gagne) dan model transaksi (Taba's & Robinson) yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Klasifikasi Orientasi Kurikulum
2. Pengembangan Tujuan
3. Identifikasi Model Mengajar
4. Implementasi

9. The systematicd action research model

Model ini disusun berdasarkan prosedur action research. Asumsi yang dipergunakannya adalah bahwa perkembangan kurikulum merupakan implementasi dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu kurikulum disusun harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Ada 2 langkah prosedur action research :

1. Mengkaji masalah kurikulum, berupa pengumpulan data dan mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi kurikulum tersebut, lalu diambil tindakan bagaimana mengatasi masalah tersebut.
2. Implementasi tindakan yang diambil pada langkah pertama, yang diikuti dengan pengumpulan fakta dan data. Pengumpulan di sini dimaksudkan untuk mengadakan evaluasi tindakan, memahami masalah yang dihadapi, mengadakan modifikasi dan menentukan tindakan selanjutnya.

BAB IX**MODEL PENGELOLAAN SEKOLAH KONTEMPORER****A. Komparasi Model MBS****a. Model MBS di Hongkong**

Di Hongkong, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disebut dengan *The School Management Initiative* (SMI) atau Inisiatif Manajemen Sekolah (IMS). Diterapkannya MBS di Hongkong karena kondisi pendidikan yang kurang baik sehingga diperlukan perbaikan. Problem pendidikan di Hongkong yang mendorong timbulnya MBS karena struktur dan proses manajemen yang tidak memadai, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak kurang dijabarkan secara jelas, kurang memadainya alat pengukuran prestasi, saat itu masih dipentingkan kontrol secara ketat namun kurangnya kerangka kerja tanggung jawab dan akuntabilitas, dan lebih mementingkan kontrol pembiayaan daripada efektivitas pembiayaan. Sistem sekolah terdiri dari tiga sektor yang berbeda yaitu sekolah negeri, sekolah bersubsidi, dan sekolah swasta. Sektor terbesar adalah sekolah bersubsidi. Sektor ini menyediakan 80% tempat, sedangkan sekolah negeri dan swasta masing-masing menyediakan 7% dan 13%. Reformasi pendidikan yang pertama dipusatkan pada perluasan sistem, dan peningkatan fasilitas belajar-mengajar. Pada 1991, suatu laporan dari Departemen Pendidikan tentang 'inisiatif manajemen sekolah' (IMS), mencatat beberapa problem pendidikan sebagai berikut: (a) struktur dan proses manajemen tidak memadai; (b) peran dan tanggungjawab kurang dijabarkan; (c) tidak adanya atau tidak memadainya pengukuran kinerja; (d) penekanan lebih pada pengawasan yang terinci, ketimbang pada kerangka tanggungjawab dan akuntabilitas; dan (e) penekanan lebih pada pengawasan pembiayaan atas aspek-aspek anggaran, ketimbang pada efektifitas pembiayaan dan nilai keuangan.

Prinsip-prinsip MBS di Hongkong yang diusulkan adalah: (1) perlunya telaah ulang secara terus-menerus terhadap pembelanjaan anggaran pemerintah, (2) perlunya evaluasi secara sistematis terhadap hasil, definisi yang lebih baik tentang tanggung jawab, (3) hubungan yang erat antara tanggung jawab sumber daya dan tanggung jawab manajemen, (4) perlu adanya organisasi dan kerangka kerja yang sesuai, hubungan yang jelas antara pembuat kebijakan dengan agen-agen pelaksana. Prinsip-prinsip utama MBS di Hongkong menurut Arcaro adalah: (1) telaah ulang (*review*) terus menerus terhadap dasar belanja publik; (2) evaluasi sistematis terhadap hasil; penegasan tanggungjawab lebih baik; (3) pertautan lebih erat antara tanggungjawab sumberdaya dan tanggungjawab manajemen; (4) kerangka manajemen dan organisasi yang sesuai; dan (5) hubungan

ditetapkan secara jelas antara para pembuat kebijakan dan pelaksanaannya.

IMS menetapkan peran-peran mereka yang bertanggungjawab dalam mengatur sekolah, terutama sekali para sponsor, pengelola dan kepala sekolah. Ia memberikan partisipasi lebih besar kepada para guru, orangtua, dan alumni dalam manajemen dan pembuatan keputusan sekolah; mendorong perencanaan lebih sistematis dan evaluasi terhadap aktivitas sekolah; dan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah dalam pemanfaatan sumberdayanya. IMS menekankan manajemen bersama sebagai prinsip dasar administrasi sekolah serta mendorong partisipasi para guru, orangtua, dan peserta didik dalam administrasi sekolah. Kerangka ini terdiri dari lima kelompok kebijakan: peran dan hubungan baru bagi Departemen Pendidikan; peran baru bagi komite manajemen sekolah, para sponsor, pengawas, dan kepala sekolah; fleksibilitas lebih besar dalam keuangan sekolah; partisipasi dalam pembuatan keputusan; dan kerangka akuntabilitas.

Sebanyak 21 sekolah bersubsidi ikut serta dalam fase pertama skema IMS, yang dimulai pada September 1991. Pada 1997, semua sekolah negeri dan beberapa sekolah bersubsidi ikut serta dalam skema ini. Adopsi pemerintah terhadap sebuah strategi implementasi yang berdasarkan pada pilihan sukarela dari sekolah memperlihatkan preferensinya untuk meningkatkan keanggotaan karena persuasi, dan bukan karena paksaan legislatif.

Kerangka akuntabilitas membicarakan aspek individu dan aspek sekolah. Untuk tingkat individual, suatu sistem pelaporan atau penilaian direkomendasikan dan sekolah-sekolah diminta berkonsultasi dengan komite sekolah, serta melihat bentuk penilaian yang dimiliki Departemen Pendidikan sebagai suatu permulaan yang memungkinkan. Yang menarik, tidak ada persyaratan bagi sekolah untuk memiliki prosedur-prosedur formal apa pun dalam mengevaluasi kinerja staf. Untuk tingkat sekolah ditekankan pada akuntabilitas sekolah secara keseluruhan. Masing-masing sekolah diharuskan membuat perencanaan tahunan sekolah yang menggariskan tujuan dan kegiatan tahun berikutnya. Perencanaan semacam ini memungkinkan sekolah menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, dan memberikan informasi mengenai arah sekolah kepada masyarakat. Sekolah juga diharuskan menyiapkan profil tahunan sekolah meliputi kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya. Profil ini bertujuan untuk pemetaan kinerja sekolah yang mencakup: (1) prestasi peserta didik, (2) kegiatan-kegiatan non-akademis, (3) profil staf, (4) kualifikasi dan kompetensi staf, (5) pekerjaan orangtua, dan (6) kondisi rumah tempat tinggal mereka.

b. Model MBS di Amerika Serikat

Penerapan MBS di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1980-an. Hal ini ditandai munculnya kebangkitan kembali dan adanya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah. Era itu merupakan kelanjutan reformasi yang terjadi tahun 1970-an pada saat sekolah-sekolah di distrik menerapkan *Site-Based Management*.⁴⁶

Sebelum penerapan MBS sistem pendidikan di Amerika Serikat, secara konstitusional pemerintah pusat (*state*) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan, sedangkan pemerintah daerah (*district*) hanya sebagai unit pembuat kebijakan dan administrasi. Pemerintah federal memiliki peran yang terbatas hanya dibatasi pada aspek pendanaan saja.

Saat itu muncul berbagai reaksi dalam bentuk rekomendasi baik dari individu maupun organisasi yang berpengaruh untuk mengadopsi MBS. seperti Asosiasi Gubernur Nasional (*National Governors' Association*) yang menyebut: "insentif dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan MBS". Asosiasi ini yakin bahwa penyerahan pengelolaan sumber daya ke sekolah akan lebih efektif. Dengan demikian sekolah memiliki kebebasan mencurahkan energi kreatifnya sehingga sekolah dapat mengembangkan pendekatan dan strategi untuk mencapai tujuannya.

Rekomendasi lain datang dari persatuan guru terbesar di Amerika Serikat, yaitu *The National Education Association* dan Asosiasi kepala sekolah menengah pertama (*The National Association of Secondary School Principal*). Mereka menyarankan bahwa sebagai syarat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka otoritas pengambilan keputusan harus berada di sekolah. Melihat sejarah kemunculannya, maka model MBS di Amerika Serikat disebut dengan *Site-Based Management*, sebagaimana dikemukakan Reynolds.

Pada 1990, negara-negara bagian (berbeda dengan otoritas lokal atau federal) memikul tanggungjawab besar atas pembiayaan pendidikan. Sekolah-sekolah dibebaskan dari sejumlah peraturan yang ditentukan di pusat, yang mempersempit kemampuannya untuk memberikan sejenis layanan pendidikan yang diperlukan sejumlah kliennya. Pemberian wewenang kepada lokal disahkan oleh empat belas negara bagian. Menurut Ogawa dan White (1994), sepertiga dari seluruh sekolah distrik memiliki beberapa versi MBS antara 1986 dan 1990. Semenjak 1990, ia disahkan sekurang-kurangnya oleh lima atau lebih negara bagian. Dalam periode yang sama, lebih dari 20 negara bagian mensahkan perundang-undangan untuk membuat *sekolah khusus (charter schools)* sekolah itu sendiri *de facto* adalah MBS, meskipun tidak mencantumkan nama tersebut (untuk analisis lebih lengkap, lihat, misalnya, Gamage, 1996; David, 1989; 1990;

⁴⁶ Abu-Duhou, I. *School Based Management*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Terjemahan, 1999, H.16

Wholestetter dan Smyer, 1994; Wholstetter dan McCurdy, 1991; dan Malen, Ogawa dan Kranz, 1990).

Reformasi tersebut ada dua jenis: *pertama*, desentralisasi administratif¹, di mana kantor pusat Otoritas Pendidikan Lokal menunjuk tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah. Di sini, kantor pusat menyerahkan kewenangan ke bawah secara terbatas, tetapi sekolah lokal masih bertanggungjawab ke atas. *Kedua*, 'manajemen berbasis lokal', suatu struktur yang memberi wewenang kepada para orangtua, guru, dan kepala sekolah di masing-masing sekolah untuk menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, menentukan kurikulum, serta menggaji dan memberhentikan staf. Di sini, kewenangan pembuatan keputusan adalah tingkat lokal, sedangkan tanggungjawab tidak ditujukan ke atas, tetapi ke masyarakat yang dilayani sekolah.⁴⁷

Dalam studinya yang penting berjudul: "Politics, Markets and American Schools", Chubb dan Moe dalam Wohlstetter, 1994) melengkapi analisis data secara besar-besaran yang menunjukkan bahwa standar prestasi yang lebih baik dicapai oleh sekolah adalah dengan pengawasan lokal dan ketat. Beberapa usulan pilihan yang berbeda dianjurkan dievaluasi secara kritis oleh Clune dan Witte dalam Wohlstetter, 1994). Usulan pilihan tersebut meliputi:

- a. suatu sistem 'voucher', di mana para peserta didik diberi dana untuk mengikuti sekolah yang dipilih oleh orangtua mereka;
- b. sekolah-sekolah 'magnet' yang memfokuskan diri pada suatu disiplin tertentu (misalnya, sains);
- c. seleksi bebas sekolah dari otoritas pendidikan lokal; dan
- d. kebebasan memilih sebuah sekolah di luar otoritas pendidikan lokal.

Beberapa penulis menelaah reformasi di Amerika Serikat. Mereka mencatat bahwa masing-masing negara bagian mengambil strategi-strategi berbeda dalam meningkatkan sistemnya. David (1990)¹ mencatat bahwa MBS dapat dilembagakan oleh undang-undang negara bagian atau aksi administratif, Distrik, atau sekolah. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan sistem akuntabilitas dengan beberapa konsekuensi berakibat pada prestasi peserta didik, atau malah tidak memiliki pengaruh sama sekali. Sebagian besar varian MBS melibatkan semacam dewan pembuatan keputusan yang representatif di sekolah, yang kemungkinan berbagi kewenangan dengan kepala sekolah atau hanya sebagai penasihat. Beberapa dewan memiliki kewenangan untuk

⁴⁷ Wylie, C. *Self-Managing Schools in New Zealand: The Fifth Year*. Wellington: New Zealand Council for Educational Research., 2005. H. 219

merekrut kepala sekolah. Dewan lain, memiliki kewenangan merekrut sekaligus memecat, sedangkan yang lainnya, tidak melakukan keduanya. Beberapa dewan dapat merekrut staf manakala ada lowongan dan dewan lainnya menetapkan kepala sekolah sebagai pimpinan, sebagian lagi menetapkan bahwa kepala sekolah bukan pimpinan.

David meringkaskan ciri-ciri utama reformasi MBS di Amerika Serikat sebagai berikut:

1. Negara bagian Kentucky mengharuskan setiap sekolah benar-benar memiliki dewan berbasis sekolah dengan tiga orang guru, dua orangtua, dan kepala sekolah, serta memberikan kewenangan kebijakan dan politik keuangan yang jelas kepada dewan.
2. Negara bagian Maryland dan Texas mengharuskan sekolah memiliki tim pembuatan keputusan berbasis sekolah. Tetapi, berbeda dengan negara bagian Kentucky, Maryland dan Texas tidak menetapkan komposisinya atau secara legal melimpahkan kewenangan dari distrik ke sekolah.
3. Di Chicago, undang-undang negara bagian menempatkan kewenangan yang signifikan di tangan dewan sekolah lokal, yang terdiri dari enam orangtua, dua orang perwakilan masyarakat, dua orang guru, dan kepala sekolah.
4. Di negara bagian Cincinnati, reorganisasi dan penciptaan kantor pusat telah mengubah tanggungjawab yang signifikan, tetapi tidak ada kewenangan legal tambahan bagi kepala sekolah.
5. Negara bagian Colorado mengharuskan perwakilan bisnis di masing-masing dewan sekolah. Manajemen berbasis lokal di negara bagian Memphis tidak pernah melewati fase percobaan.
6. Sementara di Florida, percobaan tersebut dikembangkan tetapi pada skala kecil.
7. Negara bagian Minnesota memelopori jenis reformasi lain: pilihan orangtua di antara sekolah-sekolah negeri. Hal ini merupakan perencanaan pendaftaran terbuka (*open-enrolment*) yang kontroversial, di mana para peserta didik dapat mengikuti sekolah negeri lain selain di sekolah yang ada di lingkungannya (distrik) di mana mereka tinggal.
8. Negara bagian Michigan mengurangi pajak properti lokal sebagai sumber utama dukungan finansial sekolah serta menyerahkan hampir seluruh tanggungjawab atas pembiayaan sekolah kepada negara bagian tersebut.

Gamey antara lain mencatat bahwa "kekuatan sistem desentralisasi di Amerika Serikat berasal dari proses pendidikan yang diputuskan di tingkat yang sangat lokal. Pengawas dewan sekolah dan kepala sekolah lokal membentuk tim manajemen kunci. Tim manajemen ini memiliki

tanggungjawab pendidikan yang riil dalam memutuskan apa yang seharusnya diajarkan, bagaimana ia seharusnya diajarkan dan siapa yang akan mengajarkannya. Tim ini harus bertemu dengan orangtua ketika sejumlah problem muncul, serta mempertahankan tindakan mereka dalam pertemuan terbuka dengan dewan sekolah dan perwakilan anggota masyarakat".

Undang-undang Peningkatan Pendidikan yang dibuat *South Carolina* pada 1984, memiliki tujuh komponen utama yang mempengaruhi operasi sekolah. Komponen tersebut adalah: (1) meningkatkan prestasi peserta didik dengan meningkatkan standar akademis; (2) memperkuat pengajaran dan pengujian keahlian dasar; (3) mengangkat profesi pengajaran dengan memperkuat pelatihan, evaluasi dan kompensasi guru; (4) meningkatkan kepemimpinan, manajemen, dan efisiensi fiskal sekolah di semua tingkatan; (5) mengimplementasikan kendali mutu yang teliti dan produktivitas yang menguntungkan; (6) menciptakan kemitraan lebih efektif di antara sekolah, orangtua, masyarakat, dan pelaku bisnis; dan (7) menyediakan gedung sekolah yang kondusif bagi pembelajaran peserta didik (Ginsberg dan Barry, 1990.⁴⁸ Dengan demikian, pelimpahan kewenangan ke tingkat sekolah serta partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan pendidikan ke arah penciptaan sekolah-sekolah yang lebih efektif menjadi ljuuan utama reformasi tersebut.

Negara bagian Illinois membuat Undang-undang Reformasi Sekolahnya pada 1985 yang memberikan mandat kepada Dewan Peningkatan Sekolah Lokal (*Local School Improvement councils*). Dewan ini diangkat oleh kepala sekolah serta diberi wewenang untuk memberikan nasihat kepada kepala sekolah dalam merencanakan peningkatan sekolah dan menelaah prioritas pengeluaran sekolah. Undang-Undang Reformasi Sekolah 1988 mengamanatkan bahwa sekolah negeri harus dikelola Dewan Sekolah Lokal. Keanggotaan Dewan tersebut terdiri dari enam orangtua, dua orang masyarakat, dua orang guru, dan kepala sekolah. Khusus sekolah menengah, ditambah seorang perwakilan peserta didik yang diikutsertakan tetapi tidak memiliki hak pilih. Paket pelimpahan tersebut meliputi: (1) evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah dan pembaruan kontrak kerjanya jika dianggap penting; (2) persetujuan atas anggaran sekolah berkonsultasi dengan Komite Penasihat Insan Profesional (*Professional Persons Advisory Committee*); (3) persetujuan atas perencanaan peningkatan sekolah yang disiapkan oleh kepala sekolah berkonsultasi dengan *stakeholders* bersangkutan; dan (4) monitoring implementasi perencanaan peningkatan sekolah dan anggaran

⁴⁸ Beare, H. *The Restructuring of Schools and Schools System: a Comparative*. Canberra: The Australian College of Education. 1991, h. 72

oleh kepala sekolah. Model MBS di Los Angeles dirancang sebagai suatu proses peningkatan dua tahap. Pembuatan keputusan bersama dimulai pada 1989, sementara MBS yang utuh baru menyusul setelah perencanaan dan pengalaman mencapai tingkatan yang diinginkan pada tahap pertama. Dewan Sekolah Lokal memiliki tujuan utama meningkatkan fungsi sekolah. Keanggotaan dewan bervariasi dari 6 sampai 16 orang, tergantung pada ukuran sekolah yang ada. Separuh keanggotaan adalah terdiri dari kepala sekolah, orangtua, anggota masyarakat, anggota staf non pengajar, dan, dalam kasus sekolah menengah, seorang peserta didik. Separuh lainnya terdiri dari ketua cabang lokal persatuan guru serta guru yang dipilih oleh staf pengajar di sekolah. Kepala sekolah dan ketua persatuan guru lokal secara bersama-sama pertemuan dewan. Beberapa upaya Dewan Sekolah Lokal terpusatkan pada pembentukan kebijakan dan perencanaan lokal, dan bukan pada implementasi manajemen harian sekolah. Meskipun demikian, Sekolah Lokal tidak diberi kewenangan untuk merekrut memecat kepala sekolah dan guru.

Memasuki tahap kedua MBS, Dewan Sekolah Lokal harus mendapat persetujuan dari dewan pusat, yang terdiri 24 anggota, termasuk tujuh orangtua atau anggota masyarakat, lima orang ditunjuk oleh pengawas dan dua belas orang ditunjuk oleh persatuan guru. Dewan pusat mempertahankan keseimbangan kewenangan tersebut. Ia diberi wewenang untuk mengevaluasi dan menyetujui rencana serta proposal MBS yang diajukan Dewan Sekolah Lokal. Selain itu, ia bertanggung jawab atas pelatihan anggota-anggota Dewan Sekolah Lokal bagi mereka, distribusi informasi dan mempelajari serta metode-metode operasional yang lebih. Jika disetujui oleh dewan pusat, Dewan Sekolah Lokal dapat memiliki tingkat kebebasan yang tinggi dalam menentukan arahnya sendiri mengenai isu-isu administratif dan akademis, semacam ini juga dapat memilih untuk mengubah dan kewenangannya.²²

Manajemen berbasis sekolah *Dade County's (Florida)* proses pembuatan keputusan bersama telah memberikan kewenangan kepada lebih dari 100 sekolah di Miami untuk membuat pengajaran mereka. Dengan program ini, tim guru berbasis sekolah dan administrator sekolah melakukan pengawasan terhadap anggaran, alokasi staf, dan organisasi harian sekolah. Pendekatan pengelolaan bersama ini menghasilkan pelbagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik sekolah tertentu. Persatuan guru distrik dan lokal menyetujui penghapusan kebijakan dewan, peraturan administratif, serta ketentuan kontrak persatuan guru, yang menghambat implementasi program yang ditentukan sekolah (Kirst)¹. Sebetulnya, kebijakan awal muncul dari kerja satuan tugas yang dipimpin pengawas sekolah dan ketua persatuan guru lokal untuk mempertimbangkan cara-cara meningkatkan sistem. Tujuan

reformasi ini adalah untuk peningkatan mutu peserta didik, fleksibilitas dan tanggungjawab guru yang meningkat terhadap perencanaan, rekrutmen dan pengembangan anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam urusan sekolah.

Model sekolah *The Dade Country* tidak berusaha untuk melimpahkan kewenangan yang sungguh-sungguh ke dewan pimpinan lokal. Sekalipun para administrator menyetujui hampir seluruh rekomendasi, mereka berhak untuk tidak memberi persetujuan. Jadi, model *the Dade Country* merupakan suatu usaha ke arah dekonsentrasi pembuatan keputusan dan partisipasi, serta bukan suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk melimpahkan atau menyerahkan kewenangan. Para dewan hanya berfungsi dalam kapasitasnya sebagai penasihat.

c. Model MBS Di Kanada

Gerakan menuju MBS di Kanada telah dilakukan di Distrik Sekolah Negeri Edmonton di Alberta, melalui pendekatan yang biasanya dikenal dengan pembuatan keputusan di lingkungan sekolah (*school-site decision-making*). Dengan model ini, maka desentralisasi alokasi beberapa sumberdaya terutama guru dan staf, peralatan, perbekalan dan pelayanan. Pada pertengahan tahun 1970-an, uji coba model ini dilakukan pada tujuh sekolah yang telah merintis jalan mengadopsi sistem secara luas dari pendekatan manajemen mandiri yang komprehensif dan melembaga.

Ciri-ciri model ini adalah tidak melibatkan lagi dewan lokal dalam pengambilan keputusan sekolah. Pada tahun 1986, suatu program percobaan, yang melibatkan 14 sekolah, memperluas pendekatan tersebut mencakup pelayanan konsultasi yang sentralistik, akan tetapi ciri-ciri pentingnya adalah model formula alokasi sumberdaya. Sekolah-sekolah memiliki beberapa alokasi *lumpsum*-nya sendiri dilengkapi dengan sejumlah dana yang menggambarkan penggunaan alur pelayanan konsultasi sesuai dengan jenis sekolah dan tingkat kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, beberapa alokasi dimasukkan dalam beberapa anggaran berbasis sekolah. Pembiayaan standar untuk pelbagai tipe pelayanan kemudian ditetapkan, dengan pembiayaan dibebankan atas sekolah sepanjang pelayanan tersebut dibutuhkan. Beberapa sekolah dapat memilih pelayanan-pelayanan di luar yang disediakan distrik. Suatu program efektifitas guru juga dilaksanakan pada 1981. Pada 1986-1987, program pengembangan profesional satu setengah hari per minggu menjangkau sebagian besar sekolah dan 50% diperkirakan dari para guru, dengan pendanaan dari beberapa anggaran berbasis sekolah.¹

Untuk menjamin akuntabilitas, proses *monitoring* diselenggarakan. "*Benchmarks*" atau beberapa tingkat standar prestasi ditetapkan dan

digunakan sampai 1987 sebagai suatu dasar perbandingan bagi beberapa kelompok peserta didik yang berhasil. Setiap tahun survei pendapat dilakukan oleh para peserta didik, guru, kepala sekolah, staf kantor wilayah dan orangtua yang memungkinkan mereka meranking tingkat kepuasan mereka dalam kaitannya dengan serangkaian isu-isu mengenai peran-peran mereka yang berbeda. Beberapa hasil yang terkumpul diumumkan ke masyarakat umum sedemikian rupa sehingga peninjauan atas kemajuan di suatu wilayah dimungkinkan. Data spesifik sekolah dan beberapa analisis perbandingan mengenai kinerja beberapa sekolah di suatu wilayah tersedia bagi sekolah-sekolah yang relevan dan atas permintaan para orangtua dan pihak lainnya.¹

Data yang terkumpul lainnya mencakup nilai rata-rata hingga kelas 12, jumlah staf yang mengikuti *in-service training* dan aktivitas pengembangan profesional eksternal; jumlah pembukuan untuk kepentingan masyarakat; biaya reparasi dan pemeliharaan; beberapa biaya proyek modal; anggaran untuk keperluan lainnya (seperti gas, listrik, air), dan terakhir, surplus (kelebihan) anggaran tahunan atau defisit. Semua data tersebut relevan untuk persyaratan penyusunan anggaran suatu sekolah dari tahun ke tahun.

Pada 1994, Alberta merancang untuk memulai suatu restrukturisasi besar sistem pendidikan provinsi secara keseluruhan. Usulan tersebut adalah untuk melegislasi beberapa reformasi pendidikan secara luas yang menghasilkan sebuah kantor pusat Departemen Pendidikan yang lebih sederhana dan pengurangan jumlah sekolah distrik yang drastis dari 140 menjadi 60, termasuk pelimpahan kewenangan ke tingkat sekolah. Hak dewan sekolah dalam menentukan pajak pendidikan digantikan dengan alokasi seluruh pendanaan oleh pemerintah provinsi. Ciri-ciri pokok reformasi yang diusulkan adalah keterlibatan orangtua, masyarakat dan pelaku bisnis yang meningkat, dengan kewenangan atas pembuatan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk penempatan beberapa sumberdaya dan menentukan bagaimana hasilnya akan dicapai. Pengenalan beberapa sekolah khusus (*charter schools*) dengan fleksibilitas lebih besar dan otonomi operasi untuk mencapai hasil lebih baik juga dipertimbangkan berdasarkan legislasi baru tersebut.¹

d. Model MBS di Australia

Di Australia, lebih dari seratus tahun pengelolaan pendidikan ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat. Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas (*primary and secondary school* diadministrasikan oleh masing-masing negara bagian (*state*) di bawah pengelolaan yang ketat oleh Departemen Pendidikan pusat. Sebagian besar kurikulum ditentukan dari pusat yang dikontrol secara ketat oleh inspektorat dan diadakan ujian nasional

secara menyeluruh untuk Sekolah Menengah Atas (*secondary school*).¹ Sebagian besar dana pendidikan berasal dari pemerintah pusat dengan pengalokasian sumber daya yang sentralistis. Sedikit sekali peran sekolah dalam menentukan standar pembiayaan yang digunakan sehingga sekolah tidak bisa menggali dana dari penyumbang sukarela seperti orang tua dan masyarakat lokal.

Sekitar awal 1970-an telah terjadi perubahan secara dramatis dalam pengelolaan pendidikan di negara itu. Perubahan yang nyata adalah pemerintah federal mulai memiliki peran yang amat penting dalam pengelolaan pendidikan melalui *Australian Commonwealth & School Commission* yang dibentuk tahun 1973. Oleh karena itu, peran Departemen Pendidikan pusat semakin kompleks yang akhirnya mendorongnya untuk melimpahkan pengambilan keputusan pada tingkat sekolah yang berkaitan dengan hal-hal terpenting dalam pengelolaan dana, seperti yang terjadi di negara bagian Tasmania.¹²

Pada awal tahun 1970-an itu juga ditandai adanya desentralisasi administratif Departemen Pendidikan melalui pembentukan unit-unit regional di beberapa negara bagian. Diawali di negara bagian Australia Selatan dan *Australian Capital Territory* mulai memberikan kebebasan dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Proses ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an di beberapa negara bagian, seperti di Victoria, Australia Barat (*Western Australia*), Australia Utara (*Northern Territory*), Tasmania, dan Queensland.

Karakteristik MBS di Australia terfokus pada aspek kewenangan sekolah antara lain: *pertama*, menyusun dan mengembangkan kurikulum dan pembelajaran untuk meningkat-kan hasil belajar peserta didik. *Kedua*, melakukan pengelolaan sekolah yang dapat dipilih di antara tiga kemungkinan, yaitu *Standard Flexibility Option (SO)*, *Enhanced Flexibility Option-1 (EO-1)*, dan *Enhanced Flexibility Option-2 (EO-2)*. *Ketiga*, menyusun perencanaan, program dan mempertanggungjawabkan secara akuntabel. *Keempat*, menjamin dan memperkuat sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. *Kelima*, fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah.¹²

Peningkatan prestasi peserta didik kemungkinan besar akan dicapai di sekolah-sekolah yang: (1) relatif otonom, (2) memiliki kapasitas untuk memecahkan masalahnya sendiri, dan (3) memiliki *leadership* yang kuat.¹ Selain itu, elemen-elemen kerangka kurikulum nasional mulai muncul, bertepatan dengan adanya inisiatif nasional untuk merestrukturisasi profesi tenaga kependidikan. Pengembangan manajemen pendidikan yang terjadi di Australia meliputi:

1. Desentralisasi pembuatan keputusan berkaitan dengan kurikulum dan penggunaan sumberdaya bagi sekolah dan masyarakat.
2. Pengembangan kebijakan umum, prioritas dan kerangka akuntabilitas oleh pemerintah dan otoritas pusat. Hal tersebut dimaksudkan sebagai

- garis pedoman, yang direncanakan, agar pembuatan keputusan berbasis sekolah dapat tercapai.
3. Penerimaan dan keyakinan bahwa pengembangan tersebut akan terjadi secara bertahap pada periode beberapa tahun ke depan.
 4. Mendorong sekolah untuk mendekati manajemen dari sudut pandang lebih sistematis dan berorientasi kemajuan, dengan perlengkapan yang cukup bagi pembuatan keputusan yang partisipatoris serta perencanaan jangka pendek dan jangka panjang.
 5. Pemasukan evaluasi program dan evaluasi sekolah secara keseluruhan dalam proses manajemen sekolah, termasuk ketentuan bagi pengembangan indikator-indikator kualitas.
 6. Akuntabilitas sekolah kepada masyarakat dan otoritas pusatnya demi pencapaian tujuan pendidikan dan prioritas-prioritas pembelajaran yang disepakati.

Pengembangan dana bantuan global sekolah untuk menggantikan pendekatan yang ada sedikit demi sedikit bagi pemerataan sumberdaya untuk sekolah. Keadilan dilihat sebagai isu pokok dalam merancang formula pemerataan.

Laporan Karmel tersebut merupakan salah satu dokumen paling berpengaruh dalam pendidikan sekolah di Australia, karena ia menekankan bahwa: "pengurangan pengawasan yang sentralistik terhadap pengelolaan sekolah adalah penting untuk menjamin efektifitas dan keadilan dalam pendidikan sekolah".¹ Untuk mencapai hal ini, ia merekomendasikan bahwa beberapa sumber daya harus di arahkan kepada kebutuhan pendidikan tertentu, dengan melibatkan para orangtua dan guru dalam memutuskan penggunaan sumber daya tersebut".¹¹ Tampak bahwa mereka yang lebih dekat dengan sekolah kemungkinan akan lebih bisa merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan lebih efisien dan efektif dibanding kewenangan pusat yang jauh. Kemudian laporan tersebut memperkenalkan dan mendukung skema yang memberikan pendanaan bagi staf sekolah, yang seringkali dengan bantuan perwakilan masyarakat, untuk mengidentifikasi prioritas tingkat sekolah dan merencanakan program-program yang lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah. Dengan perubahan-perubahan tersebut memungkinkan Australia menjadi 'pemimpin dunia' dalam MBS.

e. Model MBS di Selandia Baru

Pada Oktober 1987, sebuah satuan tugas diminta oleh Perdana Menteri David Lange untuk administrasi pendidikan menengah. Motifnya adalah 'pengelolaan mutu pendidikan (*'administering for excellence'*). Sebuah

analisis situasi menemukan sejumlah kelemahan serius, yaitu: (1) sentralisasi yang berlebihan dalam pembuatan keputusan, (2) kerumitan, (3) kurangnya informasi dan pilihan, (4) kurangnya praktek manajemen yang efektif, dan (5) perasaan ketidakberdayaan (Rae.¹ Laporan Picot (*Picot Report*) menyatakan bahwa sedikit sekali keputusan dibuat di tingkat lokal, dan ketika keputusan tersebut ditentukan di pusat, maka peraturan dan prosedur sangat mempengaruhinya. Segi lain yang teramati adalah bahwa pembuatan keputusan cenderung lamban, dan bahwa sistem tersebut terutama sekali rentan terhadap pengaruh politik kelompok penekan.

Laporan Picot merekomendasikan 95% anggaran pendidikan harus diserahkan ke pihak sekolah secara langsung. Hal ini menghasilkan sebuah rekonstruksi sistem sekolah nasional yang sangat mengutamakan manajemen dan pengawasan sekolah lokal. Tujuannya adalah untuk menghapus "keterlibatan kementerian (pusat) yang berlebihan," "fragmentasi sektoral" dan "pengurangan prioritas di pusat." Para staf dipilih dan dipekerjakan oleh dewan sekolah di tingkat lokal. Meskipun ada sebuah kerangka kurikulum nasional, jumlah staf yang dipekerjakan di tingkat sistem (nasional) sedikit, yang sebagian besar mereka bertugas memonitor pelaksanaan di tingkat sekolah serta memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah, terutama di bidang pelayanan pendidikan khusus (Beare, 1991).²

Reformasi manajemen lokal yang diusulkan dalam Laporan Picot meliputi perubahan-perubahan besar dalam administrasi pusat. Sebuah buku, *Tomorrow's Schools* (Sekolah-sekolah Masa Depan), diterbitkan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Reformasi ini terjadi pada Oktober 1989 untuk tahun pelajaran 1990. Semua sekolah dasar dan sekolah menengah segera mengajukan skema itu di bawah pendanaan formula. Kantor-kantor daerah ditutup pada Oktober 1989. Para staf kantor tersebut didorong untuk mendirikan Unit Bantuan Pendidikan (*Education Support Units*) yang independen. Dengan demikian, dana tambahan yang dialokasikan diberikan kepada sekolah. Semua sekolah, menengah dan dasar, ditempatkan pada suatu posisi serupa dengan sekolah-sekolah pengelola dana bantuan di Inggris dan Wales.

Beberapa kelompok kerja dibentuk untuk meneliti isu-isu seperti dasar pikiran (*premises*) sekolah, pemeliharaan properti, personil dan pendidikan masyarakat. Masing-masing kelompok kerja menyerahkan laporannya kepada sebuah kelompok evaluasi yang dianggap sangat sukses. Kelompok kerja pendanaan harus menghasilkan dua rumusan untuk gaji guru dan untuk aktivitas operasional. Rumusan ini harus sensitif terhadap pelbagai kebutuhan institusi yang berbeda di bidang yang berbeda pula. Isu keadilan sebagai aspek penting bagi

pertimbangan kelompok kerja pendanaan.

Masing-masing sekolah di bawah pengawasan kebijakan menyeluruh dari dewan pengawas sebuah kelompok mirip dengan badan pengelola di Inggris. Sekolah-sekolah menengah sebelumnya memiliki badan pengelola, tetapi hal ini merupakan pengalaman baru bagi sekolah-sekolah dasar. Masing-masing dewan pengawas terdiri dari lima orangtua yang terpilih, kepala sekolah, seorang anggota terpilih dari staf sekolah, seorang anggota terpilih dari peserta didik (sekolah menengah) dan sampai empat orang anggota terpilih. Tugas pertama dewan ini adalah: (1) untuk mempersiapkan piagam sekolah, (2) bekerjasama dengan kepala sekolah, staf dan masyarakat, dan (3) fokus perhatian pada tujuan, sasaran, dan kebijakan sekolah sesuai dengan garis pedoman nasional secara keseluruhan bagi pendidikan (Hill, 1991)². Dengan perencanaan ini, piagam sekolah disetujui oleh Menteri Pendidikan atas rekomendasi departemen. Hal ini menjadi suatu perjanjian antara negara dan sekolah, dan antara sekolah dan masyarakatnya. Piagam ini digunakan untuk memonitor sekolah. Pelatihan kepala sekolah dan dewan pengawas diadakan secara ekstensif (sangat mirip dengan perencanaan yang dibuat di sekolah-sekolah Victoria).

Pada awalnya, banyak tantangan dari sekolah-sekolah untuk mengadakan perubahan, namun karena pemahaman mengenai skema tersebut menjadi semakin tersebar luas dan pelatihan dikembangkan, maka tantangan tersebut mulai menghilang.²⁴ Sebagian besar pengawas, penasehat dan petugas menghadapi suatu perubahan peran besar. Banyak peran ditinggalkan, sebagaimana disebutkan di atas, yang mungkin berhubungan dengan Unit Bantuan Pendidikan independen yang baru, atau Inspektorat Pemeriksa dan Audit (*Review and Audit Inspectorate*).

f. Model MBS di Prancis

Prancis adalah negara maju yang agak lambat dalam mereformasi sistem pendidikan. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia sudah memulainya sejak awal tahun 1970-an, namun Prancis baru melakukan desentralisasi pendidikan secara sungguh-sungguh mulai tahun 1980-an.

Sistem pendidikan di Prancis dikenal sebagai sentralistis yang tradisional. Sekolah dasar di arahkan oleh inspektorat administratif dan pedagogik. Kepala sekolah diambil dari guru dengan tanggung jawab fungsional khusus seperti mengkoordinasi, mengorganisasi, dan berhubungan dengan orang tua dan pihak keamanan. Kepala sekolah dibebaskan dari tugas mengajar berdasarkan besar kecilnya sekolah yang dipimpinnya. Di sini terdapat hubungan keterkaitan antara inspektor/pengawas daerah dengan para guru.

Pada masa pemerintahan Chirac ada upaya melalui suatu keputusan untuk menambah kekuasaan kepala sekolah, terutama pada bidang personalia dan kurikulum, namun hanya sebagian saja yang berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa para guru lebih suka menjaga otoritas dari jarak jauh daripada jarak dekat. Pada saat itu terjadi kesepakatan untuk meningkatkan gaji kepala sekolah dasar.

Sekolah menengah atas (*secondary school*) telah menjadi lembaga korporasi di mana badan pengelola (*board of governors*) memiliki kontrol terhadap anggaran dan tanggung jawab legal. Kerangka kerja otonomi seperti ini telah berlangsung sejak beberapa waktu sebelumnya, namun kebebasan bertindak yang lebih besar lagi hilang ketika badan pengelola menjadi subjek kontrol di dalam hierarki pemerintahan yang sentralistik.

Sebenarnya, upaya desentralisasi pendidikan di Prancis sudah dimulai sejak tahun 1969 sebagai respons atas huru-hara pada tahun 1968. Namun, pada saat itu sekolah menengah atas (*secondary school*) masih dilihat sebagai sekolah tradisional sentralistik (*traditionally school centered*) di mana pelaksanaan desentralisasi masih dibayang-bayangi oleh sentralisasi pendidikan.

Reformasi pendidikan yang muncul pada tahun 1969 menghasilkan partisipasi secara luas dalam badan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas (*secondary school*) dengan wakil-wakil sekolah terdekat seperti staf, orang tua, dan peserta didik, keterlibatan komunitas lokal seperti dewan kota praja, wakil karyawan atau persatuan karyawan dan kepala sekolah. Kepala sekolah yang ditunjuk dari pusat, berperan sebagai pimpinan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dalam hal anggaran. Namun, anggaran tersebut tidak mencakup bidang personalia seperti staf dan karyawan yang masih dipilih dan ditentukan oleh pusat.

Kemajuan yang sangat berarti terjadi pada tahun 1982-1984 karena dengan otoritas lokal memiliki tanggungjawab terhadap dukungan finansial. Kekuasaan badan pengelola sekolah menengah atas diperluas ke beberapa area. Sementara itu, pengangkatan dan pemilihan guru masih dilaksanakan oleh pusat dengan ketat. Masing-masing sekolah menerima anggaran secara *lumpsum* terhadap jam mengajar guru. Kepala sekolah menentukan jenis staf yang dibutuhkan untuk program-program khusus yang dilaksanakan sekolah.

Upaya untuk mendesentralisasikan keputusan yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran terjadi tahun 1984 pada saat diluncurkan rencana lima tahunan pada lingkup terbatas untuk tingkat pendidikan tinggi (*college level*).

g. Model MBS di Inggris

Kebijakan pemerintahan Thatcher (1986) memberi bukti yang paling nyata dalam reformasi pendidikan di Inggris. Saat itu, Thatcher mengemukakan

bahwa keseimbangan otonomi, kekuasaan, dan akuntabilitas pendidikan sedang dilakukan definisi ulang.

Beberapa inisiatif reformasi pendidikan kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pendidikan (*Education Act*) tahun 1988, antara lain berisi: (1) kurikulum inti nasional, (2) ujian nasional, dan (3) pelaporan nasional¹². Kontrol terhadap anggaran sekolah diberikan kepada lembaga pengelola/pengawas beserta para kepala sekolah menengah atas (*secondary school* dan sebagian sekolah dasar (*primary school* dalam waktu lima tahun. Juga memberi pilihan kepada orang tua dengan cara membantu mengembangkan diversifikasi, meningkatkan akses, mengizinkan sekolah-sekolah negeri untuk keluar dari kontrol otoritas pendidikan lokal (*local education authority*) berdasarkan suara mayoritas orang tua peserta didik. Sementara itu, bantuan dana pendidikan dari pemerintah pusat diberikan langsung kepada masing-masing sekolah. Itulah kiranya mengapa model MBS di Inggris disebut *Grant Maintained School (GMS)* atau manajemen dana sukelola pada tingkat lokal.

Undang-undang 1988 telah berubah dalam "hal nilai fundamental yang menopang sistem dan juga praktik yang meliputinya" (O'Donoghue dan Dimmock). Enam perubahan struktural utama diadopsi oleh Undang-undang ini untuk memfasilitasi MBS yaitu: (1) kurikulum nasional pada mata pelajaran inti ditentukan oleh Whitehan (pemerintah); (2) ujian nasional dilaksanakan bagi peserta didik pada kelas 7, 11, 14 dan 16; (3) sekolah-sekolah pengelola dana bantuan dibentuk yang dapat mengembangkan kewenangan pendidikan lokal mereka agar memperoleh dukungan keuangan penuh secara langsung dari Whitehan; (4) sekolah lanjutan teknik kejuruan dibentuk (seperti sekolah lanjutan pendidikan kejuruan Amerika); (5) kewenangan *the Inner London Education* dilimpahkan kepada otoritas pendidikan lokal; dan, (6) skema manajemen sekolah lokal dibentuk dengan melibatkan:

1. Pendaftaran terbuka di setiap sekolah sesuai dengan otoritas pendidikan lokal;
2. Alokasi sumberdaya berdasarkan formula bagi masing-masing sekolah;
3. Menentukan beberapa prioritas di tiap-tiap lingkungan sekolah dalam mengeluarkan alokasinya;
4. Memberi wewenang kepada badan pengelola di tiap-tiap sekolah untuk menggaji dan memecat staf dan guru;
5. Penyediaan informasi bagi para orangtua mengenai kinerja sekolah

Dampak dari kebijakan tersebut adalah kekuasaan pemerintah daerah dalam otoritas pendidikan semakin berkurang setelah dilimpahkan ke masing-masing sekolah terutama masalah anggaran dan kepegawaian yang diberikan langsung kepada masing-masing sekolah. Sebaliknya peran pemerintah pusat dalam penentuan kurikulum inti yang bersifat nasional semakin kuat setelah

sebelumnya dibuat oleh otoritas lokal. Tahap awal pelaksanaan model MBS di Inggris dengan menekankan pada pengelolaan pembiayaan pendidikan yang semula diatur ketat oleh pemerintah. Pengelolaan anggaran ini dimulai dari penentuan kebutuhan oleh masing-masing sekolah hingga pada pengalokasian dananya berdasarkan prioritas.

Penerapan MBS selanjutnya dilindungi dengan Undang-Undang Pendidikan yang mengatur penetapan kurikulum, pelaksanaan ujian nasional, dan pengelolaan pendidikan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat luas. Keberadaan Undang-Undang Pendidikan tersebut yang didahului dengan pelaksanaan MBS ini, terlihat jelas arahnya untuk melindungi inisiatif masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dan bukan untuk menggerakkan masyarakat.

Melalui UU tersebut para pengelola dapat mengajukan suatu usulan di antara dewan orangtua, agar sekolah meninggalkan pengawasan Otoritas Pendidikan Lokal dan menerima pembiayaannya dari pemerintah pusat sebagai dana bantuan langsung. Pembiayaan tersebut sesuai dengan apa yang diberikan Otoritas Pendidikan Lokal dengan tambahan meliputi pelayanan-pelayanan yang dipakai dan dibiayai Otoritas Pendidikan Lokal. Sungguhpun sekolah diberi status Pengelola Dana Bantuan, ia tetap secara teknis merupakan sebuah sekolah negeri. Sekolah-sekolah Pengelola Dana Bantuan menerima 100% dana dari anggaran lokal mereka. Semenjak 1994, pembiayaan sekolah Pengelola Dana Bantuan diberikan melalui suatu entitas baru yang disebut Badan Pendanaan bagi Sekolah, yang pada dasarnya menciptakan sebuah sistem pendanaan negara ke lingkungan sekolah. Tingkatan pembiayaan masih dihubungkan dengan Otoritas Pendidikan Lokal di mana ia dialokasikan. Bagi Odden dan Busch, hal ini menciptakan beberapa isu keadilan berkaitan dengan perbedaan pendanaan sekolah ketika jumlah dan karakter peserta didik serupa. Hal tersebut juga berkenaan dengan perbedaan-perbedaan pendanaan setiap peserta didik untuk semua Otoritas Pendidikan Lokal.

Manajemen Sekolah Lokal (MSL) pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan MBS, yang membatasi kewenangan Otoritas Pendidikan Lokal, serta melimpahkan pendanaan dan manajemen sumberdaya kepada para badan pengelola dan staf sekolah. Dengan MSL, sekolah-sekolah sebagian besar didanai berdasarkan jumlah peserta didik yang mendaftar. Penurunan angka kelahiran mengakibatkan penurunan jumlah peserta didik sekolah, yang berarti kelebihan tempat di banyak sekolah. Pendaftaran terbuka dimungkinkan, yang menghilangkan batas-batas tentang pendaftaran peserta didik dan memungkinkan para orangtua memilih sekolah yang mereka inginkan anak-anaknya, yang hanya tunduk kepada kapasitas fisiknya. Karena beberapa anggaran

sekolah berkaitan erat dengan jumlah peserta didik, sekolah-sekolah didorong untuk bersaing mendapatkan peserta didik supaya mempertahankan atau meningkatkan pendapatannya. Pemerintah yakin bahwa tekanan pembiayaan di bawah MSL pada akhirnya akan membuat sekolah-sekolah kompetitif, dan dengan demikian meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan pemaparan tentang penerapan MBS pada beberapa negara dapat disimpulkan bahwa fokus penekanan reformasi sekolah seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Negara	Fokus
1	Hongkong	Inisiatif sekolah
2	Selandia Baru	Pengelolaan anggaran sekolah
3	El Salvador	Pelibatan orangtua & Masyarakat
4	Madagaskar	Peran serta masyarakat pada pendidikan dasar
5	Prancis	Kewenangan pada Badan Pengelola Sekolah
6	Nikaragua	Sekolah yang otonom mengelola personil, anggaran, kurikulum dan pedagogi
7	Australia	Pengelolaan kurikulum oleh sekolah, dan pengelolaan dana
8	Amerika Serikat	Pengelolaan sekolah di Sekolah sendiri
9	Inggris	Pengelolaan dana di tingkat sekolah
10	Kanada	Pengambilan keputusan di tingkat sekolah
11	Indonesia	Peningkatan Mutu (MPMBS)

B. Model MBS Di Indonesia

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2004 beserta sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman pelaksanaannya terutama PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kota/Kabupaten, maka digulirkan pula otonomi pendidikan dengan model MBS. Model MBS di Indonesia pada awalnya disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih tinggi kepada sekolah, fleksibilitas, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak

tergantung. Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku¹². Sementara itu, pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis di mana warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

Dalam konteks otonomi pendidikan, sekolah mempunyai keleluasaan untuk berinovasi dan berimprovisasi sebagai bentuk kreativitas yang bisa dikembangkannya. Dalam hal ini sekolah pada dasarnya mendapat kesempatan untuk menentukan sendiri kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan, dengan tujuan lebih meningkatkan kualitas dan daya tarik sekolah tersebut. Dengan otonomi, berbagai kebijakan yang bisa dilakukan oleh sekolah antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan sendiri guru-guru yang akan direkrut;
2. Menentukan sendiri kriteria dan jumlah calon peserta didik yang akan diterima;
3. Menentukan sendiri sistem penilaian kinerja guru dan peserta didik;
4. Menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pendidikan;
5. Menentukan sendiri biaya-biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik;
6. Menentukan sendiri metodologi pembelajaran dan kurikulum pendidikan yang akan dipakai;
7. Menentukan sendiri buku-buku paket yang akan dipakai, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, jelas tidak diperlukan adanya penyeragaman antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, atau daerah yang satu dengan daerah yang lain. Meskipun demikian, kemandirian-kemandirian itu harus bersifat inklusif dan tidak boleh eksklusif. Semuanya mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran pemerintah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi pendidikan lebih bersifat pemberi inspirasi, koordinator, dan fasilitator. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain utama dalam keseluruhan sistem pendidikan yang ada. Jadi, kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh kreativitas dan daya inovasi warga sekolah.

Tujuan implementasi MBS adalah:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan

- memberdayakan sumber daya yang tersedia;
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama;
3. Meningkatkan tanggung-jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah;
4. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Melalui MBS, pemecahan masalah internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya cukup dibicarakan di dalam sekolah dengan masyarakatnya sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah daerah apalagi sampai ke pemerintah pusat. Tugas pemerintah (pusat dan daerah) adalah memberikan fasilitasi dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat menemui jalan buntu dalam suatu pemecahan masalah. Fasilitasi bisa berbentuk *capacity building*, bantuan teknis pembelajaran atau manajemen sekolah, subsidi bantuan sumber daya pendidikan, serta kurikulum nasional dan pengendalian mutu pendidikan baik tingkat daerah maupun pusat.

Paradigma MBS beranggapan bahwa satu-satunya jalan yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan melalui interaksi dari ketiga pihak tersebut. Dengan adanya program sekolah yang relevan, diharapkan sekolah akan mampu menggali partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan sekolah, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah. Untuk selanjutnya, konsep Komite Sekolah amat diperlukan baik dalam arti keanggotaan maupun perannya.

Munculnya konsep MBS memang menjadi suatu kebutuhan bagi sekolah di Indonesia atas berbagai perubahan yang terjadi sejak otonomi daerah digulirkan. Dalam Panduan MBS (Depdiknas, 2003) dikemukakan beberapa kebutuhan mendesak untuk dikaji ulang tentang fungsi sekolah sebagai pusat pembelajaran sebagai berikut.⁵

Pertama, ketika perubahan yang sangat cepat terjadi seperti sekarang ini, kumpulan pengetahuan dan pengalaman masa lalu yang digunakan untuk membimbing anak-anak, ternyata tidak dapat memenuhi harapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sesungguhnya orang tua sering kali tidak merasa pasti dibandingkan dengan anak-anaknya, demikian pula keadaan bagi komunitas orang dewasa pada umumnya. Nilai-nilai tradisional dan kebiasaan yang diwarisi kenyataannya telah kehilangan otoritas terhadap anak-anak

muda, dan sebagai suatu bimbingan untuk mengambil tindakan yang tepat di dalam suatu lingkungan yang sedang mengalami perubahan ternyata juga tidak memadai.

Kedua, sekolah hendaknya menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa pengetahuan baru yang menembus keluar dinding yang membatasinya tidak saja mencapai dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dikuasai sekolah, melainkan juga jauh lebih penting bagi kehidupan riil peserta didiknya. Dalam konteks ini, sekolah tidak saja harus memperbarui persediaan pengetahuannya, tetapi juga harus dapat menyesuaikan diri terhadap fungsi baru cara mengajar siswa agar mereka dapat menguasai pengetahuan yang akan mereka jumpai di dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolahnya.

Ketiga, di dalam operasional persekolahan dan di dalam pelaksanaan pembaruan sekolah yang diperlukan adalah kemampuan guru. Kemampuan guru ini penting, mengingat guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan proses pembelajaran peserta didik.

Memperhatikan berbagai tantangan dan peluang tersebut, setiap sekolah diharapkan semakin dapat mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang ada. Sekolah juga dapat mengetahui kebutuhannya, khususnya peserta didik, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhannya.

Bertolak dari semua ini, MBS yang diterapkan dituntut dapat memandirikan dan memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) yang lebih luas. Dengan demikian, sekolah-sekolah dengan model MBS diharapkan akan menjadi sekolah mandiri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) tingkat kemandiriannya tinggi, bersifat adaptif, antisipatif dan proaktif, (2) memiliki jiwa kewirausahaan tinggi, (3) bertanggung jawab terhadap kinerja sekolah, (4) memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, (5) memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, (6) komitmen yang tinggi pada dirinya, dan (7) prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.⁵

Menjelang tahun ketujuh sejak uji coba MBS di Indonesia tahun 1999, nampaknya masih banyak hal yang harus dibenahi terutama belum jelasnya kewenangan apa saja yang harus diberikan kepada masing-masing sekolah. Para birokrat pendidikan di pusat masih enggan untuk melimpahkan kewenangan kepada sekolah secara langsung. Para pejabat pendidikan di daerah yang baru saja menjabat, lebih cenderung ingin menguasai pendidikan. Hal ini tampak dari berbagai pernyataan bupati/wali kota bahwa mati hidupnya para guru berada di tangan mereka.

Munculnya MBS di Indonesia tidak berasal dari inisiatif warga masyarakat, tetapi dari pemerintah sehingga eksistensi MBS berbeda dengan negara-negara lain yang idenya justru berasal dari masyarakat. Kondisi ini bisa dimengerti karena setelah 32 tahun Indonesia berada dalam cengkeraman pemerintahan

otoriter yang membuat warganya takut untuk mengeluarkan pendapat dan inisiatif. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan pun berbeda dengan negara-negera lain yang peran serta masyarakatnya sudah tinggi. Di Indonesia, penerapan MBS diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000-2004.

Empat faktor penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBS di Indonesia, yakni kewenangan, pengetahuan dan keterampilan, sistem informasi, serta sistem penghargaan.²²

a. Kewenangan yang dimiliki oleh sekolah

Kepala sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan dibandingkan dengan sistem manajemen pendidikan yang dikontrol oleh pusat. Besarnya kewenangan sekolah bergantung bagaimana MBS dapat diimplementasikan. Pemberian kewenangan secara utuh tidak mungkin dilaksanakan sekaligus, tetapi memerlukan proses transisi dari manajemen terpusat ke MBS. Kewenangan lebih besar yang dimiliki sekolah dalam pengambilan keputusan perlu dilaksanakan secara demokratis, antara lain dengan melibatkan semua pihak khususnya guru dan orang tua peserta didik; membentuk tim pengambil keputusan dalam hal-hal yang relevan dengan tugasnya; serta menjalin kerjasama dengan masyarakat dan dunia kerja.

b. Pengetahuan dan Keterampilan

Seluruh warga sekolah perlu memiliki pengetahuan untuk meningkatkan prestasi, memahami dan melaksanakan berbagai teknik, seperti *quality assurance*, *quality control self-assessment*, *school review*, *benchmarking*, dan analisis SWOT. Untuk itu, sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diwujudkan melalui pelatihan dan studi lanjut.

c. Sistem Informasi yang Jelas

Sekolah yang melaksanakan MBS perlu memiliki informasi yang jelas tentang program yang netral dan transparan, karena dari informasi tersebut seseorang akan mengetahui kondisi sekolah. Informasi ini diperlukan untuk monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas sekolah. Informasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah, antara lain berkaitan dengan kemampuan guru, prestasi peserta didik, kepuasan orang tua dan peserta didik, serta visi dan misi sekolah.

d. Sistem Penghargaan

Sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan bagi warganya yang berprestasi, untuk mendorong kariernya. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja dari kalangan warga sekolah. Oleh karena itu, sistem penghargaan

yang dikembangkan harus proporsional, adil, dan transparan. Selain itu, pemberlakuan *punishment* bagi staf yang melanggar harus ditegakkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sedangkan menurut Brown implementasi MBS di sekolah akan berjalan efektif apabila menjalankan prinsip MBS yang mencakup otonomi, fleksibilitas, responsibilitas, kerja sama, dan peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat.⁸

a. Otonomi Sekolah

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, otonomi diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus-menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah (sustainabilitas). Istilah otonomi juga sama dengan istilah "swa", misalnya swasembada, swakelola, swadana, swakarya, dan swalayan. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Kemandirian sekolah yang dimaksudkan harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu: (a) kemampuan mengambil keputusan yang terbaik; (b) kemampuan berdemokrasi menghargai perbedaan pendapat; (c) kemampuan memobilisasi sumber daya; (d) kemampuan memilih cara pelaksanaan terbaik; (e) kemampuan berkomunikasi dengan cara efektif; (f) kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah; (g) kemampuan adaptif dan antisipatif; (h) kemampuan bersinergi dan berkolaborasi; dan (i) kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.⁸

b. Fleksibilitas

Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan-keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan keluwesan-keluwesan yang lebih besar diberikan kepada sekolah, sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber dayanya. Dengan cara ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Namun demikian, keluwesankeluwesan yang dimaksud harus tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Brown, MBS menekankan kepada manajemen sekolah yang fleksibel dan responsif. Fleksibilitas di sini dimaksudkan adalah kemampuan sekolah melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengelola lingkungan

sekolah dan memotivasi para staf dan guru. Fleksibilitas juga merupakan kemampuan melakukan perubahan dan kecepatan mengikuti perkembangan IPTEK dan fasilitas yang dipergunakan sekolah, serta responsif yakni cepat tanggap dan mampu melayani kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Keseluruhannya sangat berpengaruh terhadap kinerja sekolah.

c. Kerja Sama

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan menuntut adanya kerja sama dan kolaborasi antara staf yang ada di dalam sekolah. Dampaknya akan menguntungkan anak didik, khususnya pentingnya *team work* dalam pembelajaran. Menurut Little, bahwa guru-guru yang "*terisolasi*" di dalam kelas, pengalaman menunjukkan bahwa banyak guru yang *broken* (gagal dalam mengajar). Keuntungan lebih jauh adanya kerja sama dan pertemanan antar staf adalah persiapan guru mengajar akan lebih meningkat, pembelajaran lebih lama, mendalam, dan fleksibel.

Selanjutnya Little menegaskan bahwa kualitas pembelajaran melalui kerja sama dan pertemanan antar staf ini dapat ditempuh melalui empat cara, yaitu (a) ketika guru mengajar perlu adanya monitoring, evaluasi, dan supervisi, untuk selanjutnya diberikan komentar perbaikan; (b) sekolah melakukan koordinasi dan perencanaan yang konsisten khususnya untuk persiapan dan skenario pembelajaran; (c) minimal setiap guru/kelas (rombongan belajar) disediakan satu kelas ruangan; dan (d) guru-guru belajar bersama (sekarang yang lebih dikenal dengan KKG) dan atau *mentraining* satu dengan lainnya.

d. Peningkatan Partisipasi

Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Warga sekolah dan masyarakat (orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dll) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan partisipasi masyarakat di landasi dengan keyakinan bahwa jika seseorang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai "rasa memiliki" terhadap sekolah sehingga mereka juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Dengan demikian, semakin besar tingkat partisipasi, semakin besar pula rasa memiliki; semakin besar rasa memiliki, semakin besar pula rasa tanggung jawab; dan semakin besar rasa tanggung jawab, semakin besar pula dedikasinya. Tentu saja pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi.⁸

Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan, kerja sama

yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan. Kerja sama yang dimaksud adalah adanya sikap dan perbuatan lahiriah kebersamaan/kolektifitas untuk meningkatkan mutu sekolah. Kerja sama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dengan masyarakat erat, dan adanya kesadaran bersama bahwa "output" sekolah merupakan hasil kolektif *teamwork* yang kuat dan cerdas. Akuntabilitas sekolah merupakan pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Sementara itu, demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang terlembagakan melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan, hak asasi manusia, serta kewajibannya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan memperhatikan hal-hal pokok dalam model MBS tersebut, sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya, seperti: (1) menetapkan sasaran peningkatan mutu; (2) menyusun rencana peningkatan mutu; (3) melaksanakan rencana peningkatan mutu; dan (4) melaksanakan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Di samping itu, juga akan memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah.

Pelaksanaan MBS dengan desentralisasi pendidikan memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain:⁸

1. Sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah.
2. Peranan pemerintah merumuskan kebijakan yang menjadi prioritas dan merumuskan pelaksanaan MBS. Sekolah menjabarkannya sesuai dengan potensi lingkungannya.
3. Perlu dibentuk *School Council* (dewan sekolah/komite sekolah) yang keanggotaannya terdiri dari guru, kepala sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat.
4. MBS menuntut perubahan perilaku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi menjadi lebih profesional dan manajerial dalam pengoperasian sekolah.
5. Dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen yang terkait dengan MBS perlu diadakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan sejenisnya.
6. Keefektifan MBS dapat dilihat dari indikator-indikator sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa penerapan model

MBS di Indonesia bukan atas prakarsa masyarakat melainkan inisiatif dari pemerintah sebagai warisan otoriterisme pada jaman Orde Baru, maka dalam penerapannya memerlukan upaya-upaya maksimal untuk menyamakan pandangan semua warga sekolah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Mengubah pendekatan manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah bukanlah merupakan *one-shot and quick-fix*, akan tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan persekolahan. Oleh karena itu, strategi utama yang perlu ditempuh dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut.¹⁷

1. Mensosialisasikan konsep manajemen berbasis sekolah ke seluruh warga sekolah, yaitu guru, peserta didik, wakil kepala sekolah, karyawan dan unsur-unsur terkait lainnya (orangtua murid, pengawas, wakil Dinas P dan K Kabupaten/Kota, wakil Dinas Pendidikan Provinsi, dsb.) baik melalui seminar, diskusi, forum ilmiah, maupun media masa. Hendaknya dalam sosialisasi ini juga dibaca dan dipahami sistem, budaya, dan sumber daya sekolah yang ada secara cermat-cermatnya dan direfleksikan kecocokannya dengan sistem, budaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah.
2. Melakukan analisis situasi internal sekolah dan eksternal sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah dalam rangka mengubah manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah. Tantangan adalah selisih (ketidakesesuaian) antara keadaan sekarang (manajemen berbasis pusat) dan keadaan yang diharapkan (manajemen berbasis sekolah). Karena itu, besar kecilnya ketidakesesuaian antara keadaan sekarang (kenyataan) dan keadaan yang diharapkan (idealnya) memberitahukan besar kecilnya tantangan (loncatan).
3. Merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi (butir 2). Segera setelah tujuan situasional ditetapkan, kriteria kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya ditetapkan. Kriteria inilah yang akan digunakan sebagai standar atau kriteria untuk mengukur tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya.
4. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Untuk mencapai tujuan situasional yang telah ditetapkan, maka perlu diidentifikasi fungsi-fungsi mana yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi antara lain: pengembangan kurikulum, pengembangan tenaga kependidikan dan nonkependidikan, pengembangan peserta didik, pengembangan iklim akademik sekolah,

- pengembangan hubungan sekolah-masyarakat, pengembangan fasilitas, dan fungsi-fungsi lain.
5. Menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunity, and Threat*). Analisis SWOT dilakukan dengan maksud mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan situasional yang telah ditetapkan. Berhubung tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. Tingkat kesiapan harus memadai, artinya, minimal memenuhi ukuran kesiapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan situasional, yang dinyatakan sebagai: *kekuatan*, bagi faktor yang tergolong internal; *peluang*, bagi faktor yang tergolong faktor eksternal. Sedang tingkat kesiapan yang kurang memadai, dinyatakan bermakna: *kelemahan*, bagi faktor yang tergolong faktor internal; dan *ancaman*, bagi yang tergolong faktor eksternal.
 6. Memilih langkah-langkah pemecahan (peniadaan) persoalan, yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selama masih ada persoalan, yang sama artinya dengan ada ketidaksiapan fungsi, maka tujuan situasional yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, agar tujuan situasional tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan fungsi. Tindakan yang dimaksud lazimnya disebut *langkah-langkah pemecahan persoalan*, yang hakekatnya merupakan tindakan mengatasi makna kelemahan dan/atau ancaman, agar menjadi kekuatan dan/atau peluang, yakni dengan memanfaatkan adanya satu/lebih faktor yang bermakna kekuatan dan/atau peluang.
 7. Berdasarkan langkah-langkah pemecahan persoalan tersebut, sekolah membuat rencana strategis sekolah, beserta program-programnya untuk merealisasikan rencana strategis tersebut. Sekolah tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah yang ideal, sehingga perlu dibuat skala prioritas.
 8. Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana strategis manajemen berbasis sekolah. Dalam pelaksanaan, semua input yang diperlukan untuk berlangsungnya proses (pelaksanaan) manajemen berbasis sekolah harus siap. Jika input tidak siap/tidak memadai, maka tujuan situasional tidak akan tercapai. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan adalah pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, dan pengelolaan proses pembelajaran.
 9. Memonitoring terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil manajemen berbasis sekolah perlu dilakukan. Hasil pantauan proses dapat digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan penyelenggaraan dan hasil evaluasi

dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan situasional yang telah dirumuskan. Demikian kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, sehingga proses dan hasil manajemen berbasis sekolah dapat dioptimalkan.

C. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Perbaikan manajemen pendidikan lebih ditekankan pada perubahan sistem dan pola pikir yang selama ini posisi kepala sekolah dan *stakeholder* lebih banyak bersifat pasif dan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Perubahan-perubahan manajemen dilakukan seperti dilukiskan pada Gambar berikut.

Pergeseran Pendekatan Manajemen Pendidikan:
Dari Berbasis Pusat Menuju Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Pusat	Menuju	Manajemen Berbasis Sekolah
Sub-ordinasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Otonomi
Pengambilan keputusan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pengambilan keputusan
Terpusat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Partisipatif
Ruang gerak kaku	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ruang Gerak Luwes
Pendekatan birokratik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pendekatan Profesionalisme
Sentralistik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Desentralistik
Diatur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Motivasi diri
Overregulasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Deregulasi
Mengontrol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Mempengaruhi
Mengarahkan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Memfasilitasi
Menghindari resiko	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Mengolah resiko
Gunakan uang semuanya	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Gunakan seefisien mungkin
Individual cerdas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teamwork kompak & cerdas
Informasi terpribadi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Informasi terbagi
Pendelegasian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pemberdayaan
Organisasi herarkis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Organisasi datar

Untuk menyamakan persepsi tentang aspek-aspek perubahan dari manajemen pola lama menuju MBS akan dijelaskan secara ringkas setiap aspek sebagai berikut.

1. Sub-Ordinasi Menuju Otonomi

Pada manajemen berbasis pusat, sekolah merupakan sub-ordinasi yang hanya melaksanakan kebijakan dari pusat, sehingga sifat ketergantungannya sangat tinggi, warga sekolah bersifat apatis, dan lambat mengalami kemajuan. Sekolah tidak berdaya dan tidak memiliki kemandirian sehingga kreativitas dan prakarsanya tidak nampak. Pada manajemen berbasis sekolah, sekolah memiliki otonomi (kemandirian) untuk berbuat yang terbaik bagi sekolahnya. Pusat hanya berfungsi sebagai kordinatif saja dan menetapkan standar secara nasional. Ketergantungan pada tingkat pusat semakin berkurang, sehingga sekolah semakin mandiri dalam melakukan perubahan. Kalau sekolah tidak melakukan perubahan maka sekolahnya sendiri tidak akan berubah. Oleh karena itu kemandirian ini menuntut kemampuan sekolah untuk mengatur dan mengurus sekolahnya menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah di bawah payung peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pola Pengambilan Keputusan Terpusat Menjadi Pengambilan Keputusan Partisipatif

Berbeda dengan pengambilan keputusan pada manajemen berbasis pusat yang ditandai oleh *one man show*, lamban hasilnya, dan sering tidak pas dengan kebutuhan sekolah, sedang pengambilan keputusan dengan model manajemen berbasis sekolah semua warga sekolah dilibatkan. Dengan demikian hasil lebih cepat, lebih tepat dan lebih efektif karena sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pelibatan warga sekolah dan *stakeholder* lainnya dalam pengambilan keputusan tentu saja disesuaikan dengan relevansi, keahlian, dan kompatibilitas keputusan.

3. Dari Ruang Gerak Kaku Menuju Ruang Gerak Luwes

Akibat banyaknya tugas, fungsi dan hak sekolah yang ditangani oleh Pusat, Wilayah, dan Dinas P dan K, maka ruang gerak sekolah kaku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena semua sekolah harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pusat sekalipun dari segi geografis, demografis, dan karakteristik warga sekolah dan masyarakat berbeda-beda sehingga kadang-kadang kepala sekolah sulit dan kaku dalam mengambil keputusan. Sedangkan pada pendekatan manajemen berbasis sekolah merupakan kebalikan dari pusat. Ruang gerak sekolah sangat luwes, dinamika sekolah semakin tinggi, dan kreativitas guru dan staf lebih tinggi karena apa yang selama ini dilakukan oleh Pusat, Wilayah, dan Dinas Pendidikan, sebagian besar kini diserahkan ke sekolah.

4. Pendekatan Birokrasi Menuju Pendekatan Profesionalisme

Pendekatan birokrasi yang selama ini diterapkan di sekolah mengakibatkan kepala sekolah lebih banyak bersifat birokratis dan kaku dalam menjalankan kepemimpinan sekolah. Hal ini mereka lakukan untuk mengamankan kebijakan dari pusat. Sedangkan pada pendekatan profesionalisme, apa yang dilakukan oleh sekolah didasarkan atas kompetensi dan profesionalisme kepala sekolah. Kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya lebih bersifat demokratis, transformatif dan mengedepankan *teamwork*. Kepala sekolah tampil sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator, bukan didasarkan pada kekuasaan.

5. Manajemen Sentralistik Menuju Manajemen Desentralistik

Pada model lama, pusat memiliki kewenangan yang berlebihan, sehingga terjadilah pemusatan kekuasaan di pusat. Pemusatan kekuasaan ini telah menimbulkan dampak negatif pada sekolah, yaitu selain sekolah tidak berdaya, banyak keputusan-keputusan yang tidak efektif dan efisien. Hal ini terjadi karena kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh sekolah, maka tidak jarang sekolah acuh tak acuh terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Sedangkan pada manajemen desentralistik, sebagian besar kewenangan Pusat, Wilayah, dan Dinas Pendidikan diserahkan ke sekolah. Dengan pendekatan ini, maka sekolah akan lebih otonom sehingga keputusan yang dibuat lebih efektif dan efisien.

6. Kebiasaan Diatur Menuju Kebiasaan Memotivasi Diri

Pola perilaku lama yang terbiasa menunggu perintah akan berubah menjadi pola perilaku baru yang bercirikan motivasi diri (dorongan internal). Perubahan ini tentu saja akibat dari otonomi (kemandirian) sekolah yang diberikan oleh Pusat, Wilayah, dan Dinas Pendidikan. Struktur organisasi yang berjiwa otonomi akan mendorong sekolah untuk berinovasi dan berimprovisasi dari dalam diri sekolah, bukan dari tekanan luar.

7. Dari Over-regulasi Menuju Deregulasi

Terlalu banyaknya regulasi pendidikan (over-regulasi) termasuk juklak dan juknis yang diturunkan ke sekolah telah membuat sekolah sulit melaksanakan, bahkan kepala sekolah seperti robot saja yang hanya menunggu perintah sehingga membunuh kreativitas sekolah. Deregulasi pendidikan dengan otonomi akan memperpendek arus kebijakan dan akan mampu menumbuhkan daya kreativitas serta prakarsa sekolah. Selain itu, membuat sekolah sebagai pusat perubahan. Deregulasi juga mampu memberikan fleksibilitas sekolah dalam mengelola kegiatannya.

8. Pola Mengontrol Menuju Mempengaruhi

Sistem sentralistik yang lebih cenderung menekankan pada memberi komando dan mengontrol sudah tidak efektif lagi dalam mengelola sekolah. Kondisi ini tidak cocok lagi dengan model maka manajemen berbasis sekolah yang lebih menekankan pada mempengaruhi menuju pada kemandirian dan

tiemwork. "Mengontrol" lebih cenderung pada hasil atau output, sehingga jika terjadi kesalahan dianggap sudah terlanjur. Sedang pada pola "mempengaruhi" lebih cenderung menekankan pada input dan proses, sehingga terhindar dari kemungkinan terlanjur salah.

9. Pola Mengarahkan Menuju Memfasilitasi

Pada manajemen berbasis pusat lebih menekankan pada pemberian pengarahan (direktif) dengan maksud agar pekerjaan cepat selesai. Sedang pada manajemen berbasis sekolah lebih menekankan pada pola memfasilitasi. Dengan pola memfasilitasi maka inisiatif bagi pelaksana kegiatan di sekolah lebih dominan daripada inisiatif Dinas/Pusat.

10. Dari Menghindari Resiko Menuju Mengelola Resiko

Manajemen tradisional lebih menekankan untuk "menghindari resiko" sehingga kepala sekolah dan stafnya takut dan bahkan tidak mau menanggung resiko terhadap ketetapan yang ditetapkan oleh pusat. Kondisi ini seringkali memberikan peluang bagi sekolah untuk melakukan kecurangan dan manipulasi untuk menyesuaikan dengan harapan dari atasan atau pusat. Sedangkan pada pola manajemen berbasis sekolah lebih menganjurkan untuk berani "mengambil resiko" dalam melakukan inovasi dan dalam mengambil keputusan. Hal ini didasari kenyataan bahwa orang yang berani mengambil resiko cenderung lebih maju dari pada orang yang suka menghindari resiko.

11. Pola Menghabiskan Uang Menuju Menggunakan Uang Seefisien Mungkin

Pola anggaran lama yang menekankan pada "uang harus dihabiskan semua" dan jika sekolah tidak menghabiskan uang dianggap tidak bisa memanfaatkan uang sehingga konsekuensinya dikurangi plafon anggaran tahun berikutnya. Dengan model manajemen berbasis sekolah akan bergeser menjadi "menggunakan uang seefisien mungkin", sehingga meningkatkan efisiensi sekolah dalam pengelolaan keuangan. Bahkan dengan model MBS sekolah diberi keleluasaan mencari dan mengelola sendiri keuangannya yang diawali dengan kebijakan imbal swadaya.

12. Pola Individu yang Cerdas Menuju "Teamwork" yang Kompak dan Cerdas

Tidak jarang sekolah memiliki individu-individu yang cerdas tetapi kurang dimanfaatkan. Bahkan terkesan selama ini terdapat kepala sekolah yang mengasingkan guru-gurunya yang pintar dan kritis karena takut posisinya dihantikan. Pada manajemen berbasis sekolah, individu-individu yang cerdas ini harus diajak memperhatikan kinerja sekolah secara keseluruhan, dan disadarkan bahwa hanya melalui "*teamwork*" yang kompak dan cerdaslah yang akan mampu meningkatkan kinerja sekolah.

13. Pola Informasi Bersifat Pribadi Menuju Informasi Kolektif

Informasi sering hanya dimiliki oleh sejumlah warga sekolah, khususnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa guru. Informasi ini umumnya juga tidak disebarluaskan kesemua warga sekolah (terpribadi). Dengan model MBS informasi harus diakses secara luas dan terbuka ke seluruh

warga sekolah. Hal ini penting untuk mempertinggi tanggung jawab dan akuntabilitas sekolah, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan orangtua dan masyarakat. Tentu saja tidak semua informasi harus disampaikan pada warga sekolah, namun informasi diberikan kepada mereka yang memang berhak menerimanya.

14. Pola Pendelegasian Menuju Pemberdayaan

Manajemen pendidikan kita sampai saat ini masih diwarnai oleh praktek-praktek pendelegasian tugas dan tanggungjawab semata, tanpa diikuti penyerahan kewenangan, sehingga sekolah tidak berdaya. Dengan MBS, sekolah lebih diberdayakan melalui penyerahan tugas dan fungsi, tanggungjawab, hak dan kewajiban, yang disertai kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena, hanya sekolahlah yang merupakan "pusat perubahan" yang sebenarnya, terutama sumberdaya manusianya. Sebagai apapun kebijakan dari Pusat, Wilayah, dan Dinas Pendidikan, namun jika sekolah tidak berubah, maka tidak akan pernah ada perubahan. Perubahan hanya akan efektif jika didukung dengan adanya pengembangan di sekolah. Kadangkala terjadi perubahan tetapi justru tidak berdampak pada perbaikan mutu pendidikan di sekolah.

15. Pola Organisasi Hirarkis Menuju Organisasi Datar

Sampai saat ini sekolah masih diatur dengan manajemen yang rumit, sehingga sekolah lamban beradaptasi dan kurang antisipatif terhadap perubahan-perubahan, serta kurang tanggap terhadap isu-isu kritis/strategis yang menyangkut kemajuan sekolah. Model MBS menginginkan sekolah dibuat lebih fleksibel agar lebih responsif dan antisipatif terhadap isu-isu strategis/kritis yang dihadapi oleh sekolah.

Selama masa transisi sebagai konsekuensi perubahan kebijakan dari pola sentralistis menuju desentralistis (otonomi), sekolah dasar harus mempersiapkan diri terutama dari aspek SDM-nya. Tanpa kesiapan SDM dan sumber daya lainnya, sudah tentu tidak dapat menjalankan konsep MBS secara efektif.

Untuk menyamakan persepsi terkait dengan aspek-aspek yang didelegasikan ke sekolah, maka akan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan utama dari komponen proses di sekolah. Pembelajaran terkait dengan kompetensi guru dalam memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Secara umum, strategi/metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered*) lebih mampu memberdayakan pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar peserta didik, bukan pada keaktifan

mengajar guru. Oleh karena itu, cara-cara belajar peserta didik aktif seperti misalnya *active learning*, *cooperative learning*, dan *quantum learning* perlu diterapkan. Prinsip-prinsip pembelajaran PAKEM akan bisa diterapkan apabila guru memiliki wawasan dan keterampilan pembelajaran yang memadai.

b. Perencanaan dan Evaluasi

Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya (*school-based plan*). Kebutuhan yang dimaksud, antara lain kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu dan berdasarkan hasil analisis inilah kemudian sekolah menyusun rencana/program peningkatan mutu bersama stakeholder lain. Di samping itu, sekolah diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukan oleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering disebut evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan transparan agar benar-benar dapat mengungkap informasi yang sebenarnya. Dari hasil evaluasi diri sekolah dapat menyusun analisis SWOT sekolah dan strategi pencapaiannya.

c. Pengelolaan Kurikulum

Kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional. Padahal kondisi sekolah pada umumnya sangat beragam. Oleh karena itu, dalam implementasi MBS, sekolah dasar diberi kewenangan mengembangkan (memperdalam, memperkaya, memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Sekolah dibolehkan memperdalam kurikulum, artinya, apa yang diajarkan boleh dipertajam dengan aplikasi yang bervariasi. Sekolah juga dibolehkan memperkaya apa yang diajarkan, artinya, apa yang diajarkan boleh diperluas dari *yang harus*, *yang seharusnya*, dan *yang dapat diajarkan*. Demikian juga, sekolah dibolehkan memodifikasi kurikulum, artinya, apa yang diajarkan boleh dikembangkan agar lebih kontekstual dan selaras dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

d. Pengelolaan Ketenagaan

Pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sanksi (*reward and punishment*), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja sekolah (guru, tenaga administrasi, dsb.) dapat dilakukan oleh sekolah. Khusus menyangkut kewenangan dalam merekrut, pengelolaan administrasi dan menggaji guru/staf yang berstatus PNS masih menjadi kewenangan pemerintah. Sedangkan jika ingin menambah guru/staf untuk tenaga yayasan atau tidak tetap sekolah telah diberi kewenangan terutama bagi sekolah/madrasah swasta.

e. Pengelolaan Fasilitas

Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga pengembangan. Dengan pemberian kewenangan ke sekolah, ternyata pihak sekolah lebih kreatif dan lebih mandiri dalam mengelola dan menambah dana sehingga prinsip swadana atau imbal swadaya berjalan dengan efektif.

f. Pengelolaan Keuangan.

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/ penggunaan uang dengan pendekatan MBS sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi pengalokasian/ penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan “kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan” (*income generating activities*), sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

g. Pelayanan Peserta didik.

Pelayanan peserta didik, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan/ pembinaan/ pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah, hingga sampai pada pengurusan alumni, sebenarnya dari dahulu memang sudah didesentralisasikan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya. Kondisi yang dialami oleh hampir semua sekolah adalah tidak memiliki data dan informasi yang terkait dengan alumninya, padahal data tersebut sangat penting untuk memperluas akses informasi dan pengelolaan keuangan.

h. Hubungan Sekolah-Masyarakat.

Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial. Dalam arti yang sebenarnya, hubungan sekolah-masyarakat dari dahulu sudah didesentralisasikan. Beberapa gambar berikut merupakan bentuk partisipasi sekolah terhadap masyarakat dan sebaliknya.

i. Pengelolaan Iklim Sekolah.

Iklim sekolah (fisik dan nonfisik) yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembelajaran yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan/ekspektasi yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik (*student centered activities*) adalah contoh-contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah, sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ekstensif.

BAB X

OTONOMISASI PENDIDIKAN

A. Wajah Otonomi

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan ; pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020. Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif.

Di bidang pendidikan, otonomi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan untuk memindahkan atau mengembangbiakkan masalah pendidikan yang menjadi beban pemerintah pusat ke kabupaten dan kota. Dalam hal penganggaran untuk kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik, tidak akan ada diskriminasi atas sekolah negeri maupun swasta. Seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah, dengan pengertian pemerintah pusat melakukan sharing dana dengan

pemerintah daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang bunyinya "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ketika sampai pada persoalan kesejahteraan guru ada sedikit perbedaan penganggaran, karena gaji untuk guru negeri akan ditanggung oleh pemerintah sedangkan gaji guru swasta menjadi tanggungan pihak penyelenggara pendidikan. Sedangkan tunjangan profesi akan diberikan oleh pemerintah kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. Pelaksanan Otonomi Pendidikan Pada Aras Lokal

H.A.R. Tilaar mendefinisikan **Pendidikan** adalah: Proses hominisasi dan humanisasi yang berlangsung didalam lingkungan keluarga serta masyarakat yang berbudaya. Pada era otonomi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang amat besar bagi penentuan kualitas guru yang diperlukan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu di masa yang akan datang, daerah benar-benar harus memiliki pola rekrutmen dan pola pembinaan karier guru agar tercipta profesionalisme pendidikan di daerah. Dengan pola rekrutmen dan pembinaan karier guru yang baik, akan tercipta guru yang profesional dan efektif. Untuk kepentingan sekolah, memiliki guru yang profesional dan efektif merupakan kunci keberhasilan bagi proses belajar-mengajar di sekolah itu.

Dalam konteks otonomi pendidikan, hasil penelitian John Goodlad tersebut memiliki implikasi bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan sebuah sistem rekrutmen dan pembinaan karier guru agar para guru benar-benar memiliki profesionalisme dan efektivitas yang tinggi supaya ketika ia memasuki ruang kelas mampu menegakkan standar kualitas yang ideal bagi proses pembelajaran.

Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu:

1) Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Kualitas pendidikan dapat ditinjau dari segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna.

Pendidikan disebut berkualitas dan segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and learning), c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja.

Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pementapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian Simmons dan Alexander (1980) bahwa ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan buku bacaan serta pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantinya kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru, fasilitas pendidikan dan pemanfaatannya. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal.

Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

2) Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah

Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (*revenue*) dan penggunaannya (*expenditure*) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan

pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun pradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah.

4) Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai Brain Trust atau Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

5) Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah. Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standard mutu. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan

Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan kebudayaan, terdapat pada pasal 2 ayat 3 adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaan.
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- f. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Kewenangan Pemerintah Propinsi dalam bidang pendidikan

Kewenangan Pemerintah Propinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat pada pasal 3 ayat 5 sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, atau tidak mampu.
- b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok / modul pendidikan untuk taman kanak – kanak, pendidikan luar dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
- c. Mendukung / membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai latihan / atau penatara guru.
- f. Penyelenggaraan umum, propinsi, menghargai peninggalan sejarah kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan kebudayaan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota

Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota akan ditentukan sendiri oleh daerah Kabupaten/Kota dan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

BAB XI IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENDIDIKAN PADA ARAS LOKAL

A. Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan

Menurut Stoner dkk (1996) perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, yang meliputi merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin (*leading*) dan mengendalikan (*controlling*).⁴⁹ Perencanaan sebagai fungsi manajemen dilakukan pada tahap pertama sebelum melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan. Perencanaan sebagai cetak biru (*blue print*) atas kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan organisasi.

Perencanaan merupakan upaya untuk menentukan program dan kegiatan yang ingin dilakukan dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisir dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pengertian perencanaan yang telah dikemukakan ada beberapa persamaan pendapat menyangkut beberapa aspek perencanaan. Aspek-aspek perencanaan tersebut yaitu:

1. Perencanaan sebagai suatu proses. Pada pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas bahwa perencanaan merupakan suatu proses berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di mana proses terkait dengan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan segala kompleksitasnya dalam waktu yang telah ditetapkan, dengan target atau sasaran yang diharapkan. Perencanaan sebagai proses artinya bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan terorganisir secara efektif dan efisien tidak saja sebagai rangkaian yang berkelanjutan tetapi juga tujuan dari suatu peristiwa-peristiwa tersebut mencapai tujuan akhirnya.
2. Perencanaan berorientasi masa depan. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka perencanaan selalu berorientasi pada masa depan. Dengan orientasi inilah maka perencanaan harus mampu memprediksi kondisi lingkungan sosial-ekonomi baik di dalam organisasi atau di luarnya agar tetap seirama dengan tujuan yang diharapkan membuat suatu perencanaan adalah berupaya semaksimal mungkin menciptakan misi dan tujuan organisasi. Perencanaan mengontrol dan mengarahkan organisasi secara keseluruhan.

⁴⁹ Stoner, James, A.F., Freeman, R.W. dan Gilbert, Jr. 1996. *Management*. Pritice-Hall, New Jersey, 1996. p. 82

3. Perencanaan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan hendaklah merupakan penjabaran dari pada tujuan yang hendak dicapai, baik suatu kegiatan sebagai bagian dari keseluruhan organisasi. Adanya orientasi terhadap tujuan ini, berarti terlaksananya kegiatan yang direncanakan merupakan aktivitas pencapaian tujuan pada tahap tertentu.
4. Perencanaan menjabarkan kegiatan-kegiatan. Perencanaan merupakan usaha untuk memperkirakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan pada masa yang akan datang agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.
5. Perencanaan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan tidak dapat diwujudkan jika tidak disertai dengan usaha untuk memikirkan dan mempersiapkan berbagai sumber daya yang dapat menunjang tercapainya kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan.
6. Perencanaan merupakan kegiatan mempersiapkan sejumlah alternatif. Rencana yang tersusun sebagai hasil proses perencanaan merupakan alternatif-alternatif yang akan diberikan kepada para pengambil keputusan yaitu administrasi dalam menentukan alternatif yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Memahami perencanaan seperti yang digambarkan tersebut akan membentuk definisi baru tentang perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam manajemen, selalu berupaya melihat tujuan organisasi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan dengan dukungan sumber daya yang memadai. Keefektifan dan efisiensi perencanaan baik bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah bagian dari prinsip yang harus ada dalam perencanaan

Apabila dilihat dari sifatnya perencanaan ada dua macam:

- (1) **Perencanaan strategis** yaitu suatu perencanaan yang lebih mengutamakan pembentukan adaptasi kelembagaan dalam rangka keselarasannya dengan perubahan lingkungan (Marvin:1980). Perencanaan strategis lebih mengutamakan pada bagaimana organisasi menghadapi perubahan lingkungan dari berbagai aspek seperti aspek sosial-ekonomi & politik di masa mendatang. Untuk itulah perencanaan strategis meletakkan fondasi organisasi sedini mungkin untuk menjangkau ke depan, dalam jangka panjang, tentang visi, tujuan organisasi: rumusan tujuan, rumusan strategi, desain organisasi dan desain sistem, yang diawali dengan analisis lingkungan dan analisis sumber daya.
- (2) **Perencanaan operasional**: rencana operasional yang merupakan implementasi strategi akan memuat rincian kebutuhan untuk menggabungkan strategi ke dalam operasi sehari-hari. Rencana

operasional dibagi menjadi dua macam (Stoner: 1997): (1) rencana sekali pakai (*singluse plan*) meliputi program adalah rencana sekali pakai yang mencakup sejumlah aktivitas, proyek merupakan bagian terpisah dari program dan lebih kecil. Anggaran adalah pernyataan sumber daya keuangan yang disisihkan untuk aktifitas tertentu dalam periode tertentu. (2) rencana berkelanjutan (*standing plan*): seperangkat keputusan yang telah ditetapkan dipergunakan oleh pimpinan untuk menangani aktivitas yang berulang muncul atau aktivitas organisasi: seperti kebijakan, prosedur dan peraturan. Rencana operasional merupakan bentuk implementasi strategis untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuan khusus dalam bentuk program khusus. Program khusus ini merupakan proses menuju tujuan organisasi secara keseluruhan. Rencana operasional dalam pendidikan dapat meliputi: penetapan jumlah guru, karyawan, menetapkan siswa yang akan belajar, alokasi keuangan, memperkenalkan jurusan-jurusan, mata kuliah atau program penelitian, perubahan pada kurikulum atau metode pengajaran, perkiraan pendanaan dan bentuk pengembangan fasilitas (Harry:1968).

B. Prinsip-Prinsip Perencanaan

Ketika melakukan perencanaan apapun dalam suatu organisasi maka diperlukan elemen dasar tentang perencanaan yang harus dipegang oleh pembuat rencana. Dari apa yang dijelaskan di atas, bahwa prinsip perencanaan pendidikan yaitu : **Pertama**, pendekatan pada perencanaan harus bersifat fleksibel serta selalu dilakukan tinjauan ulang. Ini dimaksudkan agar setiap perencanaan yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan organisasi baik bersifat internal ataupun eksternal. **Kedua**: Semua sivitas akademika harus berpartisipasi pada hal-hal tertentu pada proses perencanaan. Anggota organisasi diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan agar dapat memahami secara baik dan tepat apa yang menjadi tujuan organisasi. Karena dengan cara demikian bahwa semua unsur yang ada pada organisasi sebagai bagian dari sistem manajemen. **Ketiga**: Setiap aktivitas perencanaan harus saling terkait pada masing-masing unsur dalam sistem organisasi tersebut. Suatu keterkaitan antara unsur terutama sekali diarahkan oleh kesamaan misi dan tujuan yang telah ditetapkan pada level faktor akademik, pendanaan, sosial dan fisik.

Ada empat prinsip pokok perencanaan sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ Low, Linda., Hung Meng, T. & Teck Wong, S. *Economic of Education & Manpower Development*, New York: Mc-Grow-Hill Books. 1991p. 18

1. *Contribution to purpose and objective*: bahwa perencanaan harus benar diarahkan dan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi pendidikan.
2. *Primary of planning*: bahwa perencanaan merupakan kegiatan pertama dari semua kegiatan manajemen pendidikan dan bersifat menyeluruh.
3. *Pervasiveness of planning*: bahwa perencanaan harus dilakukan di semua tingkat manajemen pendidikan mulai pimpinan puncak hingga pimpinan tingkat bawah.
4. *Efficiency of planning*: bahwa perencanaan harus memperhatikan efisiensi yang tinggi.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen maka tetap memperhatikan, bahwa sekolah agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan harus didasarkan pada pelaksanaan rencana terlebih dahulu. Suatu perencanaan pendidikan memerlukan pendekatan agar terlaksana secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai apa yang diharapkan.

Ada beberapa pendekatan dalam perencanaan pendidikan yaitu: (1) pendekatan tuntutan sosial, (2) pendekatan ketenagakerjaan.

1. Pendekatan tuntutan sosial (*social demand approach*)

Tuntutan sosial terhadap pendidikan dapat dipahami sebagai upaya melaksanakan pendidikan atas kebutuhan masyarakat, pendidikan sebagai upaya pembangunan masyarakat. Menurut Philip (1982) mengatakan bahwa belum dapat memberikan cakupan tentang "tuntutan sosial", namun secara umum yang membutuhkan pendidikan di suatu tempat, waktu tertentu dalam suatu budaya, politik dan ekonomi.

UNISCO (1970) memberikan dua pengertian tentang tuntutan sosial, pertama adalah bahwa hal ini terjadi karena adanya desakan dari banyak orang untuk memasuki pendidikan. Disini pendidikan dipandang sebagai kebutuhan sosial yang harus dipenuhi dan wajib diberikan kepada anggota masyarakat, dalam suatu negara yang berdaulat dan merdeka. Kedua, tuntutan sosial yaitu jumlah dan jenis pendidikan yang dibutuhkan untuk menjamin keharmonisan dan pembangunan masyarakat.

Pandangan yang lain mengatakan bahwa istilah *social demand* diaplikasikan pada tiga bentuk perencanaan yang berbeda (R.G Davis, 1980: 42), bentuk-bentuk tersebut adalah:

1. Bila yang ditargetkan adalah pendidikan dasar, biasanya dinyatakan dalam istilah demografis, misalnya semua anak yang berumur 7-12 tahun mendapatkan pendidikan dasar atau pendidikan 9 tahun.
2. Bila rencana menargetkan pada tujuan nasional yang ditunjang oleh nilai-nilai etis sosial, misalnya semua warga negara berhak atas pendidikan dasar.
3. Bila proyeksi rencana didasarkan pada analisis kebutuhan yang disamakan untuk semua tingkat dan jenis pendidikan.

Pendekatan tuntunan sosial (*social demand*) yang diterapkan dalam pendidikan masyarakat terhadap pendidikan atas dasar pertimbangan jenis-jenis yang paling mendesak, terkait dengan upaya pemberantasan buta huruf. Kondisi sosial, ekonomi dan politik, bahkan populasi penduduk sering kali menjadi *social setting* dalam melakukan perencanaan pendidikan. Untuk itu, maka perlu diperhatikan; a) pertumbuhan penduduk, penduduk usia sekolah, b) prosentase penduduk yang bersekolah, c) arus murid dari tingkat yang satu ke tingkat yang lebih tinggi dan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, d) pilihan atau keinginan masyarakat dan individu tentang jenis-jenis pendidikan.

C. Komponen-Komponen Perencanaan Pendidikan

1. Visi dan Misi

Visi dan misi bagi suatu lembaga atau organisasi perguruan tinggi merupakan suatu hal yang utama dan prinsipil, dimana dengannya organisasi mampu melakukan aktifitas-aktifitasnya pada masa mendatang. Visi dan misi ialah maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dari organisasi lain yang bergerak dalam bidang usaha sejenis. Siagian menekankan misi dalam suatu organisasi yaitu sebagai suatu keistimewaan karakteristik yang mungkin diterjemahkan pada bentuk-bentuk kegiatan yang lebih operasional. Visi dan misi mencakup tugas dan fungsi, filosofi dasar organisasi, apa yang ditawarkan, untuk siapa dan untuk apa. Penekanan utamanya yaitu bagaimana membuat misi organisasi sebagai suatu pusat kreatifitas segala aktifitas diarahkan dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan misi organisasi diambil tiga dasar utama 1) sejarah organisasi, 2) kejelasan keahlian organisasi, 3) lingkungan organisasi. merumuskan misi organisasi, dalam konteks pengertian di atas, berarti berupaya agar misi mencerminkan segala hal yang berkaitan dengan keorganisasian, baik bersifat internal atau eksternal. Ada lima karakteristik visi dan misi organisasi: 1) visi dan misi sebagai kontrak sosial (*social contract*) 2) permanen (*permanence*), 3) visi dan misi merupakan penjelasan (*clarity*), 4) persetujuan (*approval*), visi dan misi harus disetujui penyandang dana untuk memajukan anggota organisasi, 5) terbukti (*proof*), misi harus bisa direalisasikan bersifat spesifik.

2. Tujuan

Tujuan bagi suatu organisasi atau perguruan tinggi merupakan suatu bentuk penjabaran misi organisasi secara lebih spesifik. Artinya bahwa tujuan akan mengarahkan segala aktifitas organisasi lebih operasional. Tujuan (*goals*) lebih mengarah pada aspirasi, fungsi dan maksud lembaga yang ditinjau dalam aspek internal. Tujuan organisasi merupakan titik akhir dari misi organisasi, dengan harapan bahwa mencapai be-berapa hal: 1) tujuan-tujuan akan dapat

dilakukan dalam tindakantindakan khusus, 2) tujuan-tujuan akan menyediakan arahan atau petunjuk, 3) tujuan-tujuan akan menetapkan prioritas-prioritas jangka panjang organisasi, tujuan-tujuan akan memfasilitator kontrol manajemen.

Dapat dilihat bahwa pada beberapa definisi atau batasan runag lingkup tujuan organisasi di atas selalu ditekankan untuk berpijak pada misi organisaasi dalam bentuk yang lebih spesifik atau khusus, baik waktu atau pun jenis-jenisnya. Mungkin bisa dipahami bahwa misi men-cakup keseluruhan organisaasi sedangkan tujuan mencakup spesifikasi dari tiap unit organisasi.

3. Desain Organisasi

Desain organisasi adalah proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisaaasi sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut). Untuk mengembangkan desain organisasi maka dibutuhkan pendekatan disain organisasi maka dibutuhkan pendekatan-pendekatan, antara lain: pendekatan klasik, yang telah dirintis oleh Max Weber, Fredrick Taylor, dan Henry Fayol.

Para ahli manajemen dengan pendekatan klasik desain organisasi memandang bahwa organisasi yang paling efektif dan efisien mempunyai struktur hirarki. Dimana dalam struktur itu tindakan anggota organisasi dibimbing oleh perasaan kewajiban kepada organisasi dan oleh peraturan dan ketentuan rasional. Pendekatan tugas teknologi dengan asumsi dasar bahwa semakin kompleks suatu teknologi semakin banyak manajer dan tingkat manajerial, tentang manajemen meningkat pada manajer tingkat pertama, & staf administrasi semakin besar. Pendekatan ini dikembangkan oleh Joan Woodward pada tahun 1960-an ketika melakukan penelitian tentang pengaruh teknologi pada struktur organisasi. Pendekatan lingkungan yaitu suatu pendekatan pada desain organisasi yang memasukkan lingkungan organisaasi ke dalam pertimbangan desain.

Pada pendekatan ini, dikembangkan dua sistem organisasi yaitu sistem mekanistik, kegiatan organisasi dibagi-bagi menjadi terpisah dan terspesialisasi dengan penetapan tujuan setiap individu dan unit. oleh menejer yang lebih tinggi. Sedangkan sistem organik, individu lebih banyak bekerja dalam kelompok dari pada sendiri. Jadi pada perencanaan perguruan tinggi hendaknya memiliki desain yang diinginkan dan diterapkan dalam menjalankan roda organisasi.

4. Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu subsistem yang menjadi syarat terlaksananya pendidikan di suatu sekolah secara efektif dan efisien. Karena dengan kurikulum dapat direncanakan suatu pedoman proses belajarmengajar di sekolah dengan segala hal yang terkait dengannya, seperti tujuan, materi, mata kuliah dan program keilmuan. Telaah konseptual tentang kurikulum

yang dilakukan ahli pendidikan telah melahirkan keragaman pandangan tentang hal tersebut. Zais⁵¹ mengungkapkan secara jelas tentang fungsi kurikulum yaitu: 1) *curriculum as the program of studies*, 2) *curriculum as course of content*, 3) *curriculum as planned learning experience*, 4) *curriculum as experience "HAD" under the auspices of school*, 5) *curriculum as a structured series of intended learning outcomes*, 6) *and curriculum as (written) plan for action*.

Mengacu pada konsep di atas, maka secara lebih tepat, bahwa kurikulum sebagai acuan ke depan program pelaksanaan tujuan, materi, aktifitas pembelajaran dan evaluasi. Dengan demikian kurikulum pada politeknik merupakan suatu rencana dan sekaligus pelaksanaan pendidikan mulai dari program studi.

Sekarang ini dunia pendidikan menjadi bagian yang sangat terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Kemajuan dalam bidang iptek dan budaya tentu tidak lepas dari peran pendidikan secara timbal balik. Untuk menyikapi ini pendidikan dituntut untuk mendesain kurikulum yang mampu untuk memenuhi kebutuhan iptek dan budaya yang berkembang secara cepat. Di samping itu, juga kebutuhan masyarakat luas, dunia usaha dan dunia industri, terhadap lulusan semakin tinggi. Sehingga kurikulum pendidikan perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat luas ini. Dan pada akhirnya kompetensi lulusan dapat diterima secara layak di dunia usaha dan dunia industri.

5. Sumber Daya Pendidikan

Pendidikan di sekolah sebagai organisasi yang membutuhkan seperangkat sumber daya sekolah guna mengemban dan menjalankan proses pendidikan. Keefektifan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuannya sangat ditentukan dengan faktor sumber daya. Sumber daya sekolah, yang kita maksudkan, yaitu manusia, keuangan dan fasilitas. Sumber daya sekolah meliputi: 1) sumber daya manusia yaitu staf pengajar, pimpinan dan karyawan, 2) sumber dana yaitu pemerintah, yayasan dan bantuan alumni, 3) fasilitas yaitu: bangunan kelas, perpustakaan, laboratorium. Upaya untuk merencanakan SDM pada perguruan tinggi akan mendukung dan menunjang bagaimana alokasi penggunaan, pengadaannya untuk kepentingan proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien. Penting untuk diperhatikan bahwa perencanaan sumber daya pendidikan hendaknya didisain berdasarkan kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Di sini dalam merencanakan sumber daya pendidikan hendaknya mempertimbangkan aspek kebutuhan bagi pelaksanaan pendidikan. Seperti guru dan karyawan hendaknya dipertimbangkan bidang keahlian yang dimilikinya dan gaji yang akan

⁵¹ Zais, Robert S. 1976. *Curriculum; Principles and Foundation*. Crowell Company Inc. New York. 1976. p. 10

diberikan secara tepat dan baik. Demikian juga perencanaan fasilitas pendidikan didisain berdasarkan kebutuhan bagi terlaksananya pendidikan yang baik; dengan mempertimbangkan kualitas dan biayanya.

BAB XII

PROSPEK PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI SDM LOKAL DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

A. Daya Saing dan Kemampuan SDM Lokal

Akhir-akhir ini hampir setiap kesempatan orang berbicara mengenai SDM. Ada yang bicara secara populer dalam peristiwa sehari-hari, ada pula yang khusus membahas berbagai hal mengenai SDM dalam peristiwa-peristiwa penting antara lain, seperti seminar, lokakarya, temu wicara ilmiah, dan lain-lain. Kajian ekonomi terhadap pendidikan menjadi suatu yang cukup menarik dikalangan ahli ekonomi semenjak tahun 1960-an. Pendidikan sebagai suatu bentuk investasi dalam SDM dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Banyak ahli ekonomi klasik menjadikan rujukan tentang SDM dalam pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menekankan peranan pendidikan seperti yang dilakukan Alfred Marshall yang menilai pendidikan sebagai investasi nasional (*national investment*). Para ahli ekonomi menempatkan konsep tentang modal dalam dimensi lain tentang investasi SDM (*investment in human capital*).

Pada konteks di atas Rees (1973) melakukan analisis pendidikan dalam perspektif "human capital" dengan metode *age - earning profiles, the supply and demand of human capital*, dan *rates of return*. Sedangkan Psacharopoulos (1980) melakukan analisis dengan pendekatan *cost benefit analysis of educational investment* dan *analysis of demand for manpower*. Kedua pakar ekonomi pendidikan tersebut memandang bahwa pendidikan sebagai investasi yang paling menguntungkan dalam pembangunan nasional.

Dimana bahwa titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas tenaga kerja. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap produktivitas suatu masyarakat. Anggapan ini diperoleh dari suatu teori *human capital*. Teori ini menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Konsentrasi pendidikan dalam membangun sumber daya manusia dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan akan sangat mendukung pengembangan ekonomi. Negara-negara seperti Jepang, Singapura, Korea dan Hongkong telah memusatkan pengembangan SDM sebagai basis utama dan mendasar bagi pembangunan ekonomi nasional (Law dkk, 1991).

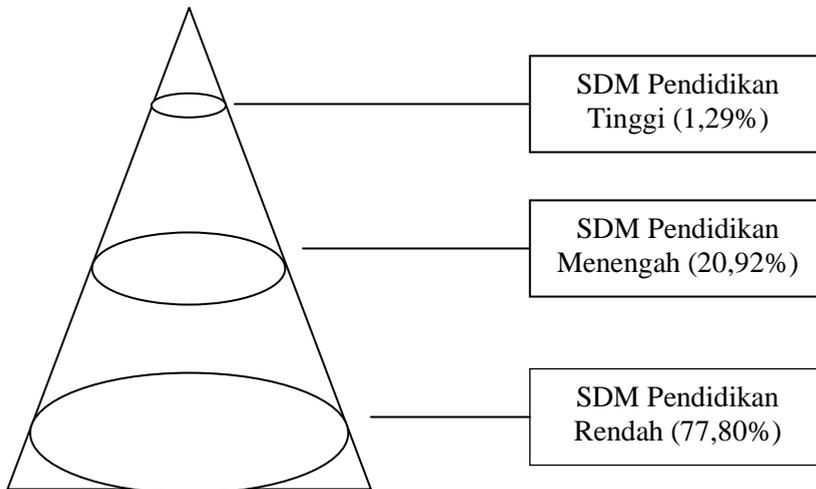
Hal di atas dibuktikan pada laporan *World Development Report 1991*, seperti yang dikutip Hasibuan (1996), mengemukakan ada tiga hal yang dapat menentukan tinggi-rendahnya produktivitas suatu masyarakat. Tiga hal tersebut yaitu: pendidikan dalam arti luas, keterbukaan dan persaingan, serta stabilitas makro ekonomi. Untuk itulah investasi sumber daya manusia dalam

pendidikan menjadi suatu hal sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat.

Mengembangkan pendidikan sebagai upaya investasi SDM menjadi sangat strategis bagi pengembangan ekonomi, dan tentunya dengan melihat dan meningkatkan relevansinya dengan aspek-aspek lainnya. Pendidikan dalam arti luas harus menyumbangkan lulusan yang memiliki "nilai tambah" bagi kebutuhan sumber daya manusia dalam pengembangan ekonomi. Karena upaya investasi SDM melalui pendidikan akan menjembatani sektor ekonomi dengan kebutuhan tenaga kerja sebagai pemacu utamanya dalam meningkatkan produktivitas.

Untuk dapat melakukan peran tersebut, kuncinya terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun aparatnya yang profesional. Membangun pemerintah daerah yang efisien dan profesional menjadi hal penting, jika masing-masing daerah memiliki daya saing tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan profesional.

Berikut ini digambarkan komposisi SDM kita dewasa ini berdasarkan jenjang pendidikan formal,⁵² yaitu:



⁵² Lihat: Nelson Pomalingo. 2005. *Strategi Peningkatan SDM Lokal Dalam Menghadapi Tantangan Global*. Makalah dibawakan pada Disampaikan pada Forum Mubes HPMIG VII Bandung, 6-10 Juni 2005.

B. Strategi Peningkatan SDM secara Utuh dan Berkualitas

Bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita? Sebuah tanda tanya besar, sebab banyak faktor yang harus dipenuhi menuju pencapaian SDM yang utuh dan berkualitas.

Kata sumber, daya, dan manusia sebenarnya tidak ada satu kata pun yang sulit untuk dipahami. Ketiga kata ini jika diartikan secara keseluruhan adalah *daya yang bersumber dari manusia*. Daya yang bersumber dari manusia dapat pula disebut tenaga atau kekuatan (energi atau *power*).

Berkaitan dengan strategi peningkatan SDM yang berkualitas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yang diuraikan oleh Siagian (1995), yaitu (1) perencanaan tenaga kerja, (2) rekrutmen, (3) seleksi, (4) penempatan, (5) sistem imbalan, (6) pembinaan, dan (7) pengembangan karir. Selain itu, konsep peningkatan dan pembangunan kualitas manusia meliputi perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Perencanaan SDM menyangkut aspek potensi atau persediaan SDM dan kebutuhannya. Demikian pula, pengembangan SDM terdiri dari aspek pendidikan, latihan kerja, pengembangan psikis, termasuk kesehatan/gizi dan lingkungan. Sedangkan penggunaan SDM mencakup aspek kesempatan kerja dan tingkat pendapatan. Seperti terlihat dalam bagan berikut ini.

Bagan: Konsepsi Pembangunan Manusia

Perencanaan SDM	Pengembangan SDM	Pemanfaatan SDM
<ul style="list-style-type: none"> Potensi/persediaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Kebutuhan dan latihan kerja Pengembangan psikis Kesehatan/gizi Lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Kesempatan kerja Pendapatan

Mengacu pada hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pengembangan atau peningkatan kualitas SDM secara utuh perlu dilaksanakan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. *Pengembangan Rasio-Intelektual*

Jalur ini menitikberatkan pada pengembangan kualitas manusia melalui pengembangan kemampuan berpikir atau rasio intelektual yang antara lain dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan untuk menilai keadaan *salah-benar*. Pendidikan formal diharapkan dapat memberikan kontribusi

terbesar dalam pengembangan rasio intelektual melalui materi dasar hitung menghitung, membuat perbandingan, mengekspresikan ide melalui tulisan, membuat keputusan dengan kendala-kendala tertentu termasuk pengembangan sikap tepat waktu, sikap kerapian, dan lain-lain. Atau dengan kata lain bahwa penilaian salah-benar biasanya ditentukan oleh nilai-nilai *scientific* yang pengembangannya dilakukan melalui pengembangan rasio (*mind development*), melalui jalur pendidikan formal.

b. *Pengembangan Intuisi-Batin*

Pengembangan intuisi-batin berhubungan dengan pengembangan etika yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk memberi penilaian baik-buruk suatu keadaan/kondisi. Apabila penilaian salah-benar ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang dikembangkan melalui jalur pendidikan formal, maka etika sangat tergantung pada “suara hati” yang dipengaruhi oleh adat, moral, kebiasaan, agama, dan lain-lain. Peranan pendidikan keluarga (*non-formal*) dan agama sangat mempengaruhi suara hati. Selain itu, etika juga dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Selanjutnya kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor genetika, keluarga dari ayah-ibu, lingkungan sosial, latar belakang pendidikan, pekerjaan, keluarga dari istri, banyaknya anak, dan lain-lain.

c. *Pengembangan Fisik Manusia*

Pengembangan fisik merupakan hal yang terpenting dalam pengembangan kualitas SDM, karena dengan fisik yang sehat manusia akan dapat menghidupi dirinya sendiri, yang selanjutnya akan menjurus pada pengembangan jiwa yang sehat.

Adapun pengembangan SDM di tempat kerja meliputi: (a) perlindungan tenaga kerja, (b) pengembangan *Quality of Working Life* (QWL), yaitu konsep pembangunan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas kerja dan akan mengurangi “*laborturnover*”. Adapun pendekatan yang cocok digunakan untuk menyusun lingkungan kerja yang nyaman tersebut dapat dilakukan dengan:

- 1) Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengikutsertakan para karyawan untuk menyusun rencana tempat kerja tersebut.
- 2) Pendekatan teknis dan organisatoris, yaitu pendekatan yang menggunakan dasar tingkat teknologi (peralatan dan prosedur operasi) yang ada, dan digabungkan dengan efektifitas organisasi dan kebutuhan dasar manusia.
- 3) Pendekatan berdasarkan keinginan lingkungan kerja yang cocok untuk kondisi tertentu.

Pendapat para ahli lain yang didasarkan atas perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, seperti yang dikemukakan Rio dalam (Swasono, 1993) mengidentifikasi empat faktor sebagai berikut:

- 1) *Security* (keamanan kerja), termasuk kesehatan, keamanan kerja, pendapatan dan pertumbuhannya.
- 2) *Equity* (kesamarataan), termasuk kesamarataan pendapatan pada jenis pekerjaan yang serupa, kesamarataan kesejahteraan, kondisi kerja, dan lain-lain.
- 3) *Pengembangan individu*, melalui peningkatan kemampuan, peningkatan keterampilan dalam wujud latihan kerja.
- 4) *Demokrasi*, adanya kesempatan untuk ikut partisipasi (berbicara) dalam pengambilan keputusan.

C. Tantangan Pendidikan Sebagai Investasi

Dimasa yang akan datang tantangan bagi penyelenggaraan sistem pendidikan akan semakin sulit. Dimana mereka harus bisa membuat lembaga mereka diminati oleh publik. Dari banyaknya lembaga pendidikan yang ada, mereka pasti memiliki lembaga pendidikan yang kualitasnya baik.

Aspek kualitas itu dilihat dari mata pelajaran yang dibuat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dimasyarakat. Untuk itu para pembaharu pendidikan harus memahami lembaga dan cara mengoperasikannya.

Ini tidak dimaksudkan pada orientasi kepemimpinan tapi lebih ditekankan pada pentingnya memahami aspek sejarah, sosiologi dan ekonomi dari sekolah atau universitas.

Sebagai contoh, dengan membuka wawasan tentang pentingnya organisasi yang informal dan perbedaan antara fungsi nyata dan fungsi yang belum terlihat, sosiologi membuka wawasan yang penting bagi suksesnya perubahan orientasi kepemimpinan.

Di samping itu tim pengajar, kelas yang tidak dikelompokkan, dan program anggaran adalah contoh prosedur yang dikemas untuk implementasi yang mudah. Analisa biaya dan keuntungan dari inovasi ini adalah elemen yang penting dalam kesuksesan.

Hubungan timbal balik antara pendidikan dengan ekonomi nasional secara keseluruhan merupakan kajian utama dalam ilmu atau teori tentang ekonomi pendidikan (seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya seberapa besar pengaruh ekonomi terhadap pendidikan atau peningkatan kecerdasan bangsa).

Pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan *life skill* dan *broad based education* yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasanya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap

pendidikan juga tinggi. Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Yang diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya bertumpu pada empat pilar yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning live together* yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu *membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal dan menghayal*. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya “benar-benar” dibebaskan dari segala beban biaya. Dikatakan “benar-benar” karena selama ini wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

Ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan. Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetik serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan

lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional. Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (*life long learning*), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar. Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi/uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri.

Dengan demikian, pendidikan tidak semata-mata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi. Selama orde baru kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hancur lebur karena tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berpendidikan. Orde baru banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan, tetapi lebih banyak lagi melahirkan orang miskin. Akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian orang dan dengan tingkat ketergantungan yang amat besar. Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik. Inilah saatnya bagi negeri ini untuk merenungkan bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik untuk mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pendidikan juga sebagai alat pemersatu bangsa yang saat ini sedang diancam perpecahan. Melalui fungsi-fungsi pendidikan di atas yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan maka negeri ini dapat disatukan kembali. Pendidikan adalah keniscayaan sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim, 2010
- Abdul Rahmat. *Pengantar Pendidikan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim, 2010
- Abdul Rahmat. *Thing Teacher, Thing Profesional*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim, 2009
- Abdul Rahmat. *Thing Teacher, Thing Profesional*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim, 2009.
- Abu-Duhou, I. *School Based Management*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Terjemahan, 1999
- Ace Suryadi, dan H.ZA.R Tilaar, 1994, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Beare, H. *The Restructuring of Schools and Schools System: a Comparative*. Canberra: The Australian College of Education. 1991
- Blog.binadarma.ac.id/anita/wp-content/uploads/2009, Diakses 23 Agustus 2013.
- Campbell, Roald, F., Cobally, J, dan Nystrand, Rael, O. 1983. *Intruduction To Educational Administration*: Toronto. Allyn and Becon, 1983
- Edward Salis, 2008, *Total Quality Management in Education*, IRCiSoD, Yogyakarta
- Hanson, Mark, E. *Education Administration and Organizational Behavior*:London. Allyen and Bacon, 1991.
- HAR Tilaar, 2000, *Paradigma baru Pendidikan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Al Husna Dzikra, 1995
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- [Http://guru-beasiswa.blogspot.com/2007/12/terdapat-cukup-alasan-yang-baik-untuk.html](http://guru-beasiswa.blogspot.com/2007/12/terdapat-cukup-alasan-yang-baik-untuk.html).
- [Http://smantostop.blogspot.com/2011/11/artikel-normal-0-false-false-false-en.html](http://smantostop.blogspot.com/2011/11/artikel-normal-0-false-false-false-en.html), Agustus 2013
- Indrafachrudi, S. *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orangtua Murid dan Masyarakat*. Malang: IKIP Malang. 1994.
- Indrakusuma, A.D. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Malang: FIP IKIP Malang, 1978.
- Jerome S. Arcaro, 2007 *Pendidikan Berbasis Mutu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Low, Linda., Hung Meng, T. & Teck Wong, S. *Economic of Education & Manpower Development*, New York: Mc-Grow-Hill Books. 1991
- Maisyaroh. *Manajemen Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Dalam, Imron, A., Maisyaroh, dan Burhanuddin (Eds.), *Manajemen Pendidikan: Analisis Substansi dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: UM Press. 2003

- Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2003
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004
- Nanang Fattah. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004
- Nelson Pomalingo. 2005. *Strategi Peningkatan SDM Lokal Dalam Menghadapi Tantangan Global*. Makalah dibawakan pada Disampaikan pada Forum Mubes HPMIG VII Bandung, 6-10 Juni 2005.
- Oemar Hamalik. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Paulo Freire. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Preedy, Margaret. *Managing The Effective School*. London. Open University , 1993.
- Stoner, James, A.F., Freeman , R.W. dan Gilbert, Jr. 1996. *Management*. Pritice-Hall, New Jersey, 1996.
- Syaeful Sagala. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Syafei, S. M. ***Bagaimana Anda Mendidik Anak (Tuntutan Praktis Untuk Orang dalam Mendidik Anak)*** Edisi Kedu, Galia Indonesia, Bogor, 2006.
- Tilaar, H. A. R. (1994). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Penerbit, Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Tirtarahardja, dkk. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Unruh, A. & Willer, R.A. 1974. *Public Relations for School*. Belmont California: Liar Siagler Inc./ Fearon Publishers.
- Wylie, C. *Self-Managing Schools in New Zealand: The Fifth Year*. Wellington: New Zealand Council for Educational Research., 2005.
- Zais, Robert S. 1976. *Curriculum; Principles and Foundation*. Crowell Company Inc. New York. 1976.